



ISSN 2745-4470 (PRINT)



9 772745 631009

ISSN 2745-6315 (ONLINE)



9 772745 477003

Volume 1 No. 1 Oktober 2020

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH (JKUBS)

IAIN PONTIANAK

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI ISLAM

RELIGIOUS, PERSONALITY, INTEGRITY, VISIONARY, PROFESSIONAL

In This ISSUE:

1. JALAN PANJANG COVID 19
2. STRATEGI BAURAN PRODUK IKONIK UMKM ALOEVERA DI KOTA PONTIANAK
3. ANALISIS KINERJA BANK UMUM SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN CAMEL DAN PENDEKATAN ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX TAHUN 2013-2018
4. PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA THE LUXTON HOTEL BANDUNG
5. PENGARUH GAYA HIDUP SEHAT, GAYA KEPEMIMPINAN, DAN TIME BUDGET PRESSURE TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH
6. PERANAN IMPLEMENTASI EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM DALAM MEMODERASI PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN
7. ANALISIS PERBANDINGAN EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN KEMAMPUAN FISKAL PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

JALAN PANJANG COVID19
(sebuah refleksi dikala wabah merajalela berdampak pada perekonomian)

Achmad Syauqi,S.H.I.^{1*}

¹Magister Ekonomi Syari'ah Pasca Sarjana IAIN Pontianak

ABSTRACT

Banyak sudah yang menjadi korban Covid-19 di dunia termasuk Indonesia. Wabah Covid-19 tidak hanya merupakan masalah nasional dalam suatu Negara, tapi sudah merupakan masalah global. Covid-19 berawal muncul dari daerah Wuhan Cina. Penyebaran Covid -19 yang begitu cepat dan mematikan. Covid-19 berdampak kepada kehidupan sosial dan melemahnya ekonomi masyarakat. Permasalahan bagaimana dampak wabah Covid-19 terhadap sektor ekonomi dan upaya penanggulangan wabah Covid-19 serta bagaimana kita sebagai seorang muslim mensikapi wabah covid19 secara benar. Metode penelitian bersifat yuridis normatif yang didukung penelitian empiris menggunakan data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan internet. Jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk mencegah penyebaran wabah Covid- 19 diperlukan kerja sama pemerintah, masyarakat, tokoh agama untuk saling bantu membantu, bahu membahu dan mengingatkan satu sama lain dan bersama-sama melawan Covid-19, dan dalam kondisi seperti ini kita sebagai muslim tetap menyakini ada hikmah dibalik ini semua setelah melakukan segala usaha dan upaya untuk mendapatkan yang terbaik bagi kebutuhan fisik dan non fisik antara materi dan immateri kita hanya bisa berikhtiar dan bertawakal kepada sang Kholik.

ARTICLE INFO

Article History:
Received October 14th
2020
Received in revised from
October 28th 2020
Accepted October 30th
2020

Keywords:
Covid-19, Wabah,
Yuridis Normatif

* Corresponding Author ; E-mail address: asyauqi80@gmail.com

PENDAHULUAN

Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyeakitnya disebut *Coronavirus Disease* (COVID-19). Diketahui, bahwa asal mula virus ini berawal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus ini.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

World Health Organization (WHO) memberi nama virus baru tersebut *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyeakitnya sebagai penyeakitnya disebut *Coronavirus Disease* (COVID-19) (WHO, 2020). Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia-manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia (Relman, 2020). Sampai saat ini virus ini dengan cepat menyebar masih misterius dan berbagai penelitian masih berlanjut.

Berbagai tindakan dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk dapat memutus rantai penyebaran virus ini. Mulai dari upaya sosialisasi, penerapan sosial distancing sampai penetapan undang-undang sebagai dasar hukum penindakan. Masih banyak masyarakat yang dibingungkan dengan munculnya pandemic virus corona ini, terlebih ketika wabah ini memiliki pengaruh dan berdampak pada sektor ekonomi hingga Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian rakyat agar tetap terjaga kestabilan perekonomian baik yang skala mikro maupun makro.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah ini yaitu:

1. Apa pengertian virus corona dan pencegahannya?
2. Bagaimana sikap Pemerintah dan kebijakan (ekonomi) untuk menangani virus corona ini?
3. Bagaimana sikap kita sebagai manusia beragama dan bermasyarakat dalam menghadapi wabah penyakit ini?

Tujuan

Adapun tujuan penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengertian virus corona.
2. Untuk mengetahui saran dan kebijakan Pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid19 serta sikap kita dalam menghadapi Pandemi Covid19 ini.

METODE PENELITIAN

Permasalahan yang penulis angkat adalah jalan panjang covid19 sebuah perenungan ujian yang belum berakhir hingga kini yang telah memberikan dampak pada sektor ekonomi dan upaya yang dilakukan melawan Covid-19 di Indonesia serta sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi ujian ini. Untuk memecahkan masalah diperlukan sumber penelitian berupa bahan primer, baik peraturan perundang-undangan, catatan resmi risalah pembuatan undang-undang dan putusan hakim, dan sekunder berupa buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar putusan pengadilan. 4 Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan data primer dan sekunder, pendekatan undang-undang dan pendekatan Konseptual. Sedang penelitian bersifat normatif dan jenis penelitian kualitatif.

PEMBAHASAN

Pengertian Virus Corona

Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang) (Wang, 2020).

Coronavirus bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat dinaktifkan oleh desinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56°C selama 30 menit, eter, alkohol, asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan kloroform. Klorheksidin tidak efektif dalam menonaktifkan virus (Wang, 2020; Korsman, 2012).

Proses infeksi virus corona

Kebanyakan Coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing dan ayam. Coronavirus disebut dengan virus zoonotik yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk Coronavirus. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian *severe acute respiratory syndrome* (SARS) dan *Middle East respiratory syndrome* (MERS) (PDPI, 2020).

Coronavirus hanya bisa memperbanyak diri melalui sel host-nya. Virus tidak bisa hidup tanpa sel host. Berikut siklus dari Coronavirus setelah menemukan sel host sesuai tropismenya. Pertama, penempelan dan masuk virus ke sel host diperantarai oleh Protein S yang ada dipermukaan virus. Protein S penentu utama dalam menginfeksi spesies host-nya serta penentu tropisnya (Wang, 2020). Pada studi SARS-CoV protein S berikatan dengan reseptor di sel host yaitu enzim ACE-2 (angiotensin-converting enzyme 2). ACE-2 dapat ditemukan pada mukosa oral dan nasal, nasofaring, paru, lambung, usus halus, usus besar, kulit, timus, sumsum tulang, limpa, hati, ginjal, otak, sel epitel alveolar paru, sel enterosit usus halus, sel endotel arteri vena, dan sel otot polos. Setelah berhasil masuk selanjutnya translasi replikasi gen dari RNA genom virus. Selanjutnya replikasi dan transkripsi dimana sintesis virus RNA melalui translasi dan perakitan dari kompleks replikasi virus. Tahap selanjutnya adalah perakitan dan rilis virus (Fehr, 2015).

Setelah terjadi transmisi, virus masuk ke saluran napas atas kemudian bereplikasi di sel epitel saluran napas atas (melakukan siklus hidupnya). Setelah itu menyebar ke saluran napas bawah. Pada infeksi akut terjadi peluruhan virus dari saluran napas dan virus dapat berlanjut meluruh beberapa waktu di sel gastrointestinal setelah penyembuhan. Masa inkubasi virus sampai muncul penyakit sekitar 3-7 hari (PDPI, 2020).

Gejala-gejala yang ditimbulkan virus corona

Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu $>38^{\circ}\text{C}$), batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain. Setengah dari pasien timbul sesak dalam satu minggu. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi dan perdarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari.

Pada beberapa pasien, gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal. Berikut sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi. (PDPI, 2020). Berikut sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi. (PDPI, 2020).

a. Tidak berkomplikasi

Kondisi ini merupakan kondisi ringan. Gejala yang muncul berupa gejala yang tidak spesifik. Gejala utama tetap muncul seperti demam, batuk, dapat disertai dengan nyeri tenggorok, kongesti hidung, malaise, sakit kepala, dan nyeri otot. Perlu diperhatikan bahwa pada pasien dengan lanjut usia dan pasien immunocompromises presentasi gejala menjadi tidak khas atau atipikal. Selain itu, pada beberapa kasus ditemui tidak disertai dengan demam dan gejala relatif ringan. Pada kondisi ini pasien tidak memiliki gejala komplikasi diantaranya dehidrasi, sepsis atau napas pendek.

b. Pneumonia ringan

Gejala utama dapat muncul seperti demam, batuk, dan sesak. Namun tidak ada tanda pneumonia berat. Pada anak-anak dengan pneumonia tidak berat ditandai dengan batuk atau susah bernapas

c. Pneumonia berat

Pada pasien dewasa:

- 1) Gejala yang muncul diantaranya demam atau curiga infeksi saluran napas
- 2) Tanda yang muncul yaitu takipnea (frekuensi napas: > 30x/menit), distress pernapasan berat atau saturasi oksigen pasien <90% udara luar.

Penindakan terhadap pasien virus corona

Pada anamnesis gejala yang dapat ditemukan yaitu, tiga gejala utama: demam, batuk kering (sebagian kecil berdahak) dan sulit bernapas atau sesak.

a. Pasien dalam pengawasan atau kasus suspek / possible

1) Seseorang yang mengalami:

- a) Demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam
- b) Batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan
- c) Pneumonia ringan sampai berat berdasarkan klinis dan/atau gambaran radiologis. (pada pasien immunocompromised presentasi kemungkinan atipikal) DAN disertai minimal satu kondisi sebagai berikut :
 - Memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok atau wilayah/ negara yang terjangkit dalam 14 hari sebelum timbul gejala
 - Petugas kesehatan yang sakit dengan gejala sama setelah merawat pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) berat yang tidak diketahui penyebab / etiologi penyakitnya, tanpa memperhatikan riwayat bepergian atau tempat tinggal.

2) Pasien infeksi pernapasan akut dengan tingkat keparahan ringan sampai berat dan salah satu berikut dalam 14 hari sebelum onset gejala:

- a) Kontak erat dengan pasien kasus terkonfirmasi atau probable COVID-19, ATAU
- b) Riwayat kontak dengan hewan penular (jika hewan sudah teridentifikasi), ATAU
- c) bekerja atau mengunjungi fasilitas layanan kesehatan dengan kasus terkonfirmasi atau probable infeksi COVID-19 di Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit.
- d) Memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan dan memiliki demam (suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam.

b. Orang dalam Pemantauan

Seseorang yang mengalami gejala demam atau riwayat demam tanpa pneumonia yang memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit, dan tidak memiliki satu atau lebih riwayat paparan diantaranya:

- 1) Riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19

- 2) Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19 di Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit),
 - 3) Memiliki riwayat kontak dengan hewan penular (jika hewan penular sudah teridentifikasi) di Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit).
- c. Kasus Probable
Pasien dalam pengawasan yang diperiksa untuk COVID-19 tetapi inkonklusif atau tidak dapat disimpulkan atau seseorang dengan hasil konfirmasi positif pan-coronavirus atau beta coronavirus.
- d. Kasus terkonfirmasi
Seseorang yang secara laboratorium terkonfirmasi COVID-19.
Adapun pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan ialah:
1. Pemeriksaan radiologi: foto toraks, CT-scan toraks, USG toraks. Pada pencitraan dapat menunjukkan: opasitas bilateral, konsolidasi subsegmental, lobar atau kolaps paru atau nodul, tampilan groundglass.
 2. Pemeriksaan spesimen saluran napas atas dan bawah
 - a) Saluran napas atas dengan swab tenggorok(nasofaring dan orofaring)
 - b) Saluran napas bawah (sputum, bilasan bronkus, BAL, bila menggunakan endotrakeal tube dapat berupa aspirat endotrakeal
 - c) Bronkoskopi
 - d) Pungsi pleura sesuai kondisi
 - e) Pemeriksaan kimia darah
 - f) Biakan mikroorganisme dan uji kepekaan dari bahan saluran napas (sputum, bilasan bronkus, cairan pleura) dan darah. Kultur darah untuk bakteri dilakukan, idealnya sebelum terapi antibiotik. Namun, jangan menunda terapi antibiotik dengan menunggu hasil kultur darah).
 - g) Pemeriksaan feses dan urin (untuk investigasi kemungkinan penularan).

Saran kesehatan yang dapat dilakukan masyarakat

Anggota masyarakat sangat dianjurkan untuk mengurangi berpergian ke luar rumah dan mengurangi aktivitas sosial seperti berkumpul untuk makan-makan atau tujuan lainnya, serta menjaga jarak sosial yang tepat dengan orang lain sedapat mungkin.

Senantiasa menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan secara ketat adalah hal penting dalam melindungi diri dari infeksi dan mencegah penyebaran penyakit di kalangan masyarakat:

- Masker bedah dapat mencegah penularan virus melalui pernapasan dari orang yang sakit. Sangat penting bagi orang yang simtomatik (bahkan jika mengalami gejala ringan) untuk memakai masker bedah;
- Mengenakan masker saat naik transportasi umum atau berada di tempat keramaian. Mengenakan masker dengan benar adalah hal penting, demikian juga menjaga kebersihan tangan sebelum mengenakan dan setelah melepaskan masker;
- Menjaga kebersihan tangan secara sering, terutama sebelum menyentuh mulut, hidung atau mata; sebelum makan; setelah menggunakan toilet; setelah menyentuh instalasi umum seperti pegangan tangan atau pintu; atau ketika tangan terkontaminasi oleh cairan pernafasan setelah batuk atau bersin;
- Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat bersin atau batuk. Buang tisu kotor ke dalam tempat sampah berpenutup, lalu cuci tangan hingga bersih;
- Cuci tangan dengan sabun cair dan air, dan gosok setidaknya selama 20 detik. Kemudian bilas dengan air dan keringkan dengan handuk kertas sekali pakai. Saat tangan dibersihkan, jangan menyentuh keran air lagi secara langsung (misalnya, menggunakan tisu untuk

melapisi keran sebelum memamatkannya). Jika fasilitas mencuci tangan tidak tersedia, atau ketika tangan tidak tampak kotor, bersihkan tangan dengan 70 hingga 80% handrub berbasis alkohol adalah alternatif yang efektif;

- Rawat saluran pembuangan dengan benar dan secara teratur (sekitar seminggu sekali) siramkan setengah liter air ke dalam setiap saluran pembuangan (pipa leher U) untuk memastikan kebersihan lingkungan;
- Tutup semua saluran pembuangan air jika sedang tidak digunakan;
- Setelah menggunakan toilet, tutup penutup toilet sebelum menyiram toilet untuk menghindari penyebaran kuman; dan
- Saat mengalami gejala pernafasan, kenakan masker, hindari pergi bekerja atau sekolah, hindari pergi ke tempat keramaian dan segera cari bantuan dokter.

Upaya Pemerintah dan Organisasi kemasyarakatan dalam penanganan Covid19

Hukum sebagai Sosial Kontrol atau pengendali sosial merupakan wujud implementasi dari kepastian hukum, sehingga peraturan perundang-undangan yang dilakukan benar terlaksana oleh penguasa dan penegak hukum. Perubahan hukum harus dapat untuk mengatasi kepincangan-kepincangan yang timbul yang dapat mengganggu ketertiban dan produktivitas masyarakat.¹ Untuk mencegah wabah Covid-19 diperlukan pembentukan hukum sebagai pengendali sosial.

Wabah Covid-19 telah membawa perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat. Penekan asas-asas hukum diperlukan untuk memperlancar terbentuknya struktur ekonomi masyarakat. Penegakan asas-asas yang tidak sesuai aturan hukum akan memperlambat terciptanya ekonomi yang dicita-citakan.²

Wabah Covid -19 yang berdampak pada pengendalian kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya dibentuklah peraturan sebagaimana berikut:

1). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Pasal 53 menyatakan: Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinannya penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pasal 54 menyatakan: sebelum melaksanakan karantina wilayah harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Wilayah yang dikarantina diberikan garis karantina yang dijaga terus oleh pejabat karantina kesehatan dan kepolisian yang berada diluar wilayah.³ Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk selama masa karantina dan, jika ada sakit dilakukan tindakan isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.

Selanjutnya Pasal 55 menyatakan: selama masa karantina kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tanggung jawab pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintahan daerah dan pihak yang terkait.

Pasal 60 menyatakan: undang-undang Karantina Kesehatan harus diatur dengan Peraturan pemerintah, namun hingga saat ini ada Peraturan yang mengatur sehingga karantina wilayah tidak dapat diterapkan.

¹ Zainuddin Ali, dalam bukunya Amran Saudi, Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum, (Jakarta, Prenadamedia, Group, 2018), hlm 14.

² CFG Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan, (Bandung, Bina Cipta, 1988), hlm. 6.

³ Republika.co.id, diakses 4 April 2020, pukul 12.00

- 2). Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dasar pertimbangan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 adalah karena penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi menimbulkan banyak korban jiwa, kerugian material berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pandemi Covid-19 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.⁴

Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan aktivitas ekonomi domestik. Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan dan pemulihan perekonomian dan memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.⁵

- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang dimaksud sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebarannya. PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

- 4). Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 yang dikepalai oleh Badan Penanggulangan Bencana (BNPB).

- 5). Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Kementerian Kesehatan telah merilis aturan turunan untuk merinci Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Cakupan PSBB meliputi liburan sekolah dan tempat kerja, fasilitas umum, kecuali supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, serta kebutuhan pokok, kegiatan sosial dan budaya, pelarangan kerumunan orang, pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya, moda transportasi moda pengecualian transportasi penumpang umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan kecuali, kegiatan pertahanan dan keamanan untuk menegakkan

⁴ Tautan: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176087/Perpu_Nomor_1_Tahun_2020., diakses tanggal 5 April 2020, pukul 20.00 WIB.

⁵ <https://setkab.go.id/isi-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-hadapi-covid-19>, diakses tanggal 5 April 2020, pukul 20,00.WIB.

kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶

- 6). Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 6 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid 19.

- 7). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menerbitkan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional dikeluarkan sebagai kebijakan dampak penyebaran virus Corona. Ketua OJK. POJK dikeluarkan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun selama pandemi Covid -19.⁷

Stimulus Perekonomian Nasional diberikan kepada debitur mulai dari UMKM, industri, pekerja informal. Nasabah kredit bank dapat mengajukan keringanan kredit, perpanjangan jangka waktu cicilan kredit, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan/konversi kredit, kelonggaran waktu untuk membayar cicilan pokok atau bunga. Kebijakan yang tidak diberikan untuk menghapuskan kredit. Restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang terdampak virus Covid-19 seperti ojek online, sopir angkot, nelayan dan, sektor UMKM.

- 8). Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020

Dalam fatwa dinyatakan pengurusan jenazah terutama memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan syariat (Hukum Agama).⁸ Sedangkan untuk sholat dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga (petugas dan pentakziah) agar tidak terpapar Covid -19.

- 9). Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona.

Isi Maklumat Kapolri tersebut antara lain tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak. Tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dan mengikuti informasi dan himbauan pemerintah. Dalam keadaan mendesak dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah. Tidak melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apabila ada informasi yang tidak jelas untuk menghubungi kepolisian setempat.⁹

- 10). Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/MLM/1.0/H/2020

Surat maklumat tersebut Nomor 02/MLM/1.0/H/2020 tentang Wabah virus Covid -19 dan surat bernomor 03/1.0/B/2020 tentang Penyelenggaraan sholat Ju'mat dan sholat Fardhu berjamaah saat Covid-19 melanda.¹⁰ Muhammadiyah mengambil beberapa keputusan berdasarkan nilai-nilai Islam pada Alquran dan Hadis, kondisi darurat saat ini apabila sampai Ramadhan dan Syawal wabah Covid-19 tetap tidak mengalami penurunan, maka, Shalat Tarawih dan kegiatan Ramadhan lain, seperti ceramah Agama, tadarus berjamaah, iktikaf dan kegiatan lainnya berjamaah dilakukan di rumah. Puasa tetap

⁶ Vina Fadhrotul Mukaromah, editor Virdia Rizki rattriani, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/05/123000365/simak-berikut-daftar-6-pembatasan-di-psbb-untuk-cegah-covid-19?page=3>

⁷ Republika co.id, diakses 4 April 2020, pukul 12.00 WIB

⁸ Ahmad Faiz Ibnu Sani, Tempo .com, 27 Mei 2020, diakses tanggal 4 April 200, pukul 14.00 WIB.

⁹ Vina Elvira, editor Ananda Muhammad Firdaus, ayo Purwakata.com, diakses tanggal 6 April 2020, pukul 20.00 WIB.

¹⁰ Republika.ci.id, Jakarta, diakses 4 April 2020 Pukul 11.30 Wib

dilakukan kecuali bagi orang yang sakit dan kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik dapat menggantikannya sesuai syariat.

Covid-19 sudah mereda shalat Idul Fitri dan rangkaianannya dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pertunjuk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.¹¹

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke-4 “*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...*” dapat dimaknai dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia yang diimplementasikan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mengurangi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pembatasan Sosial Berskala Besar ini didasari dari beberapa aturan dasar, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,¹² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana¹³, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.¹⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984:

“Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.”

Pembatasan Sosial Berskala Besar didasarkan dari beberapa Undang-Undang yang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk keselamatan masyarakat dari bencana, wabah ataupun pandemi yang sekarang terjadi di Indonesia. Dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang bertanggung jawab melaksanakannya tidak hanya pemerintah, namun juga seluruh rakyat harus menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut. Selain Undang-Undang yang disebutkan di atas Pembatasan Sosial Berskala Besar-pun diatur secara rinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pada praktiknya Pembatasan Sosial Berskala Besar ini memiliki kriteria antara lain:

- a. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meninggal dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Kasus pandemi ini masih terus meningkat di Indonesia Sementara itu negara yang telah berhasil menekan angka sebaran di antaranya China dan Korea Selatan.

1. Hak Jaminan Masyarakat sebagai Manifestasi Hak Konstitusional

Jaminan masyarakat juga bisa disebut dengan jaminan sosial pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang berkembang luas di beberapa negara seperti negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia dan

¹¹ *Ibid.*

¹² Lihat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang penyakit wabah menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)

¹³ Lihat dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

¹⁴ Lihat dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

Selandia Baru. Secara formal bila dilihat dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28 dan 34 mengamanatkan jaminan sosial dari negara. Pada dasarnya Jaminan sosial merupakan hak yang dimiliki rakyat dan harus dipenuhi oleh negara sesuai amanat konstitusi.¹⁵

Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*” artinya Negara harus mengoptimalkan jaminan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat dan mencerminkan keadilan. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini nampaknya berimbas pada semua sektor terutama ekonomi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya persebaran Covid-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bank Indonesia (BI) pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi di bawah 5 persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02 persen.¹⁶

Dalam hal ini perlu diperhatikan penanganan kesehatan masyarakat seperti penyediaan alat-alat kesehatan, treatment pasien, riset vaksin dan obat, serta pencegahan wabah yang terus menyebar. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah pengamanan seperti, *physical distancing, work and study from home*, pembatasan/pelarangan kegiatan publik, *testing, tracing*, dll. Namun hal-hal tersebut belum mencukupi untuk mencegah terjadi krisis kesehatan dalam pandemi sekarang ini. Atas dasar inilah Pemerintah melakukan tindakan berupa kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran Covid-19 saat ini yang diatur dalam Permenkes 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam peraturan tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pembatasan Sosial Berskala besar paling sedikit meliputi, perliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus yang berbunyi “*pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk*”. Artinya, disaat pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB harus memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk juga. Maka, untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat pemerintah memberlakukan enam paket kebijakan yang juga dapat membantu masyarakat lapisan bawah yang terdampak COVID-19. Keenam paket kebijakan itu antara lain:

1. Penerima bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH naik dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga dengan besaran dana yang naik 25%.
2. Menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Nilai bantuannya juga naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. Kebijakan ini akan diberikan selama sembilan bulan.
3. Kebijakan kartu prakerja anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, dengan jumlah penerima 5,6 juta orang. Kebijakan diutamakan untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Nilai yang diberikan Rp 650-RP 1 juta perbulan selama empat bulan ke depan.

¹⁵ Sentanoe Kertonoegoro, 1987, *Jaminan Sosial dan Plekasannya di Indonesia*, Cet. II Mutiara Sumber Widya, Jakarta, hlm. 7.

¹⁶ Nabila Nurul Putri, “Dampak Pandemi Corona Terhadap Sektor Ekonomi Indonesia”, <https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/67504-Dampak-Pandemi-Corona-Terhadap-Sektor-Ekonomi-Indonesia>. (diakses pada 15 April 2020, pukul 22.16).

4. Pemerintah menggratiskan listrik untuk pengguna 450 VA yang jumlahnya sampai 24 juta pelanggan. Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan ke depan terhitung sejak April-Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar tujuh juta pelanggan mendapatkan diskon 50%.
5. Pemerintah telah mencadangkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok, operasi pasar, dan logistik.
6. Pemerintah memastikan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal tetap berlaku. Pekerja informal yang dimaksud seperti ojek daring, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dan lain-lain dengan penghasilan harian dan kredit dibawah Rp 10 miliar.¹⁷

Kebijakan-kebijakan pemerintah diatas, sebagai langkah pemerintah dan juga untuk menjamin hak-hak masyarakat seperti hak ekonomi, kesehatan, dll dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah juga diperlukan untuk melakukan tes massal dengan sensitivitas mendekati 100% yakni tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Pemerintah Indonesia menargetkan bisa melakukan 10.000 tes Polymerase chain reaction (PCR) virus corona (Covid-19) per hari, guna membendung penyebaran penyakit mematikan ini.¹⁸

Sikap kita sebagai manusia yang beragama dalam menghadapi Covid19

a. Corona Virus19 persepektif Agama Islam

Wabah penyakit Covid-19 dalam catatan sejarah Islam masih menjadi perdebatan dan kontroversial baik di kalangan ulama, kyai, ustadz, bahkan di media-media sosial, dan cenderung di kait-kaitkan satu sama lain. Namun faktanya wabah penyakit Covid-19 ini memang sangat mirip kasusnya seperti wabah penyakit yang menyerang kaum muslim di masa lalu.

Misalnya dalam sejarah Islam bisa kita simak tentang wabah penyakit yang terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam. Setelah Peperangan yang sangat sengit di Yarmuk, kemudian kaum muslimin menetap di Negeri Syam. Setelah itu datanglah wabah penyakit korela yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu.¹⁹ Oleh karena itulah tidak heran jika para ulama, kyai, ustadz, peneliti dan yang lainnya mengaitkan peristiwa ini dengan wabah penyakit Covid-19. Karena memang wabah penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip dengan wabah Covid-19 yang terjadi saat ini yang menelan puluhan ribu jiwa. Kajian Islam ilmiah pun disampaikan oleh **Syaikh Prof. Dr. ‘Abdurrazaq bin ‘Abdil Muhsin Al-‘Abbad Al-Badr** pada 14 Rajab 1441 H / 09 Maret 2020 M. saat ini manusia banyak membicarakan tentang suatu musibah yang besar yang ditakuti oleh kebanyakan manusia, yaitu virus yang terkenal dengan virus Corona. Yang mana manusia banyak membicarakan tentang pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini. Juga mereka membicarakan tentang cara untuk menghindar dan selamat dari virus tersebut. Kemudian beliau memaparkan tentang petunjuk-petunjuk **Al-Qur’an** dan cara-cara yang dapat menerangkan jalan seorang mukmin untuk menghadapi permasalahan seperti ini. Diantara petunjuk-petunjuk **Al-Qur’an yang sangat agung** yaitu bahwasanya

¹⁷ Akbar Ridwan, "Pemerintah harus jamin kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi saat PSBB", <https://www.alinea.id/nasional/pemerintah-harus-jamin-kebutuhan-pokok-terpenuhi-saat-psbb-b1ZLh9sVp>, (diakses pada 16 April 2020, pukul 03.39).

¹⁸ Rahajeng Kusumo Hastuti, "Agresif! Pemerintah Targetkan 10.000 Tes PCR per Hari", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200415160224-4-152163/agresif-pemerintah-targetkan-10000-tes-pcr-per-hari>, (diakses pada 16 April 2020, pukul 03.53)

¹⁹ Mahir Ahmad Ash-Shufiy. 2007. *"Tanda-Tanda Hari Kiamat, Tanda-Tanda Kecil dan Menengah"*. Solo: Tiga Serangkai. h. 46

seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut. Allah SWT. berfirman:

“Katakanlah: Tidak akan menimpakan kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman.” (QS. At-Taubah[9]: 51).

Allah SWT. juga berfirman:

“Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, akan Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya.” (QS. At-Thaghabun[64]: 11)

Allah SWT. juga berfirman:

“Tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang menimpa diri-diri kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (QS. Al-Hadid[57]: 22)

Maka tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah kecuali apa yang Allah telah tuliskan kepadanya. Maka sungguh seorang hamba sangat butuh dalam kondisi seperti ini untuk selalu memperbaharui keimanannya, memperbaharui keyakinannya terhadap **takdir Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dan bahwasanya semua yang ditulis pasti terjadi.**

Dan apa yang menimpa seorang hamba tidak akan meleset darinya dan apa yang meleset dari seorang hamba tidak akan menimpanya dan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala **inginkan pasti terjadi dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi.**²⁰

Apabila manusia berhadapan dengan persoalan lingkungan hidup saat ini, muncullah pertanyaan yang mengungkapkannya bahwa kenapa agama-agama besar di dunia ini dengan ajaran moral dan peri kemakhlukannya, tidak atau kurang berperan untuk ikut memecahkannya. Namun, jika diperhatikan faktor-faktor yang membawa kepada perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, akan tampak bahwa penyebab pokoknya terletak pada materialisme yang melanda dunia saat ini. Umat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan materi yang sebanyak mungkin. Dalam mengumpulkan kekayaan materi, orang tidak segan menebang pepohonan di hutan-hutan, menjaring sebanyak mungkin ikan di laut termasuk bibit-bibitnya, menguras bahan mineral di perut bumi, membuang limbah ke air, darat, dan udara. Hal ini menunjukkan bahwa tidak atau kurang adanya perhatian kepada ayat Al-Qur’an, walaupun 15 abad yang lalu ayat Al-Qur’an **memberikan peringatan kepada manusia** bahwa kerusakan timbul di darat, dan di laut karena perbuatan manusia (Surah Ar-Rum ayat 41). Saat ini apa yang dikatakan Al-Quran tersebut terbukti jelas. Timbullah masalah lingkungan hidup, karena kerakusan manusia terhadap materi. Oleh karena itulah kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan menjadi terancam akibat ulah manusia itu sendiri.²¹ Dengan penjelasan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa virus Covid-19 pun bisa jadi disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri yang tanpa disadari, sehingga Allah SWT memberikan peringatan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah SWT.

Wabah virus corona yang terjadi saat ini, jika kita rujuk pada sejarah nabi merupakan wabah yang sudah terjadi dengan kondisi yang hampir sama, sehingga penanganannya pun sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi wabah tersebut salah satunya adalah dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasul memerintahkan untuk

²⁰ <https://www.radiorodja.com/48245-petunjuk-petunjuk-al-quran-untuk-menghadapi-wabah-penyakit/>

²¹ Zainudin Ali. 2012. *“Pendidikan Agama Islam”*. Jakarta : Bumi Aksara. h.47

tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta. Dengan demikian, metode karantina telah diterapkan sejak zaman Rasulullah untuk mencegah wabah penyakit menular menular ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul membangun tembok di sekitar daerah wabah. Rasulullah juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Kebijakan karantina dan isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit menular. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Selama isolasi, diberikan petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan pengobatan yang tepat kepada penderita. Petugas isolasi diberikan pengamanan khusus agar tidak ikut tertular. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang terisolasi.²²

Terkait dengan wabah coronavirus covid 19 ini, **sebagai seorang mu'min, maka sebaiknya selain melakukan juga ikhtiar karantina atau "social distancing"** ini, maka tingkatkan juga spiritual kita. Jika dapat bertafakur lebih jauh, sebagai muslim semua wabah ini adalah sebuah rahmat-Nya, sebuah peringatan bagi yang berpikir, untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekati diri kepada Allah Swt, sehingga ketika tingkat keparahan tinggi maka akan dirasakan ketenangan dan dengan segala usaha dan doa keselamatan juga kepada Allah Swt, dengan selalu melibatkan-Nya, dan berharap semua wabah ini akan berakhir, dan dapat pula segera ditemukan penyebabnya, InshaAllah AamiinYRA. Dialah Allah Sang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.²³

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi Agama Islam, maka kita akan dapat dengan mudah memahami segala kepentingan sosial, karena dalam **Al-Qur'an kita juga** sering menjumpai hubungan manusia dengan manusia lainnya. Karena dalam Al-Quran pun sering dijelaskan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu baru dapat dijelaskan apabila yang memahami sejarah sosial pada saat agama diturunkan.²⁴

Dengan demikian, *lockdown dan social distancing* merupakan salah satu pilihan terbaik yang difatwakan oleh MUI guna mencegah penyebaran virus covid-19 ini. Bukan tidak diperbolehkan kita untuk shalat berjamaah di mesjid, bukan pula dilarang untuk berkumpul dalam jamaah pengajian, melainkan semata-mata untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain dari bahaya Virus Covid-19.

Sebagai manusia yang beragama dan hidup di mayoritas masyarakat agama Islam dengan telah membaca dan mempelajari referensi-referensi sebagaimana tersebut diatas kembali pada diri kita dalam mensikapi dengan mengambil ibrah dan/atau pelajaran yang bisa petik dan mengambil sikap seperti

- 1) Karantina
- 2) Bersabar.

Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari diceritakan, suatu kali Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang wabah penyakit. Rasulullah SAW bersabda, *"Wabah penyakit itu adalah orang-orang yang DIA kehendaki. Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jika terjadi suatu wabah penyakit, ada orang yang menetap di negerinya, ia bersabar, hanya berharap balasan dari Allah Swt. Ia yakin tidak ada peristiwa yang terjadi kecuali sudah ditetapkan Allah. Maka, ia mendapat balasan seperti mati syahid."*

- 3) Berbaik sangka dan berikhtiarlah.

²² Mukharom, Havis Aravik. *"Kebijakan Nabi Muhammad SAW. Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19"*. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH

²³ Indriya. *"Konsep Tafakkur Dalam Al-Quran Dalam Menyikapi Coronavirus (Covid 19)"*. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 Tahun 2020.

²⁴ Abudin Nata. 2013. *"Metodologi Studi Islam"*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. h. 41-42

Karena Rasulullah SAW bersabda: *“Tidaklah Allah SWT menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya.”* (HR. Bukhari).

4) Banyak berdoalah.

Perbanyak doa-doa keselamatan, salah satu contohnya yang sudah diajarkan Rasulullah Saw untuk dilafadzkan di setiap pagi dan sore berikut ini: *“Bismillahilladzi laa yadhurru maasmih, say'un fil ardhi walafissamaai wahuwa samiul'alim.”* **“Dengan nama Allah yang apabila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak berbahaya.** Dialah maha mendengar dan maha mengetahui). Barang siapa yang membaca dzikir tersebut 3x dipagi dan petang. Maka tidak akan ada bahaya yg memudharatkannya. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Berdasarkan pemahaman *Spiritualism* dan *Rasionalism* dapat dikatakan juga, seseorang yang memiliki tingkat spiritual tinggi, maka akan memiliki hormon endorphin yang lebih banyak dibandingkan dengan yang tingkat spiritual rendah. Mengapa bisa demikian? Walaupun belum ditemukan penelitian secara ilmiahnya, namun logikanya secara sederhana bisa kita perhatikan pada orang yang jauh dari Allah Swt, biasanya mudah mengalami stress, pada kondisi stress hormon yang bekerja adalah adrenalin, norepinephrine dan kortisol. Hormon stress akan menyebabkan asam lambung naik, sistem imun turun, sehingga mudah terkena penyakit. Sebaliknya pada orang-orang yang beriman dan tawakal, hormon oxytocin bekerja lebih baik, sehingga akan menghasilkan endorphin yang tinggi yang menimbulkan kedamaian, ketenangan sehingga sistem imun tubuh menjadi lebih kuat.

Terkait dengan wabah coronavirus covid 19 ini, sebagai seorang mu'min, maka sebaiknya selain melakukan ikhtiar karantina atau *“social distancing”* ini, maka tingkatkan juga spiritual kita. Jika dapat bertafakkur lebih jauh, sebagai muslim semua wabah ini adalah sebuah rahmatNYA, sebuah peringatan bagi yang berpikir, untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekatkan diri kepada Allah Swt, sehingga ketika tingkat kepasrahan tinggi maka akan dirasakan ketenangan dan dengan segala usaha dan doa keselamatan juga kepada Allah Swt, dengan selalu melibatkanNYA, dan berharap semua wabah ini akan berakhir, dan dapat pula segera ditemukan penyebabnya, InshaAllah AamiinYRA. Dialah Allah Sang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

b. Babak baru Covid19 namanya NEW NORMAL

Setelah tiga bulan lamanya bergelut dengan wabah penyakit corona dari mengenal, pencegahan dan pengobatan sekarang kita memasuki Episode baru terkait Covid19 yaitu NEW NORMAL, apa dan bagaimana wujud New Normal yang merupakan langkah pemerintah yang akan mulai diterapkan di bulan Juni 2020.

New Normal atau juga disebut dengan Normal Baru dapat diartikan suatu kondisi dan/atau kebiasaan sosial masyarakat atau perilaku individu yang muncul setelah covid-19 selesai. Seperti Normal Baru, Normal Lama adalah kondisi sosial masyarakat sebelum pandemi covid-19. Semoga normal baru ini tidak membuat masyarakat sosial menjadi kelompok baru yang kehilangan sosialnya yang lama. dengan kata lain kita harus memiliki sebuah tatanan kehidupan baru (New Normal) untuk bisa berdampingan dengan Covid-19. Artinya, kehidupan masyarakat ber-jalan. Tapi kita juga harus bisa menghindari diri dari COVID-19, dengan cara cuci tangan setelah beraktivitas, jaga jarak yang aman, dan pakai masker”.

Bagaimana indikator dari New Normal itu sendiri?

Indikator New Normal Saat Pandemi Corona Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyampaikan beberapa indikator dari WHO dalam rangka skenario new normal di tengah pandemi corona. "Jadi WHO memberikan beberapa indikator yang diminta untuk dapat dipatuhi oleh semua negara di dunia dalam rangka menyesuaikan kehidupan

normalnya, new normal-nya itu dengan COVID-19, sampai kita belum menemukan vaksin," jelas Kepala Bappenas. Indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut²⁵:

1. Tidak menambah penularan atau memperluas penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan. "Ada sebuah cara untuk menghitung, yaitu apa yang disebut dengan basic reproduction number. Jadi basic reproduction number itu adalah sebuah angka yang menunjukkan sebuah virus atau sebuah bakteri atau sebuah penyakit itu bagaimana daya tularnya dari seseorang ke orang lain," terang Menteri PPN. Misalnya, Menteri PPN mencontohkan campak itu daya tularnya itu 12-18 yang artinya basic reproduction number-nya atau yang disingkat dengan R_0 kalau disebutnya. " R_0 itu tulisannya N A U G H T, R_0 itu campak itu 12-18 dan dia melalui aerosol. Kemudian ada juga misalnya batuk rejan atau pertusis itu 5,5. Kemudian kalau kita ingat Flu Spanyol pada 100 tahun yang lalu itu 1,4 sampai 2,8," kata Menteri PPN. Artinya, menurut Suharso, satu orang itu bisa menularkan sampai 2-3 orang dan Covid-19 di seluruh dunia itu yang direkam oleh WHO adalah dari 1,9 sampai 5,7 R_0 -nya. Untuk Indonesia, sampai hari ini diperkirakan 2,5 yang artinya 1 orang itu bisa menularkan ke 2 atau 3 orang. "Tugas kita adalah bagaimana pada waktu tertentu kita bisa menurunkan R_0 itu dari yang namanya 2,5 atau 2,6 persisnya menjadi di bawah 1, artinya dia tidak sampai menularkan ke orang lain," tandas Menteri PPN. Caranya, menurut Menteri PPN, adalah banyak hal dan ini tidak bisa melalui modifikasi cara kampanye vaksinasi, tidak, tetapi ini hanya dapat dimodifikasi melalui satu intervensi sosial yang bentuknya antara lain yang kita lakukan, seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sekarang. "Beberapa kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah, dan melindungi wajah dan seterusnya dengan menggunakan masker. Jadi itu caranya adalah untuk kita bagaimana mendapatkan apa yang disebut dengan R_0 itu. Jadi R_0 itu akan kita tekan sedemikian rupa," kata Menteri PPN. R_0 itu, lanjut Menteri PPN, pada waktu t disebut dengan R_t (effective reproduction number). Jadi bukan Rukun Tetangga tetapi R_t . "Sekarang kita akan menghitung itu untuk semua kabupaten/kota dan seluruh provinsi di Indonesia. Itu indikator pertama yang kita akan gunakan, yaitu R_0 atau R_t -nya," ujarnya.
2. Menggunakan indikator sistem kesehatan yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespons untuk pelayanan COVID-19. "Jadi apabila nanti ada penularan baru atau ada yang mesti dirawat itu benar-benar tersedia atau tidak. Jadi misalnya jumlah kasus yang baru itu jumlahnya harus lebih kecil dari kapasitas pelayanan kesehatan yang bisa disediakan," katanya. Kapasitas pelayanan kesehatan yang disediakan itu, menurut Menteri PPN, harusnya 60% dari total kapasitas kesehatan, misalnya, kalau sebuah rumah sakit punya 100 tempat tidur, maka maksimum 60 tempat tidur itu untuk Covid-19. "Nah, pasien baru yang datang itu jumlahnya dalam sekian hari itu harus di bawah 60. Itu yang disebut dengan kapasitas sistem kesehatan yang terukur yang bisa dipakai dalam rangka apakah kita melonggarkan atau tidak melonggarkan, mengurangi atau tidak mengurangi PSBB," jelasnya.
3. Surveilans yakni cara menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki COVID-19 atau tidak sehingga dilakukan tes masif. "Nah tes masif kita ini hari ini termasuk yang rendah di dunia. Kita sekarang ini baru mencapai 743 per 1 juta, atau sekarang sudah 202.936 orang yang dites," ujarnya. Dengan kapasitas yang sekarang, lanjut Menteri PPN sudah naik 10.000 sampai 12.000 (tes per hari), bahkan

²⁵ <https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg>

kemarin tanggal 18 Mei sudah mencapai 12 ribu lebih tes, maka diharapkan dalam 1 bulan ke depan kita bisa mencapai angka 1.838 per 1 juta penduduk. “Nanti kita bandingkan sekarang dengan Malaysia, Malaysia itu 14.304, Filipina 2.238, Brasil yang relatif hampir sama kayak Indonesia itu 3.462, Vietnam 2.828, Thailand lebih tinggi lagi 4.099, India 1.744,” tandasnya. Seperti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa semua itu harus melakukan tes masif secara cepat dan dengan jumlah yang masif. “Mudah-mudahan ke depan benar-benar kita bisa sampai 12 ribu. Kalau itu bisa 12 ribu mudah-mudahan kita per 1 juta-nya akan semakin tinggi,” katanya.

Dengan 3 indikator itu, Pemerintah akan menempatkan sebuah daerah itu siap atau tidak.

Kebijakan kenormalan baru atau *new normal* ini ditujukan untuk semua sektor usaha. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah telah membuat panduan bekerja di situasi *new normal*. Panduan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Kebijakan *new normal* mungkin memang diharapkan sebagian masyarakat. Khususnya, mereka yang bergantung pada penghasilan harian yang telah lama menganggur karena virus corona. Banyak pihak melihat pemulihan aktivitas warga yang berubah akibat pandemi Covid-19 ini sebagai harapan baru. Karena sudah hampir tiga bulan sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus Corona pertama di Indonesia, kehidupan berjalan tidak seperti biasanya. Jika aktivitas ekonomi kembali berjalan, dampak paling nyata yang dirasakan adalah berkurangnya angka pengangguran, dan tersedianya berbagai lapangan pekerjaan. Dengan begitu, daya beli masyarakat diharapkan bisa kembali pulih seperti sebelum pandemi Covid-19 muncul.

Wabah Covid-19 membuat pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih untuk kompensasi menurunnya daya beli masyarakat. Mulai dari program bantuan sosial (bansos), kartu prakerja hingga relaksasi kredit. Kegiatan normal baru di tengah pandemi Covid-19 ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi ada potensi untuk meningkatkan perekonomian, tapi di sisi lain ada risiko peningkatan kasus positif virus corona. Kesadaran bersama untuk beraktivitas di luar rumah dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, yakni memakai masker wajah, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan tidak keluar rumah jika tidak diperlukan menjadi kunci keberhasilan Indonesia menapaki era baru ekonomi normal. Perilaku seperti itu harus diterima masyarakat dan terus menerus dilakukan sebagai gaya hidup baru. Sehingga di kemudian hari kita tidak akan mendengar kabar munculnya kluster Indogrosir dan kluster pabrik rokok lainnya. Jika kesadaran baru kolektif ini tidak terbentuk, kebijakan kenormalan baru yang digagas pemerintah justru bakal menjadi bumerang yang akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia jatuh lebih buruk dari skenario terburuk yang sudah banyak diperkirakan oleh berbagai lembaga saat ini. Lantas apakah era *new normal* ini menjadi kabar baik bagi perekonomian Indonesia? Balik lagi, itu semua tergantung pada kesiapan Indonesia untuk hidup berdampingan dengan virus corona yang hingga kini belum ada vaksinnya. Kini, semua sektor usaha sedang bersiap untuk menyongsong era baru ekonomi normal, dengan mengubah krisis menjadi sebuah harapan baru. Sehingga dalam jangka waktu dua bulan, seperti harapan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dunia usaha bisa beradaptasi dengan tatanan ekonomi baru yang akan terbentuk di Indonesia.²⁶

²⁶<https://republika.co.id/berita/qb6h6e318/emnew-normalem-peluang-ekonomi-membaik-atau-tambah-buruk>
<https://economy.okezone.com/read/2020/06/18/20/2232336/new-normal-obat-pulihkan-ekonomi-dari-covid-19>

Semoga dengan berbagai kebijakan dari pemerintah yang didukung dengan kesadaran diri dan masyarakat dalam mengatasi wabah penyakit corona ini mampu memberikan jalan dan membuka segala pintu kebangkitan di berbagai bidang dari bidang ekonomi, kesehatan dan politik terutama bagi masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Covid-19 merupakan virus RNA strain tunggal positif ini menginfeksi saluran pernapasan. Penegakan diagnosis dimulai dari gejala umum berupa demam, batuk dan sulit bernapas hingga adanya kontak erat dengan negara-negara yang sudah terinfeksi. Pengambilan swab tenggorokan dan saluran napas menjadi dasar penegakan diagnosis coronavirus disease. Penatalaksanaan berupa isolasi harus dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

Jaminan kesehatan setiap warga negara Indonesia telah termaktub dalam konstitusi. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, maka pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya terlebih dalam permasalahan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, untuk mencapai setidaknya cita-cita negara yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah perlu memberlakukan kebijakan yang dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan langkah preventif yang saat ini sedang pemerintah terapkan. Karena masih banyak masyarakat yang kurangnya pemahaman terhadap hal ini.

Berbagai kebijakan telah diambil oleh Pemerintah kita untuk mengatasi persoalan wabah corona ini dari kesehatan dan ekonomi namun jangan sampai kemudian ditengah-tengah gencarnya kita melawan penyebaran virus corona justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang justru menguntungkan diri dan merugikan segala kebijakan Pemerintah untuk rakyatnya termasuk kebijakan Pemerintah terakhir yaitu NEW NORMAL dalam arti menyambut dan menjalani “Kenormalan Baru” dalam rangka memperbaiki pertumbuhan ekonomi negara dan mengembalikan aktifitas seperti sedia kala walau harus bersanding dan berjalan berdampingan dengan wabah corona Covid19 yang belum tuntas dan belum ketemu vaksin pengobatannya.

Pada akhirnya terkait dengan wabah coronavirus covid 19 ini, sebagai seorang mu'min, maka sebaiknya selain melakukan segala kebijakan Pemerintah tersebut diatas kita juga harus ikhtiar karantina atau “*social distancing*” ini, maka tingkatkan juga spiritual kita. Jika dapat bertafakkur lebih jauh, sebagai muslim semua wabah ini adalah sebuah rahmatNYA, sebuah peringatan bagi yang berpikir, untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekatkan diri kepada Allah Swt, sehingga ketika tingkat kepasrahan tinggi maka akan dirasakan ketenangan dan dengan segala usaha dan doa keselamatan juga kepada Allah Swt, dengan selalu melibatkanNYA, dan berharap semua wabah ini akan berakhir, dan dapat pula segera ditemukan penyebabnya, InshaAllah AamiinYRA. Dialah Allah Sang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

Saran

Tiada kata yang paling pantas kita sematkan pada realita yang saat ini terjadi yaitu sejak terjangkitnya bumi Nusantara Indonesia dengan wabah coronavirus covid19 sampai dengan kenyataan New Normal ini selain bersabar dengan kata lain rela tidak rela, mau tidak mau antara ada dan tiada namun fenomena ini memang terjadi, So kita harus mampu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita baik untuk skala diri, keluarga dan masyarakat dan negara.

Selalu positif thinking dan berfikir ada apa dibalik ini semua menjadikan kita semakin faham apakah ini sebuah konspirasi tingkat tinggi atukah memang sebuah ujian bagi masyarakat dan negara kita yang tercinta ini. Mari kita ambil hikmah dari Covid19 ini dan tetap beraktifitas seperti biasa dengan selalu memperhatikan segala ketentuan-ketentuan yang

diberlakukan untuk meminimalisir penyebaran Covid19. dan kita sambut Kenormalan Baru dengan nafas baru dan semangat baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ash-Shufiy, Mahir, 2007. **“Tanda-Tanda Hari Kiamat, Tanda-Tanda Kecil dan Menengah”**. Solo : Tiga Serangkai.
- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Ali Zainudin. 2012. **“Pendidikan Agama Islam”**. Jakarta : Bumi Aksara
- A, L. (2006). *The Welfare State Background, Achievements, Problem*. Research Institute of Industrial Economics.
- Adzkiya, A. (2020, April 16). Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52153187>
- Buana, Dana Riksa, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).
- Hastuti, R. K. (n.d.). *CNBC*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200415160224-4152163/ agresif-pemerintah-targetkan-10000-tes-pcr-per-hari>
- Indriya. **“Konsep Tafakkur Dalam Al-Quran Dalam Menyikapi Coronavirus (Covid 19)”**. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 Tahun 2020.
- J.H, R. (1991). *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kertonoegoro, S. (1987). *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Midgley, J. (1997). *Social Welfare in Global Context*. London: Sage Publication.
- Mohammad, N. (1998). *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*. Disertasi: Universitas Airlaga Surabaya.
- Mukharom, Havis Aravik. **“Kebijakan Nabi Muhammad SAW. Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19”**. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 (2020).
- Mukharom, Havis Aravik. **“Kebijakan Nabi Muhammad SAW. Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19”**.
- Nasution Harun. 2016. **“Teologi Islam”**. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Nata Abudin. 2013. **“Metodologi Studi Islam”**. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. (2020). *Panduan Praktik Klinis: Pneumonia 2019-nCoV*. PDPI: Jakarta

- Putri, N. N. (n.d.). Retrieved from <https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/67504-Dampak-Pandemi-Corona-Terhadap-Sektor-Ekonomi-Indonesia>.
- Relman, E. (2020). Business insider Singapore. Cited Jan 28th 2020. Available on:<https://www.businessinsider.sg/deadly-china-wuhan-virusspreading-human-to-humanofficials-confirm-2020-1/?r=US&IR=T>.
- Ridwan, A. (n.d.). *Alinea*. Retrieved from <https://www.alinea.id/nasional/pemerintah-harus-jamin-kebutuhan-pokok-terpenuhi-saat-psbb-b1ZLh9sVp>,
- Rohmah, S.N. "Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Corona?," Adalah: Volume. 4, No. 1 (2020).
- Supriatna, Eman. 2019. "*Islam dan Ilmu Pengetahuan*". Jurnal SosHum Insentif Vol. 2 No.1 April 2019.
- Wirawan, M. K. (n.d.). *Kompas*. Retrieved from <https://www.kompas.com/global/read/2020/04/05/220306570/korea-selatan-umumkan-perpanjangan-social-distancing?page=all>
- WHO. (2020). WHO Director-General's remarks at the media briefing on 2019-nCov on 11 February 2020. Cited Feb 13rd 2020. Available on: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-remarks-at-the-mediabriefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>. (Feb 12th 2020)
- Wang, Z., Qiang, W., Ke, H. (2020). A Handbook of 2019-nCoV Pneumonia Control and Prevention. Hubei Science and Technology Press. China
- Yuliana. 2020. Corona virus disease (Covid-19); Sebuah tinjauan literatur. Wellness and Healthy Magazine. Vol. 2 No. 1. Februari 2020. P. 187-192. Lampung: Universitas Lampung.
- Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).

Website:

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/17/05150011/mui-rilis-fatwa-terkait-ibadah-saat-wabah-corona-ini-isi-lengkapnya>

<https://www.hidayatullah.com/kajian/oase-iman/read/2020/04/01/180866/inilah-lima-wabah-thaun-dalam-sejarah-islam.html>

<https://www.nu.or.id/post/read/117846/antara-corona--ulama--dan-sains>

<https://www.radiorodja.com/48245-petunjuk-petunjuk-al-quran-untuk-menghadapi-wabah-penyakit/>

<https://news.detik.com/berita/d-4938018/lockdown-atau-isolasi-juga-diterapkan-masa-rasulullah-saat-ada-wabah-penyakit>

<https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/info-terkini/COVID>

STRATEGI BAURAN PRODUK IKONIK UMKM ALOEVERA DI KOTA PONTIANAK

Ita Nurcholifah ^{1*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak

ABSTRACT

One of the areas and cities that have natural resources is the city of Pontianak. These natural resources are in the form of aloe vera (Aloe vera). Aloe vera is a plant that is easy to grow on peatlands in the city of Pontianak and has high benefits and economic value. So that this plant can be used as various types of food and beverage processing. The development of MSMEs in Pontianak City, of course, must be supported by an effort to keep the business running and progress in business, especially in terms of income, so that gradually the UMKM can "upgrade" to become a large and developing business so that it can support the very foundation of the national economy awaited by the Indonesian government. Therefore, this study aims to determine the iconic product strategy in the product width line, product length line, product depth line and MSME product consistency lines. This research uses a descriptive qualitative approach. The four dimensions of the product mix help the company in defining the company's product strategy, where the company can expand its business in four ways, the company can add to its product lines, namely: expanding its product mix, the company can extend each product line, the company can add product variations and deepen the mix. By implementing a product mix strategy with a four-dimensional approach, it is hoped that Aloevera MSMEs can develop more on an international or global scale. With the creation of more varied products based on the needs and desires of consumers.

ARTICLE INFO

Article History:
Received October 14th
2020
Received in revised from
October 28th 2020
Accepted October 30th
2020

Keywords:
Aloe vera; MSMEs, iconic,
strategic, marketing, bauran
produk

* Corresponding Author; E-mail address: nurcholifahery@gmail.com

PENDAHULUAN

Kekayaan alam yang Tuhan berikan kepada manusia di muka bumi ini adalah untuk kesejahteraan manusia. Selain dapat dinikmati secara langsung, kekayaan alam tersebut harus di proses (Produksi) terlebih dahulu sehingga menjadi suatu produk. “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia mengetahui segala sesuatu.”(QS.Al-Baqarah:29).

Dengan melimpahnya kekayaan alam di dunia membuat para manusia melakukan upaya untuk memanfaatkan dan menghasilkan suatu produk. Suatu produk merupakan hasil dari proses produksi yang dilakukan oleh manusia sehingga dapat ditawarkan dan memberikan manfaat maupun kepuasan pada manusia lainnya. Dengan banyaknya hasil olahan yang berasal dari bumi membuat manusia berusaha untuk menjadi pelaku usaha, berdagang maupun berbisnis. Usaha tersebut dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan membuka usaha baik itu skala mikro, kecil maupun menengah.

Usaha Kecil Mikro dan Menengah adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan maupun bersama-sama tergabung dalam badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif. Kegiatan usaha ekonomi produktif adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja serta untuk ketahanan pangan bagi masyarakat suatu daerah/masyarakat lokal.

Salah satu daerah maupun kota yang memiliki sumber daya alam adalah kota Pontianak. Sumber daya alam tersebut berupa tanaman lidah buaya (Aloe vera). Tanaman aloe vera merupakan tanaman yang mudah tumbuh di lahan gambut yang ada di kota Pontianak dan memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang tinggi. Sehingga tanaman ini dapat dijadikan berbagai macam jenis olahan makanan maupun minuman.

Jenis olahan makanan dan minuman dari tanaman lidah buaya dapat mendatangkan nilai ekonomi sehingga tanaman ini membawa peluang bagi setiap orang yang dapat memanfaatkannya. Sehingga dapat dijadikan suatu usaha.

Dengan melakukan usaha, baik usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan usaha ini sudah sangat mudah dijumpai diberbagai tempat khususnya di Kota Pontianak, bahkan perkembangannya sangat cepat seiring dengan tingginya kebutuhan hidup masyarakat serta meningkatnya kemampuan usaha baik melalui pembinaan pemerintah maupun prakarsa individu yang banyak mendapatkan berbagai informasi usaha dan peluang usaha melalui media informasi seperti internet.

Berkembangnya UMKM di Kota Pontianak tentu saja harus di tolong oleh sebuah upaya bagaimana menjadikan usaha tersebut tetap berjalan dan mengalami kemajuan usaha khususnya pendapatannya sehingga lambat laun UMKM tersebut bisa “naik kelas” menjadi usaha yang besar dan berkembang sehingga mampu menjadi penopang pondasi ekonomi nasional yang sangat dinanti oleh pemerintah Indonesia.

Guna mewujudkan pengembangan usaha UMKM tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan, untuk itu UMKM harus benar-benar dapat mempersiapkan dirinya dalam memupuk kemampuan untuk menciptakan produk usaha atau jasanya yang mampu menjadi daya tarik yang positif sehingga para konsumen atau pelanggannya tak berpaling kelain hati. Sehingga diharapkan dengan adanya suatu produk yang memiliki daya tarik tersebut mampu meningkatkan omset usaha UMKM tersebut.

Produk yang dihasilkan tersebut dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, kemudian dibeli, dipergunakan dan yang lebih penting adalah dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan strategi produk. Strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkan dan berkaitan juga dengan segala sesuatu yang melekat pada produk tersebut.

Suatu produk yang memiliki daya tarik akan lebih tangguh atau kuat bila produk tersebut menjadi sebuah ikon ditengah masyarakat yang yang memproduksi atau menjual produk tersebut. Suatu produk yang menjadi ikon dengan sendirinya menjadi prioritas utama pembelian oleh para konsumen yang tahu dan memahami produk di kawasan tersebut. Dalam arti kata para konsumen tak akan mudah berpaling ke lain hati bila mereka telah menemukan produk ikon yang didambakannya. Dan bila suatu produk telah mampu menjadi ikon di tengah masyarakat konsumennya tentu akan dengan semakin dapat meningkatkan kemajuan UMKM tersebut untuk kemudian lambat laun “naik kelas” menjadi usaha besar yang sangat maju.

Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk kota Pontianak di dominasi oleh pelaku usaha makanan dan minuman (mamin), ada sekitar 200 anggota pelaku usaha makanan dan minuman yang tergabung dalam himpunan pelaku usaha mikro kecil menengah. <https://www.pontianakpost>.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor: 521/M-IND/Kep/12/2015, tentang penetapan produk *One Village One Product (OVOP)*, terdapat 3 (tiga) produk olahan Lidah Buaya di Kota Pontianak yang di tetapkan, antara lain :

1. I Sun Vera (minuman Lidah Buaya /*Aloevera*) asal Kota Pontianak
2. Rotiku Hidup (Minuman Lidah Buaya / *Aloevera*) Kota Pontianak
3. Maveria (Minuman Lidah Buaya / *Aloevera*) dari Kota Pontianak.

Ketiga produk olahan Lidah Buaya (*Aloevera*) yang di produksi oleh UMKM di Kota Pontianak yang tentu saja menjadi produk ikonik Kota Pontianak yang jarang sekali dijumpai di tempat-tempat lain di Indonesia ini. Bahkan juga sangat langka dijumpai diberbagai Negara di dunia ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa produk olahan Lidah Buaya (*Aloevera*) merupakan produk ikonik Kota Pontianak.

Menurut Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo bahwa kota pontianak saat ini sudah memiliki lebih dari 30 jenis produk turunan dari *Aloevera* yang dihasilkan oleh UMKM Kota Pontianak. <http://pontianak.tribunnews.com>

Menciptakan produk ikonik juga tidak gampang untuk itu harus dilakukan upaya berupa strategi yang jitu guna dapat menciptakan produk ikonik terlebih bagi usahawan UMKM yang memang juga banyak keterbatasan dalam berbagai hal di dalam memajukan usahanya tersebut. Oleh karena itu akan dibahas seperti apa strategi ikonik produk pada UMKM dilihat dari lini lebar produk, lini panjang produk, lini kedalaman produk dan lini konsistensi produk.

Kajian Pustaka

Pengkajian kepustakaan khususnya pada kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seputar produk ikonik memang penting untuk dilakukan guna menghindari penyaduran penelitian yang telah ada atau penjiplakan data hasil penelitian, selain itu juga penting untuk menjadi perbandingan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Hasil penelitian yang dilakukan Hanfan (2017) menyebutkan bahwa keunggulan produk ikonik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran.

Hasil penelitian yang dilakukan Banerjee dan Soberman (2013) menunjukkan bahwa kemampuan pengembangan produk memiliki dampak signifikan terhadap strategi pemasaran. Selain itu, menurut Ferdinand dan Fitriani (2015) dengan daya tarik produk ikonik akulturatif mampu mempengaruhi kinerja pemasaran. dengan kata lain bahwa produk-produk yang ikonik akan mampu memajukan sektor pemasaran.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Indriastuti dan Hidayah (2017) juga menyebutkan bahwa ikonik produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan produk. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Azizi (2009), menyebutkan bahwa strategi kapabilitas pengembangan produk berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. Setiap organisasi maupun perusahaan mempunyai tujuan diantaranya adalah untuk tetap bertahan dan mencapai suatu kemajuan, oleh karena itu strategi diperlukan untuk meraihnya.

<https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs>

Definisi Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti *strategos* yang artinya komandan militer. Menurut Kenichi Ohmae (dalam buku Senja Nilasari ;2014) strategi adalah keunggulan bersaing guna mengubah kekuatan perusahaan atau organisasi sehingga menjadi sebanding atau melebihi kekuatan pesaing dengan cara yang paling efisien.

“Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus” (kamus besar bahasa Indonesia , 1990:859).

“Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya” (Chandler (1962) dalam Rangkuti, 2013:3).

Menurut Triton (2008: 13) Setiap organisasi membutuhkan strategi manakala menghadapi situasi berikut :

1. Sumber daya yang dimiliki terbatas
2. Ada ketidakpastian mengenai kekuatan bersaing organisasi
3. Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi
4. Keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang waktu.
5. Ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif.

Menurut Rangkuti (2013:6-7), Strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi, yaitu strategi manajemen, strategi investasi, dan strategi bisnis.

1. Strategi Manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. Misalnya, strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya.

2. Strategi Investasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi, dan sebagainya.

3. Strategi Bisnis

Strategi bisnis ini sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.

Menurut Henry Mintzberg dalam bukunya Hendy Mustiko Aji (2018) menyampaikan bahwa umumnya orang-orang mndefinisikan strategi menjadi empat, yaitu :

1. Strategi adalah rencana, “bagaimana” untuk pergi dari sini ke sana.
2. Strategi adalah pola kegiatan dari waktu ke waktu
3. Strategi adalah posisi
4. Strategi adalah perspektif, yaitu berkaitan dengan visi dan arah.

Menurut Stanton (2001:96), Produk adalah sekumpulan atribut fisik nyata (*tangible*) dan tidak nyata, didalamnya sudah mencakup warna, harga, kemasan, prestise pengecer, dan pelayanan dari pabrik serta pengecer yang mungkin diterima oleh pembeli sebagai suatu yang bisa memuaskan keinginannya.

Produk

Menurut Lamb, Hair dan Mc. Daniel (2001:414), Produk adalah segala sesuatu, baik menguntungkan maupun tidak, yang diperoleh seseorang melalui pertukaran .

1. Tingkatan Produk

Menurut Philip Kotler (2002:69) Dalam konsep produk itu sendiri, dikemukakan bahwa produk memiliki 5 tingkatan menurut yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat inti (*core benefit*)
Manfaat inti yaitu jasa atau manfaat dasar yang sesungguhnya dibeli pelanggan, misalkan: manfaat konsumen membeli kosmetik adalah untuk mempercantik diri.
- b. Produk dasar (*basic product*)
Produk dasar merupakan versi dasar dari produk atau manfaat umum yang diperoleh dari produk yang dikonsumsi, misalnya: perusahaan kosmetik menyediakan produk perawatan kulit, tata rias dan lain-lain.
- c. Produk yang diharapkan (*expected product*)
Produk yang diharapkan adalah seperangkat atribut atau kondisi minimal yang diharapkan oleh pembeli ketika membeli suatu produk.
- d. Produk tambahan (*augmented product*)
Produk tambahan adalah produk yang memiliki tambahan yang lebih daripada *expected product*, misalkan: handbody yang mengandung pelindung tabir surya selain berguna untuk melembutkan kulit juga dapat melindungi kulit dari matahari.
- e. Produk potensial (*potential product*)
Produk potensial merupakan keseluruhan penyempurnaan dan perubahan yang mungkin dialami sebuah produk dikemudian hari, potensial produk menekankan pada evaluasi dimana perusahaan mencari cara-cara baru yang agresif untuk memuaskan dan membedakan dengan tawaran pesaing.

2. Klasifikasi Produk

Menurut Philip Kotler (2002; 73) produk dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok menurut ketahanan atau keberwujudannya:

- a. Barang yang terpakai habis (*Nondurable Goods*)
Barang yang terpakai habis adalah barang berwujud yang biasanya dikonsumsi satu atau beberapa kali pemakaian misalnya: sabun, pasta gigi, dan lain-lain.
- b. Barang Tahan Lama (*Durable Goods*)
Barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya masih bertahan setelah beberapa kali pemakaian (jangka waktu yang lama), misalkan: lemari pendingin, sepatu, pakaian.
- c. Jasa (*Service*)
Jasa adalah kegiatan, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual, misalkan: potong rambut dan jasa perbaikan.

Bauran Produk

Bauran produk disebut juga *product assortment* atau keragaman produk, menurut Kotler (2002:75), Bauran produk (keragaman produk) adalah kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu dengan harga murah.

Masih menurut Kotler (2000:453) memberikan definisi tentang bauran produk sebagai berikut: "bauran produk adalah kumpulan dari semua produk dan unit yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli." Bauran produk suatu perusahaan memiliki dimensi lebar, panjang, kedalaman dan konsistensi tertentu.

Keempat dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Lebar bauran produk mengacu pada berapa banyak macam lini suatu perusahaan.
- b. Panjang bauran produk mengacu pada jumlah unit produk dalam bauran produknya.
- c. Kedalaman bauran produk mengacu pada berapa banyak varian yang ditawarkan tiap produk dalam lini tersebut.

- d. Konsistensi bauran produk mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam hal penggunaan akhir, persyaratan produksi, saluran distribusi.

Adanya empat bauran produk tersebut memungkinkan perusahaan untuk memperluas bisnisnya dengan empat cara. Perusahaan dapat menambah lini produk baru, sehingga memperlebar bauran produksinya. Perusahaan dapat memperpanjang tiap lini produk. Perusahaan dapat menambah lebih banyak varian produk pada tiap produk dan memperdalam bauran produknya. Akhirnya perusahaan dapat mengejar lagi konsistensi lini produk yang lebih kuat.

Menurut Kotler (2005:76) Suatu bauran produk terbentuk oleh beberapa lini produk. Lini produk adalah sekelompok besar produk yang pada pokoknya dirancang untuk penggunaan yang sama serta memiliki karakteristik fisik yang serupa.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat keputusan mengenai lini produk menurut Kotler (2005:76) adalah:

1. Analisis Lini Produk

Dalam menganalisa lini produknya, perusahaan memerlukan 2 informasi penting yaitu: (a). Tingkat penjualan dan keuntungan setiap produk dalam lini produk. dan (b) Profil dasar lini produk, dimana perusahaan harus menganalisis bagaimana penempatan lini produknya terhadap lini produk pesaing.

2. Panjang Lini Produk

Salah satu masalah yang dihadapi perusahaan dalam membuat keputusan mengenai lini produk, dapat dikatakan terlalu pendek bila ternyata perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya dengan menambah item, sebaliknya lini produk dapat dikatakan terlalu panjang, bila perusahaan dapat meningkatkan hanya dengan mengurangi jumlah item produknya.

Perusahaan dapat mengurangi panjang lini produknya dengan:

- a. Merentang lini (*Line Stretching*)

Merentang lini adalah usaha untuk memperpanjang lini produk. Saat ini keputusan merentang lini produk dapat dilakukan dengan merentang kebawah, merentang keatas dan merentang kedua arah.

- b. Mengisi Lini (*Line Filling*)

Mengisi Lini adalah usaha untuk memperpanjang lini dengan menambah produk dalam segmen yang sama.

3. Memoderenisasi Lini Produk.

Walaupun panjangnya sudah tepat lini produk tersebut mungkin harus dimoderenisasi, misalkan produk perusahaan terlihat kuno sehingga kalah bersaing dengan produk pesaing yang lebih modern.

4. Menonjolkan keistimewaan lini produk

Perusahaan umumnya memilih satu atau beberapa jenis produk yaitu memberi ciri pada lini tersebut.

5. Pemangkasan atau mengurangi lini produk.

Perusahaan membuang jenis produk yang sudahtidak menguntungkan lagi.

Produk Ikonik

Keunggulan produk ikonik adalah superioritas perusahaan dengan membuat produk yang menjadi ikon atau lambang yang menjadi daya pengingat konsumen dengan simbol-simbol yang terdapat pada produk tersebut. Ikon merupakan lambang yang mempunyai kemiripan rupa, dan lambang tersebut tidak sulit untuk dikenali pemakainya. Di dalam ikon hubungan antara representamen dan obyeknya terwujud dalam kesamaan kualitas. Model ikonik merupakan penyajian tiruan fisik seperti tampak aslinya dengan skala yang lebih kecil. Model ikonik mudah diamati, dibentuk dan dijelaskan, tetapi sulit untuk dimanipulasi dan tidak berguna untuk peramalan. Merek ikonik merupakan merek yang dimiliki konsumen. Melalui

<https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs>

pemahaman dan pengalaman tertentu dengan merek yang spesifik, konsumen merasa sangat dekat dengan merek produk tersebut dan bahkan merasa bahwa merek tersebut telah menjadi bagian dari dirinya. (Ahmad Hanfan; 2017).

- Holt (2004) menyatakan ada empat elemen kunci untuk menciptakan merek ikonik yaitu:
- Kinerja produk setidaknya harus diterima, sebaiknya dengan memiliki kualitas baik.
 - Sebuah cerita budaya yang bermakna dibuat oleh orang. Ini harus dilihat sebagai sesuatu yang sah dan dihormati konsumen untuk cerita yang diterima.
 - Beberapa jenis ketidaksesuaian antara ideologi yang berlaku dan tersembunyi muncul dalam masyarakat. Dengan kata lain terdapat perbedaan bagaimana cara konsumen mengkonsumsi dan bagaimana mereka memiliki harapan.
 - Secara aktif terlibat dalam proses pembuatan mitos, memastikan merek mempertahankan posisinya sebagai ikon.

Produk Dalam Islam

Secara eksplisit produk yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunah nabi adalah bangkai, daging babi, darah hewan, minuman beralkohol, perjudian, prostitusi dan penggunaan bunga dalam praktik keuangan dan perbankan. Dalam perspektif IM produk harus memenuhi ketentuan halal, tidak menyebabkan pikiran kotor atau rusak, tidak mengganggu, tidak mengandung unsur riba dan maysir, bermoral, produk harus dalam kepemilikan yang sah, produk harus diserahkan dengan jelas karena penjualan produk fiktif tidak dapat dibenarkan (contoh penjualan ikan di sungai) dan produk harus tepat secara kuantitas dan kualitasnya (Ishak dan Abdullah, 2012; Abuznaid, 2012; Rivai, 2012 dalam bukunya Nur Asnawi dkk;2017). Sementara Bahari; 2012 dalam bukunya Nur Asnawi dkk;2017 menekankan produk yang sesuai dengan Islam adalah produk yang memenuhi karakteristik realistik (hasil kreativitas), humanistik (produk yang manusiawi, disampaikan dengan cara yang santun dan proporsional) dan transparansi (sesama pelaku bisnis memperoleh informasi yang lengkap tentang spesifikasi produk).

Produk merupakan barang yang dipasarkan untuk memenuhi permintaan konsumen. Fase yang harus dipahami oleh seorang marketer dalam membawa sebuah produk meliputi menentukan keunggulan produk (*core benefit*), produk yang sesungguhnya (*actual benefit*) dan mengembangkan produk dengan nilai tambahnya (*augmented product*). Pijakan yang digunakan oleh *marketer* Muslim dalam memasarkan produk tidak lepas dari Nabi Muhammad Saw. Sebagai sosok yang pandai dalam memasarkan produk sesuai dengan kriteria fase di atas serta sangat mengutamakan kualitas produk sebagaimana kriteria yang ditentukan oleh Allah yaitu produk yang halal sebagaimana Firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 yang artinya : “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”.

Abuznaid (2012) dalam bukunya Nur Asnawi (2017) berpendapat, proses produksi dalam Islam adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Hal ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan pandangan dunia Barat. Dalam Islam, proses produksi harus memenuhi ketentuan dalam Islam, yaitu prinsip sah menurut hukum Islam, kesucian, benar adanya, dapat di-*delivery*-kan, dan ditentukan secara tepat. Terkait dengan prinsip tersebut maka produk yang dipasarkan harus memenuhi ketentuan :

- Halal, tidak menyebabkan kerusakan pikiran dalam bentuk apa pun, tidak menyebabkan gangguan pada masyarakat (imoralitas).
- Produk harus dalam kepemilikan sebenarnya atau di bawah kekuasaan pemilik.
- Produk harus diserahkan karena penjualan produk tidak berlaku jika tidak dapat ditunjukkan secara jelas, misalnya penjualan ikan di sungai.
- Objek yang dijual harus dapat ditentukan secara tepat kuantitas dan kualitasnya.

Menurut Hendy Mustiko Aji (2018), produk tidak hanya sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, tetapi juga harus dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat dan tidak merusak kehidupan sosial masyarakat. Pada dasarnya secara umum produk yang dianjurkan untuk dijual adalah produk yang halal atau tidak haram.

METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam bukunya Moleong (2012:4) mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Denzim dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2012:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian kualitatif Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti menggunakan metode deskriptif karena peneliti ingin menggambarkan subjek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Sebagaimana pendapat Nawawi (1997:63), metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validitas terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Sugiyono (2016:372-372). Instrumen kunci dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono;2016;373).

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2006 :157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Mengacu pada pendapat ini, maka penelitian ini mengutamakan sumber data berupa kata-kata dan tindakan dari para informan yang diwawancarai. Penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, dimana jumlah informan tidak ditentukan terlebih dahulu. Pengumpulan data baru akan dihentikan manakala data yang diperoleh sampai pada tahap “*redundancy*” (data telah jenuh).

Kata-kata yang digunakan paling tidak harus didasarkan pada hasil observasi, hasil wawancara, atau dokumen. Secara formal, informasi yang dikumpulkan tidak langsung dapat dianalisis, karena terlebih dahulu harus melalui proses tertentu; data mentah dari catatan lapangan merupakan teka teki yang tidak dapat mudah dipahami oleh sembarangan orang selain peneliti. (Norman K. Denzim dkk, 2000).

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah pelaku UMKM Aloe vera kota Pontianak yang memberikan informasi tentang sekitar Produk Aloe vera. Sedangkan untuk sumber sekunder adalah diperoleh dari dokumen seperti brosur, foto-foto yang berkaitan dengan usaha yang ditekuni oleh pelaku UMKM Aloe vera.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. (Sugiyono;2016;376). Untuk melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, pengamatan dan dokumentasi.

<https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs>

Analisis data kualitatif, menurut Sugiyono (2014:245), adalah analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Untuk menganalisis data peneliti melakukan kegiatan analisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk memilah data dan memusatkan perhatian peneliti pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, dan cerita-cerita apa yang berkembang. Reduksi data dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung (Miles dan Michael, 1992:16). Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan pada data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap para pengusaha UMKM Aloe vera di kota Pontianak sebagai subjek penelitian. Selanjutnya data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian Data (*Display Data*) diartikan sebagai perangkat informasi yang terorganisir, yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan atau pengambilan pendekatan dan merupakan bagian sekunder yang harus ada pada satu analisis (Harun Rasyid, 2000: 70).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyajikan data yang telah terkumpul dan sudah direduksi namun masih bersifat tentatif, sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan atau membantu menentukan hubungan satu sama lainnya.

3. Verifikasi (penarikan kesimpulan)

Verifikasi ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengklasifikasikan data yang mendukung penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang dirumuskan adalah kesimpulan yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam fokus penelitian berdasar pada data-data yang mendukung. Dan setelah data disajikan dalam bentuk laporan penelitian, dilakukan langkah selanjutnya berupa penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan pertanyaan yang menjadi fokus penelitian.

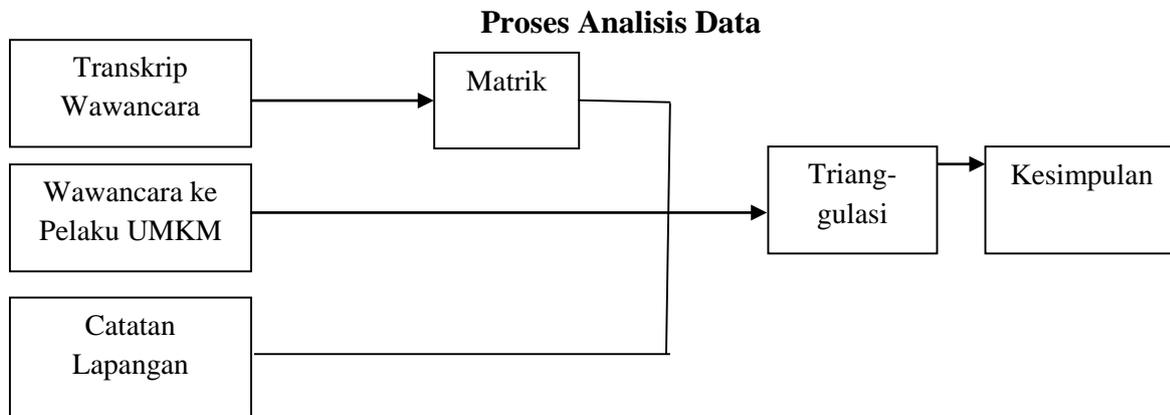
Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data adalah dengan melakukan triangulasi, adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2014:241). Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan dengan pihak UPT Agrobisnis Kota Pontianak dan konsumen. Selanjutnya dengan Kecukupan Referensi, Peneliti menggunakan data untuk mendukung hasil penelitian seperti transkrip wawancara dan foto-foto hasil observasi. Penelitian ini juga dilengkapi berbagai bahan rujukan teori yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian.

Dengan memperhatikan teknik analisis data dan teknik pemeriksaan keabsahan data maka proses analisis data dilakukan sebagai berikut :

I	a.	Pengumpulan data dari pelaku UMKM Aloe vera kota Pontianak.
	b.	Reduksi dilakukan dengan mendengarkan rekaman wawancara dan membuang bagian-bagian di luar konteks penelitian.
	c.	Data yang telah direduksi didisplay dalam bentuk transkrip wawancara
II.	Reduksi lanjutan dilakukan dengan cara menyimpulkan transkrip wawancara tiap informan menjadi matrik berdasarkan jawaban masing-masing informan pada tiap aspek	
III	Selanjutnya kesimpulan dari matrik perlu diverifikasikan. Untuk itu dilakukan:	
	a.	Pengumpulan data kepada pihak UPT Agrobisnis dan konsumen

	b.	Melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang dibuat berdasarkan jawaban pelaku UMKM Aloe vera kota Pontianak dengan melakukan triangulasi antara hasil matrik dengan jawaban Pihak UPT Agrobisnis dan konsumen.
--	----	--

Secara umum proses analisis data yang diuraikan di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Data Tentang Subjek

Pada bagian ini peneliti mengemukakan data penelitian, yaitu data tentang subjek/aktor, tempat dan aktivitas yang merupakan elemen pokok dalam penelitian kualitatif.

1. Sun Vera

I Sun Vera adalah salah satu merk dagang yang memfokuskan diri pada produk olahan lidah buaya yang di rintis oleh Ibu Sunani sejak tahun 2004. Beralamat di Jalan Budi Utomo Blok A6 No.3 Siantan Hulu Pontianak Utara Kalimantan Barat 78242. Nama I Sun Vera diambil dari nama pemilik usaha yaitu Ibu Sunani. Sun dan Vera yang diambil dari Aloe vera.

Saat ini I Sun Vera telah memproduksi aneka makanan dan minuman yang berbahan utama lidah buaya. Dan saat ini sudah menghasilkan 25 jenis produk olahan lidah buaya, seperti Agar-agar, kerupuk, dodol, teh, coklat, permen, stik, keripik, pilus, sirup, jus aloe vera, nastar, kue lapis, selai lidah buaya, mie instan, manisan, sabun, bakso, nasi bakar, snack, aneka kue kering dan kue basah hingga aneka kerajinan dari kulit lidah buaya. Dengan memperkerjakan 35 orang karyawan yang terdiri dari tim yang bertugas merebus lidah buaya mentah, bagian produksi, hingga pengemasan produk.

Bisnis makanan dan minuman dari lidah buaya yang dirintis ibu Sunani merupakan usaha kecil menengah terbesar di Kalimantan Barat dan juga terpilih menjadi produk OVOP (*One Village One Product*) dengan merk produk Sun Vera dan sudah ber Haki serta sudah mendapatkan sertifikat Halal dari MUI.

Produk Sun Vera tidak hanya dikenal di kota Pontianak saja namun tela dipasarkan di angkasa bersama mas kapai Garuda Indonesia. Produk ini sudah memiliki pelanggan tetap yaitu Hotel Mercure, Indomaret, Indo Grosir, Rumah Makan Ale-ale, Warung rawit, Angkatan Udara Pontianak, beberapa cafe di Pontianak.

Merk Sun Vera telah diterima dengan baik oleh masyarakat luas, beberapa penghargaan yang diraih antara lain juara I gugus kendali mutu tingkat Nasional, juara I UKM Inovatif tingkat nasional, juara II shidakarya tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Selain mendapat penghargaan sebagai petani teladan, penyuluh swadaya OVOP bintang

3, serta mendapat penghargaan dari beberapa sekolah dan Universitas. Dan saat ini Sun Vera menjadi tempat magang favorit bagi siswa dan mahasiswa.

Selain di jual di kota Pontianak dan Kuburaya, produk Sun Vera juga rutin dikirim ke Jakarta, Surabaya, Singkawang, Sekadau, Sintang, Sanggau, Melawi, Ketapang, Kuching (Malaysia), Brunai, Singapura dan Pakistan. Selain itu produk Sun Vera juga mengikuti beberapa pameran yang diadakan di Surabaya, Bandung, Manado, Lombok, Bali, dan Kuching.

Saat ini omzet Sun vera perbulan mencapai angka Rp. 100 juta Rupiah, dan ibu Sunani mempunyai mimpi untuk memiliki satu kawasan dimana dapat menjadi tempat belajar banyak orang tentang lidah buaya, bagaimana cara pengolahan serta kawasan wisata kuliner bagi pengunjung.

2. RotiKu Hidup

Rotiku Hidup adalah home industri yang bergerak dibidang kuliner yang didirikan oleh ibu Yuliana. Industri ini terletak di Jalan Imam Bonjol Gang Tanjung Sari No.32 Pontianak. Ibu Yuliana menjadikan tempat kediamannya sebagai tempat beragam olahan produk lidah buaya.

Nama Rotiku Hidup merupakan cerminan semangat dan motto sang pemilik usaha dan karyawan-karyawannya untuk lebih hidup dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan, dan merupakan semangat didikasi dalam sebuah pekerjaan jangka panjang. Sehingga semangat ini yang membuat produk olahan lidah buaya Rotiku Hidup bertahan hingga kini.

Produk yang dijual oleh home industri Rotiku Hidup adalah minuman lidah buaya, permen, dodol, kerupuk vegetarian, nastar, manisan, teh bubuk dan teh celup, coklat, jelly, onde-onde yang terbuat dari lidah buaya.

Untuk menjaga cita rasa produk olahannya, ibu Yuliana dibantu oleh 5 orang karyawan yang sesuai dengan keahliannya. Dikatakannya bahwa “tak mudah menjadikan lidah buaya yang miliki tekstur daging buahnya lembut banyak kandungan air menjadi cemilan yang kering.

Untuk bertahan dalam ketatnya persaingan usaha apalagi jenis usaha tersebut banyak juga diikuti oleh wirausaha lainnya, maka Rotiku Hidup mampu untuk melewati rintangan. Ibu Yuliana dalam mengeloh bisnisnya dapatv menjadikan produk olahan lidah buaya Rotiku Hidup semakin besar dan berkembang.

Dengan kegigihannya ibu Yuliana, ia mampu mendulang sukses dari bisnis kuliner ini. Dalam satu bulan Ibu Yuliana mendapatkan omzet puluhan juta rupiah, sebulan bisa untung sekitar Rp. 40 sampai Rp. 50 Juta rupiah. “produk kita memang lumayan banyak, jadi banyak pula pilihan untuk konsumen menikmati produk olahan lidah buaya”. Produk ini selain dipasarkan di kota Pontianak juga merambah ke pulau Jawa dan Batam.

Untuk mengemas produknya ibu Yuliana membutuhkan kemasan produk dalam mendukung kuliner yang digelutinya. Kemasan yang dipakai berasal dari Jakarta. Untuk beli dus biayanya sekitar Rp. 6 juta namun ongkos kirimnya mencapai Rp. 4 Juta rupiah.

Meski berskala UKM, produk lidah buaya Rotiku Hidup telah merambah pasar nasional. Dan home industri ini pernah mendapatkan piala Upakarti Indonesia tahun 2009 atas jasanya untuk memajukan industry kecil menengah di Kalimantan Barat yang bergerak dibidang cemilan dan menjadi oleh-oleh khas Pontianak.

Pembahasan

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang dapat dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, property, organisasi dan gagasan.

<https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs>

Strategi bauran produk adalah total keseluruhan dari daftar produk atau lini produk dari sebuah perusahaan yang ditawarkan kepada konsumen. Produsen dapat melakukan beberapa langkah dalam mempertahankan usahanya agar tetap bertahan dan berkembang sehingga dapat bersaing dengan usaha-usaha yang sudah ada baik berskala nasional maupun internasional.

Bauran produk adalah kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu. Lidah buaya merupakan tanaman yang dapat di produksi untuk dijadikan produk cemilan baik makanan dan minuman. Produk lidah buaya merupakan salah satu produk yang menjadi ikon kota Pontianak. Oleh karena itu pelaku UMKM lidah buaya di kota Pontianak melakukan strategi maupun upaya agar produk ini dapat digemari oleh masyarakat. Berikut ini akan peneliti bahas tentang strategi bauran produk ikonik usaha mikro kecil dan menengah di kota Pontianak adalah :

1. Strategi ikonik produk pada lini Lebar produk UMKM

Lini produk adalah kelompok produk di dalam kelas produk yang berhubungan erat karena mempunyai fungsi yang serupa, dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui gerai atau saluran yang sama, atau masuk dalam kisaran harga tertentu. Sedangkan lini Lebar produk adalah Bauran produk mengacu pada berapa banyak lini produk berbeda yang dijual di perusahaan. Lebar bauran produk (*The Width of Product Mix*) menunjukkan berapa banyak lini produk perusahaan.

Dalam menganalisa lini produknya, perusahaan memerlukan 2 informasi penting yaitu: a. Tingkat penjualan dan keuntungan setiap produk dalam lini produk. dan b. Profil dasar lini produk, dimana perusahaan harus menganalisis bagaimana penempatan lini produknya terhadap lini produk pesaing.

Hasil dari wawancara dan observasi dapat dipaparkan bahwa baik I Sun Vera dan Rotiku Hidup memproduksi produk dengan bahan lidah buaya. Ke dua UMKM ini telah melakukan strategi lini lebar produk dalam mengembangkan usahanya. Misalnya diawal usaha I Sun Vera memproduksi makanan seperti Agar-agar Aloe vera dan memproduksi minuman Jelly, begitu juga dengan Rotiku Hidup. Produk lidah buaya ini memberikan keuntungan, dikarenakan produk yang ditawarkan berkualitas dan dijadikan sebagai sebagai oleh-oleh bagi masyarakat baik di kota pontianak dan diluar kota.

I Sun Vera dan Rotiku Hidup merupakan dua merk produk aloe vera di kota Pontianak yang dikenal oleh masyarakat dan juga mendapatkan OVOP. Sehingga diharapkan dapat menjadi mitra tapi bukan saingan. Untuk keberlangsungan produk setiap merk dapat melakukan kreativitas dan inovasi. Sehingga masyarakat lebih tertarik dan membeli kembali produk dan direkomendasikan konsumen kepada konsumen lainnya. pengembangan produk unggulan melalui pendekatan OVOP merupakan salah satu upaya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Merek memberikan beberapa manfaat bagi penjual seperti I Sun Vera dan Rotiku Hidup :yaitu (1) Merek memudahkan penjual memproses pesanan dan menelusuri masalah.(2) Nama merek dan tanda merek penjualan memberikan perlindungan hukum atas ciri-ciri produk yang unik. (3) Merek memberikan kesempatan kepada penjual untuk menarik pelanggan yang setia dan menguntungkan.(4) Merek membantu penjual melakukan segmentasi pasar.dan (5) Merek yang kuat membantu membangun citra perusahaan, memudahkan perusahaan meluncurkan merek-merek yang baru yang mudah diterima oleh para distributor dan pelanggan.

2. Strategi ikonik produk pada lini Panjang produk UMKM.

Kalau yang tadi menambah lini produk baru, berbeda dengan yang ini. Maksud dari dimensi panjang adalah perusahaan menambah jumlah produk dalam bauran yang artinya masih dalam satu lini.

Salah satu masalah yang dihadapi perusahaan dalam membuat keputusan mengenai lini produk, dapat dikatakan terlalu pendek bila ternyata perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya dengan menambah item, sebaliknya lini produk dapat dikatakan terlalu panjang, bila perusahaan dapat meningkatkan hanya dengan mengurangi jumlah item produknya. Dapat diperjelas bahwa lini panjang produk adalah jumlah unit produk dalam bauran produknya (jumlah seluruh mereknya).

Tujuan perusahaan dalam hal ini adalah untuk mempengaruhi panjang lini produk. Lini produk cenderung makin memanjang lama-kelamaan. Kelebihan kapasitas produksi menimbulkan tekanan bagi manajer lini produk untuk mengembangkan jenis-jenis produk baru. Untuk keduanya perusahaan ini tetap menggunakan nama merk ini yaitu I Sun Vera dan Rotiku Hidup dalam produknya. Perusahaan dapat mengurangi panjang lini produknya dengan: (1) Merentang lini (Line Stretching). Merentang lini adalah usaha untuk memperpanjang lini produk. Saat ini keputusan merentang lini produk dapat dilakukan dengan merentang kebawah, merentang keatas dan merentang kedua arah. (2) Mengisi Lini (Line Filling). Mengisi Lini adalah usaha untuk memperpanjang lini dengan menambah produk dalam segmen yang sama. (3) Memoderenisasi Lini Produk. Walaupun panjangnya sudah tepat lini produk tersebut mungkin harus dimoderenisasi, misalkan produk perusahaan terlihat kuno sehingga kalah bersaing dengan produk pesaing yang lebih modern. (4) Menonjolkan keistimewaan lini produk. Perusahaan umumnya memilih satu atau beberapa jenis produk yaitu memberi ciri pada lini tersebut. Dan (5) Pemangkasan atau mengurangi lini produk. Perusahaan membuang jenis produk yang sudah tidak menguntungkan lagi.

Jika dilihat dari tujuan lini panjang produk pada kedua merek produk lidah buaya tersebut keduanya melakukan modernisasi lini produk, dan menonjolkan keistimewaan produk dikarenakan setiap produk memiliki keistimewaan baik berdasarkan selera masyarakat saat ini.

3. Strategi ikonik produk pada lini Kedalaman produk UMKM

Kedalaman bauran produk (*The Depth of Product Mix*) menunjukkan berapa banyak barang yang berbeda yang ditawarkan tiap produk dalam lini. Misalkan: ukuran dan formulanya. Lini kedalaman produk diartikan juga sebagai bauran produk mengacu pada banyaknya varian yang ditawarkan masing-masing produk dalam lini.

Lini kedalaman produk pada kedua merk tersebut adalah dengan adanya variasi rasa dari produk lidah buaya, seperti rasa original, pandan, orange, strawberi untuk produk agar-agar. Strategi kedalaman produk yang sudah dilakukan oleh dua merk merupakan langkah yang bagus, dimana dapat melihat keinginan konsumen saat ini.

Selain varian rasa, varian harga dan kemasan juga menjadi sesuatu yang penting. Mulai dari harga yang murah, menengah dan mahal. Dari kemasan yang kecil, sedang dan besar. Dan semua itu tergantung dari kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk-produk yang memiliki kualitas baik akan melakukan varian rasa ditengah persaingan agar tidak etdi kejenuhan. Dengan melakukan strategi kedaaman lini produk dapat meningkatkan volume penjualan dan keuntungan.

4. Strategi ikonik produk pada lini Konsistensi pada UMKM

Konsistensi bauran produk mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam hal penggunaan akhir, persyaratan produksi, saluran distribusi dan lain-lain. Baik I Sun Vera dan Rotiku Hidup sangat konsisten dalam menjalankan usahanya ini. Semua bahan baku berasal dari tanaman lidah buaya.

Sedangkan untuk saluran distribusi konsumen dapat langsung datang ke lokasi dimana produk ini di jual. Selain itu saluran distribusi yang lain juga dijalankan seperti harus mengirim pesanan pelanggan langsung yang berada di luar kota.

Keempat dimensi bauran produk membantu perusahaan dalam mendefinisikan strategi produk perusahaan, dimana perusahaan dapat memperluas bisnisnya dalam empat cara, perusahaan dapat menambah lini produk, dengan cara yaitu: melebarkan bauran produknya, perusahaan dapat memperpanjang tiap lini produk, perusahaan dapat menambah variasi produk dan memperdalam bauran produk.

Dengan melakukan strategi bauran produk dengan pendekatan empat dimensi tersebut diharapkan UMKM Aloe vera lebih dapat berkembang dengan skala internasional atau mendunia. Dengan penciptaan produk-produk yang lebih bervariasi lagi berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Sebuah produk menjadi Produk khas suatu daerah atau ikonik merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dipikirkan. Agar tidak menghilang ditelan jaman. Seperti teori daur hidup produk mengerti dan memahami konsep Siklus Hidup Produk atau *Product Life Cycle* ini merupakan suatu hal yang penting bagi setiap produsen untuk memproduksi dan memasarkan produknya. Pada dasarnya, Siklus Hidup Produk adalah tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk mulai dari diperkenalkannya kepada pasar (market) hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Pada umumnya, Siklus Hidup Produk atau *Product Life Cycle* memiliki 4 Tahapan yaitu Perkenalan (Introduction), Perkembangan (Growth), Kedewasaan (Maturity), Penurunan (Decline).

Untuk itulah pentingnya melakukan upaya keberlangsungan produk melalui pengembangan teknologi dan inovasi dalam menghadapi persaingan usaha. Seperti melakukan perbaikan. Dan strategi yang dapat dilakukan adalah dengan Periklanan, Mencoba untuk menambah pengguna baru dan berusaha mengingatkan pengguna lama. Penambahan Nilai (Adding Value), Menambahkan fitur baru pada produk saat ini. Menjelajahi pasar-pasar baru, Mencoba menjual produk keluar negeri. Dan Memperbarui kemasan, Mengganti kemasan pada produk dengan warna yang lebih cerah dan segar.

KESIMPULAN

1. Strategi ikonik produk pada lini Lebar

I Sun Vera dan Rotiku Hidup memproduksi produk dengan bahan lidah buaya. Kedua UMKM ini telah melakukan strategi lini lebar produk dalam mengembangkan usahanya. Misalnya diawal usaha I Sun Vera memproduksi makanan seperti Agar-agar Aloe vera dan memproduksi minuman Jelly, begitu juga dengan Rotiku Hidup.

2. Strategi ikonik produk pada lini Panjang produk

Kedua UMKM ini tetap menggunakan merk I Sun Vera dan Rotiku Hidup dalam produknya. Dan kedua merk produk lidah buaya tersebut keduanya melakukan modernisasi lini produk, dan menonjolkan keistimewaan produk dikarenakan setiap produk memiliki keistimewaan baik berdasarkan selera masyarakat saat ini.

3. Strategi ikonik produk pada lini Kedalaman produk

Lini kedalaman produk pada kedua merk tersebut adalah dengan adanya variasi rasa dari produk lidah buaya, seperti rasa original, pandan, orange, strawberi untuk produk agar-agar. Strategi kedalaman produk yang sudah dilakukan oleh dua merk merupakan langkah yang bagus, dimana dapat melihat keinginan konsumen saat ini.

4. Strategi ikonik produk pada lini Konsistensi

I Sun Vera dan Rotiku Hidup sangat konsisten dalam menjalankan usahanya ini. Semua bahan baku berasal dari tanaman lidah buaya.

Daftar Pustaka

Assauri, Sofjan, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 1 Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo

- Azizi, S., S. A. Movahed, and M. H. Khah. 2009. The effect of marketing strategy and marketing capability on business performance. Case study: Iran's medical equipment sector. *Journal of Medical Marketing*
- Banerjee, S., & Soberman, D. A. (2013). Product development capability and marketing strategy for new durable products. *Intern. J. of Research in Marketing*,
- Boyd, Harper w, dkk. Manajemen Pemasaran (suatu pendekatan strategis dan orientasi global edisi ke dua Jilid Erlangga Jakarta 2000.
- Ferdinand, Augusti Tae and Fitriani, Lili Karmela (2015)' " Acculturative Iconic product Attractiveness and Marketing performance", *Journal of Global Strategic Management*, Vol. 9, No. 2,
- Hanfan, Ahmad, *Membangun Keunggulan Produk Ikonik Untuk Meningkatkan Kinerja*
- Hendy Mustiko Aji, Manajemen Pemasaran Syariah Teori dan Praktik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2019
- Holt, D. B. (2004). How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding, United States: Harvard University Press, Harvard MA.
- <https://pertanian.pontianakkota.go.id/produk-unggulan-detil/4-lidah-buaya.html>
- Hudayah, Syarifah, Indriastuti Herning, *Keunggulan Produk Iconic Isolating Sarung Samarinda*, Vol. 5, No. 2, 2017, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Universitas Merdeka Malang.Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kotler, philip. (2000). Manajemen pemasaran. Jakarta: Prenhalindo.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Narver, J. C., & Slater, S. F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. *Journal of Marketing*, 54(4), 20-35. <https://doi.org/10.2307/1251757>
- Norman K. Denzim dkk, *HandBook of Qualitative Reseach*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Nur Asnawi dkk, *Pemasaran Syariah Teori, Filosofi & Isu-isu Kontemporer*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Oskar Raja dkk, *Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM*, Penerbit LA Press, Jakarta, 2010
- Pemasaran UMKM*, DeReMa Jurnal Manajemen, Vol. 12 No. 2, September 2017.
- Hasan, Ali (2008) *Marketing*. Yogyakarta, Medpress.Persada, Jakarta, 2011.
- Pomering, A. (2017). Marketing for sustainability : Extending the conceptualisation of the marketing mix to drive value for individuals and society at large. *Australasian MarketingJournal (AMJ)*, 25(2), Publishing, Yogyakarta, 2008.
- Rangkuti, Freddy, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, PT Gramedia Pustaka
- Rosli, M.M. and Sidek, S. (2013), "The Impact of Innovation on the Performance of Small and Medium Manufacturing Enterprises: Evidence from Malaysia", *Journal of Innovation Management in Small & Medium Enterprise*, Vol. 2013

Senja Nilasari, *Manajemen Strategi*, Dunia Cerdas, Jakarta 2014

Triton PB, *Marketing Strategic Meningkatkan Pangsa Pasar & Daya Saing*, Tugu Utama, Jakarta, 2013.

ANALISIS KINERJA BANK UMUM SYARIAH DENGAN MENGUNAKAN PENDEKATAN CAMEL DAN PENDEKATAN ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX TAHUN 2013-2018

Rista Yolanda¹; Verdianti^{2*}; Oscar Ryanandi Andjioe³

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak

³Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak

ABSTRACT

The method used in this research is descriptive method using quantitative. The data source used is secondary data. The performance of Islamic banks with the standard approach of financial ratios 2013-2018 showed "Very Healthy" with an average of 18%. Then when viewed from the NPF showed the predicate "Healthy" with an average of 3.5%. The REO which shows the predicate that is "Very Healthy" with an average of 72%. The ROA shows the predicate that is "Fairly Healthy" with an average of 0.5% and the last from STM which shows the predicate "Healthy" with an average of 24%. The performance of Islamic Commercial Banks shows "Good" from the PSR with an average of 46 %. then if seen from the ZPR value shows the predicate "Not Good" with an average of 0.02% and then seen again from the value of the EDR y which shows a predicate that is "Very Good" with an average of 130% whereas when viewed from the DEWR value indicates a predicate that is "Not Good" with an average of 5% and lastly seen from the value of the IIC it shows an "Very Good" with an average of average of 100%. The concept of Baitul Mal Village itself has characteristics similar to BMT (Baitul Mal Wat Tamlik), the difference in the source of funds derived from the government and the object of the user funds specifically aimed at the local village community.

ARTICLE INFO

Article History:

Received October 14th
2020

Received in revised from
October 28th 2020

Accepted October 30th
2020

Keywords:

Financial Performance,
CAMEL, Islamicity
Performance Index

* Corresponding Author ; E-mail address: verdianti@iainptk.ac.id

Pendahuluan

Perbankan syariah pada posisi juni 2018 menunjukkan perkembangan yang positif dan intermediasi yang membaik terlihat dari indikator kinerja yang terlihat adanya peningkatan sampai dengan per Juni 2018. Statistik perbankan syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sampai dengan Juni 2018, nilai aset Bank Syariah tumbuh menjadi 444,43 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh menjadi 348,38 triliun. Sedangkan pembiayaan yang disalurkan dari dana pihak ketiga juga tumbuh menjadi 303,54 triliun yang terlihat pada gambar 1. di bawah ini.

Gambar 1. Pertumbuhan Aset, Pembiayaan dan DPK Perbankan Syariah, 2017-2018



Sumber: Snapshot perbankan syariah, 2018

Meskipun terlihat pada gambar diatas terlihat adanya perkembangan yang signifikan namun jika dilihat dari laju pertumbuhan total Aset, DPK dan pembiayaan perbankan syariah menunjukkan perkembangan dari tahun sebelumnya maka laju pertumbuhan aset, DPK dan pembiayaan bisa dikatakan mulai mengalami perlambatan terlihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 2. Pertumbuhan Aset, DPK dan Pembiayaan



Sumber: *Snapshot* Perbankan Syariah, 2018

Berdasarkan grafik diatas terlihat laju pertumbuhan Aset, DPK dan Pembiayaan perbankan cenderung mengalami perlambatan disebabkan oleh pertumbuhan share aset yang turun hingga mencapai 5,70% per juni 2018. Kondisi ini menunjukkan akan ada masalah dalam tingkat profitabilitas perbankan syariah.

Kemampuan Bank Umum Syariah dalam mencetak laba masih mini. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per juni 2018 menunjukkan, rasio pendapatan bersih yang diperoleh dari total aset alias return on asset (ROA) masih rendah. Rasio pendapatan di banding aset Bank Umum Syariah (BUS) 1,37% angka ini dibawah ROA Bank Konvensional di kisaran level 2,43%. Hal ini menunjukkan bahwa ROA merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja keuangan.

Menurut khalifaturofiah (2016), kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang merupakan gambaran kondisi keuangan bank syariah pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana dan penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan

dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Penilaian kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan metode rasio keuangan (Oetari 2016). Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007, salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan perbankan menggunakan pendekatan CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning dan Liquidity). Pendekatan ini merupakan alat ukur resmi yang telah ditetapkan Bank Indonesia untuk mengukur kesehatan bank.

Analisis CAMEL yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank tujuannya untuk mengetahui kondisi bank yang sesungguhnya apakah sehat, kurang sehat mungkin tidak sehat (Kasmir, 2012). Tabel 1., menjelaskan perkembangan rasio kinerja keuangan Bank Syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2014 hingga 2018.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa kinerja keuangan suatu bank dapat dilihat dengan beberapa aspek penilaian dalam analisis CAMEL. Menurut Tristingtyas dan Mutaher (2013) CAMEL adalah aspek yang paling banyak mempengaruhi terhadap kondisi keuangan bank yang berpengaruh pula terhadap tingkat kesehatan bank yang terdiri dari indikator Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Ratio (NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Financing To Deposit Ratio (FDR).

Selain itu, Tabel 1 juga menunjukkan nilai CAR mengalami peningkatan dari tahun ketahun meskipun di tahun 2015 sempat mengalami penurunan. Tahun 2014 CAR Perbankan sebesar 15,74% sedangkan per juni 2018 menjadi 20,59% jumlah tersebut memiliki kinerja yang baik, karena minimal CAR perbankan harus berkisar lebih dari 8%, maka bank tersebut dapat dikatakan solvable.

Kemudian Tingkat profitabilitas bank syariah yang diukur dengan ROA juga mengalami peningkatan dari tahun ketahun dimana tahun 2014 bank syariah menikmati rasio keuntungan sebesar 0,41% meningkat pada per juni 2018 menjadi 1,37%, hal ini menunjukkan bank syariah mampu memperoleh keuntungan sebesar 1,37% dari total asset yang dimilikinya. Selain itu rasio kredit macet perbankan juga mengalami penurunan dimana tahun 2014 sebesar 4,95% menjadi 3,83% pada juni 2018 rasio ini menunjukkan kinerja yang semakin baik. Semakin kecil NPF maka semakin kecil pula resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank, sehingga akan memperbaiki tingkat ROA bank. Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah kurang dari 5%.

Tabel 1. Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah, 2014-2018

No	Rasio	2014	2015	2016	2017	Juni 2018
1.	Capital Adequacy Ratio (CAR)	15,74	15,02	16,63	17,91	20,59
2.	Return on Asset (ROA)	0,41	0,43	0,63	0,63	1,37
3.	Non Performing Financing (NPF)	4,95	4,84	4,42	4,76	3,83
4.	Rasio Efisiensi (BOPO)	96,97	97,01	96,22	94,91	88,75
5	Financing to deposit ratio (FDR)	86,66	88,03	85,99	79,61	78,68

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK, 2018

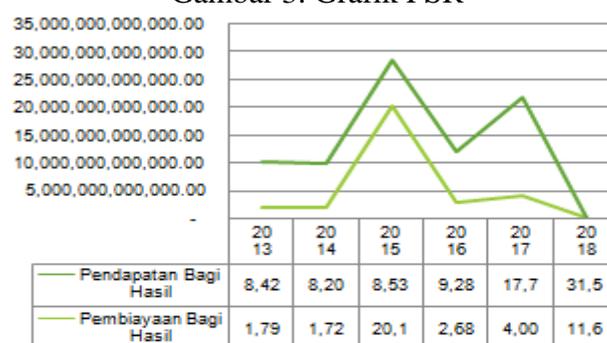
Selain itu perbankan syariah juga menikmati tingkat efisiensi yang semakin meningkat setiap tahunnya yang dilihat dari rasio BOPO dimana tahun 2014 96,97% turun pada juni 2018 menjadi 88,75% dimana semakin rendah BOPO maka semakin efisien perbankan dalam beroperasi. Menurut SE. Intern BI (2004) semakin tinggi BOPO maka semakin kecil ROA, yang berarti mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya, sehingga kinerja keuangan bank menurun.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Semakin tinggi FDR maka semakin kecil ROA, yang berarti maka semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar, sehingga kinerja keuangan semakin menurun. Namun jika dilihat dari FDR mengalami peningkatan pada tahun 2015, untuk ditahun 2016, 2017, dan 2018 mengalami penurunan. Tahun 2015 FDR Perbankan sebesar 88,03 menurun menjadi 78,68%, pada juni 2018. Penurunan ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mengalami kesulitan untuk simpanan nasabah dengan jumlah pembiayaan yang ada.

Kinerja bank umum syariah tidak hanya bisa dilihat dari rasio keuangan tetapi juga bisa di lihat dari Islamic nya.

Hameed dkk (2004) kinerja keuangan dilihat dari prinsip islam ditinjau dari prinsip keadilan, kehalalan, ketaatan dan pensucian dari suatu kegiatan usahanya. Berikut ini adalah grafik perkembangan kinerja Islamic performance index

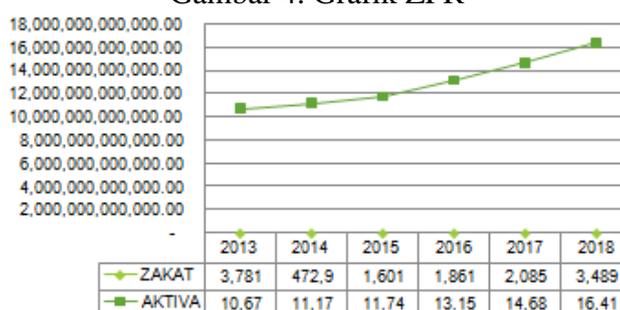
Gambar 3. Grafik PSR



Sumber: Hasil olah data

Hameed dkk (2004) mengatakan Semakin tinggi pembiayaan bagi hasil maka pendapatan bagi hasilnya semakin tinggi. Data diatas berbanding lurus dengan teori yang ada dimana pendapatan bagi hasil mengalami fluktuatif dan pembiayaan bagi hasil juga mengalami fluktuatif.

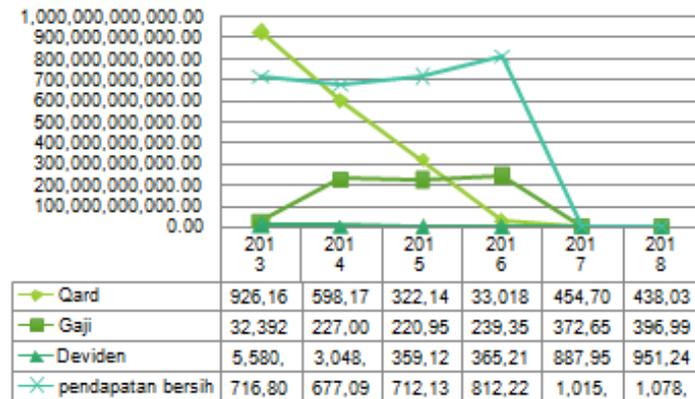
Gambar 4. Grafik ZPR



Sumber: Hasil olah data

Hameed dkk (2004) mengatakan jika nilai asset tinggi maka pendistribusian penyaluran zakat semakin meningkat. Data diatas berbanding terbalik dengan teori yang ada dimana nilai aktiva mengalami peningkatan sedangkan nilai zakat cenderung tetap.

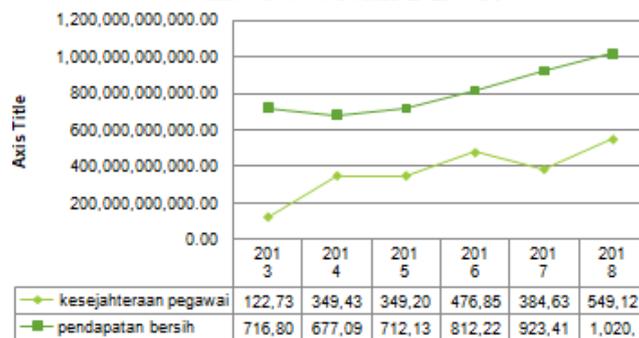
Gambar 5. Grafik EDR



Sumber: Hasil olah data

Fatmasari (2018) mengatakan Semakin tinggi tingkat pendapatan bersih yang diperoleh bank syariah maka semakin tinggi pendistribusian donasi, gaji dan deviden terhadap stakeholder Data diatas menunjukkan kondisi berbanding terbalik dengan teori yang ada, yang mana pendapatan bersih cenderung menurun, sedangkan nilai qard mengalami penurunan dan nilai gaji mengalami fluktuatif serta nilai deviden mengalami fluktuatif.

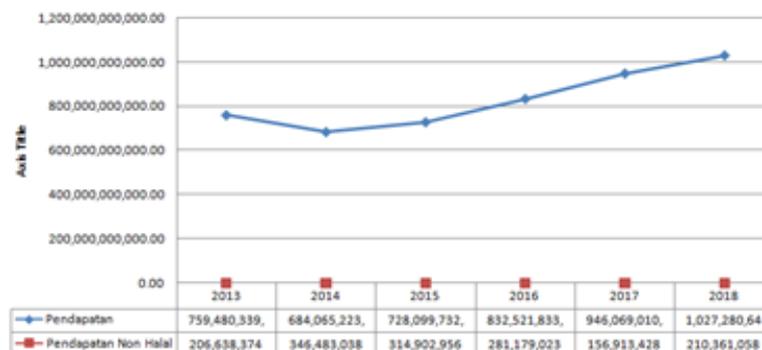
Gambar 6. Grafik DEWR



Sumber: Hasil olah data

Suwardjono (2014) Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi kesejahteraan pegawai. Data diatas berbanding terbalik dengan teori yang ada dimana pendapatan bersihnya mengalaih peningkatan sedangkan kesejahteraan pegawainya mengalami fluktuatif.

Gambar 7. Grafik IIC



Sumber: Hasil olah data

Falikhatusun (2012) mengatakan Semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi tingkat ketaatan bank terhadap prinsip syariah. Data diatas berbanding lurus dengan teori yang ada dimana pendapatan halalnya mengalami peningkatan sedangkan tingkat pendapatan halalnya cenderung tetap dengan nilai di bawah 0,01%. Oleh karena itu mengukur analisis kinerja saja tidak cukup, perlu penilaian aspek yang bernilai Islam dan sesuai prinsip Islam di masing-masing bank umum syariah.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian studi kasus. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik purposive sampling mengolah data menggunakan *Microsoft Excel*. Setelah dilakukan pengolahan data, maka dilakukan analisis data.

Pembahasan

a. Kinerja keuangan berdasarkan CAMEL Periode 2013-2018

Tabel 2. Menunjukkan hasil perhitungan nilai rasio CAMEL, maka dapat disajikan hasil penilaian kinerja keuangan dengan rasio CAMEL yang dapat dilihat bahwa dari enam tahun terakhir yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 pada Bank Umum Syariah berada pada predikat sehat.

Tabel 2. Kinerja Keuangan Berdasarkan Standar Rasio Keuangan, 2013-2018

No	Nama	KPMM	NPF	REO	ROA	STM
1	Muamalat	14%	4%	91%	0,3%	24%
2	<u>Bank Syariah Mandiri</u>	16%	5%	79%	0,6%	36%
3	<u>BNI Syariah</u>	18%	2%	26%	1,4%	15%
4	<u>BRI Syariah</u>	19%	5%	74%	0,6%	26%
5	<u>Bank Mega Syariah</u>	20%	3%	91%	1,3%	23%
6	<u>Bank Panin Syariah</u>	20%	2%	72%	-1,2%	22%
	Rata-rata	18%	3,5%	72%	0,5%	24%
	Peringkat	1	2	1	3	2

Sumber: Hasil olah data peneliti tahun 2019

Dari tahun 2013 hingga tahun 2018, dari Aspek Permodalan angka rasio KPMM menunjukkan bahwa Bank Mega Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah yang memperoleh nilai KPMM tertinggi yaitu sebesar 20%, kemudian di susul oleh Bank BRI Syariah yang memperoleh nilai sebesar 19% lalu Bank BNI Syariah yang memperoleh nilai sebesar 18% dan BSM yang memperoleh nilai sebesar 16%. Sedangkan Bank Muamalat memperoleh nilai KPMM terendah yaitu sebesar 14%. Jika dilihat kinerja Bank Muamalat memperoleh nilai KPMM terendah tetapi kinerja Bank Muamalat masih mendapatkan predikat "Sangat Sehat".

Peningkatan nilai CAR (Capital Adequacy Ratio) ini menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah modal dan peningkatan jumlah aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) pada Bank Umum Syariah. Dengan adanya peningkatan yang cukup besar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, maka dapat dikatakan bank tersebut berhasil mempertahankan dan meningkatkan nilai rasio CAR. Hal ini dapat tercapai karena bank sangat memperhatikan faktor faktor eksternal dan semoga kedepannya bank dapat terus mempertahankannya.

Dari aspek Asset Quality, nilai rasio NPF dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri dan bank BRI Syariah yang memperoleh nilai NPF

tertinggi yaitu sebesar 5%, kemudian di susul oleh Bank Muamalat Indonesia yang memperoleh nilai sebesar 4% lalu disusul lagi oleh Bank Mega Syariah yang memperoleh nilai sebesar 3%. Sedangkan Bank BNI Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah memperoleh nilai NPF terendah yaitu sebesar 2%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah mendapatkan predikat “Cukup Sehat”. Sedangkan Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah mendapatkan predikat “Sehat”.

Nilai NPF ini mengalami fluktuasi dikarenakan adanya peningkatan pada jumlah pembiayaan bermasalah dan peningkatan total pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Dengan adanya penurunan yang cukup besar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, maka dapat dikatakan bank berhasil mempertahankan dan meningkatkan nilai rasio NPF. Hal ini dapat tercapai karena bank sangat memperhatikan pembiayaan bermasalah.

Dari aspek Management, nilai rasio REO dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah yang memperoleh nilai REO tertinggi yaitu sebesar 91%, kemudian di susul oleh Bank Syariah Mandiri yang memperoleh nilai sebesar 79% lalu Bank BRI Syariah yang memperoleh nilai sebesar 74% dan Bank Panin Dubai Syariah yang memperoleh nilai sebesar 72%. Sedangkan Bank BNI Syariah memperoleh nilai REO terendah yaitu sebesar 26%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah mendapatkan predikat “Tidak Sehat”. Sedangkan Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Panin Dubai Syariah dan Bank BNI Syariah mendapatkan predikat “Sangat Sehat”.

Nilai REO ini mengalami fluktuasi dikarenakan adanya peningkatan pada beban operasional dan peningkatan pendapatan operasional Bank Umum Syariah. Dengan adanya penurunan yang cukup besar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, maka dapat dikatakan bank berhasil mempertahankan dan meningkatkan nilai rasio REO. itu berarti bahwa Bank berhasil mempertahankan REO pada tahun 2013 sampai tahun 2018. semakin besar biaya maka semakin kecil perolehan laba operasional Bank. Hal ini dapat tercapai karena Bank Umum Syariah sangat memperhatikan beban operasional.

Dari aspek Earning, nilai rasio ROA dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa Bank BNI Syariah memperoleh nilai ROA tertinggi yaitu sebesar 1,4%, kemudian disusul oleh Bank Mega Syariah yang memperoleh nilai sebesar 1,3% lalu Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah yang memperoleh nilai sebesar 0,6% dan terakhir Bank Muamalat yang memperoleh nilai sebesar 0,3%. Sedangkan Bank Panin Dubai Syariah memperoleh nilai ROA terendah yaitu sebesar -1,2%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Bank BNI Syariah dan Bank Mega Syariah mendapatkan predikat “Sehat”, sedangkan Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah mendapatkan predikat “Cukup Sehat” kemudian Bank Muamalat mendapatkan predikat “Kurang Sehat” dan terakhir Bank Panin Dubai Syariah mendapatkan predikat “tidak sehat”.

Nilai ROA ini mengalami fluktuasi dikarenakan adanya peningkatan pada laba sebelum pajak dan peningkatan rata-rata total aktiva Bank Umum Syariah.

Dengan terjadinya penurunan dari tahun 2013 s/d tahun 2018 maka dapat dikatakan bank belum berhasil mempertahankan dan meningkatkan nilai rasio ROA itu berarti bahwa Bank belum berhasil mempertahankan ROA pada tahun 2013 sampai tahun 2018. semakin besar laba sebelum pajak maka semakin kecil rata-rata total aktiva bank. Hal ini tercapai karena bank kurang memperhatikan rata-rata total aktiva.

Dari aspek Liquidity, nilai rasio STM dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri memperoleh nilai STM tertinggi yaitu sebesar 36%, kemudian disusul oleh Bank BRI Syariah yang memperoleh nilai sebesar 26% lalu Bank Muamalat yang memperoleh nilai sebesar 24% kemudian Bank Mega Syariah yang

memperoleh nilai sebesar 23% dan terakhir Bank Panin Dubai Syariah yang memperoleh nilai sebesar 22%. Sedangkan BNI syariah memperoleh nilai STM terendah yaitu sebesar 15%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah mendapatkan predikat “Sangat Sehat”, sedangkan Bank Muamalat, Bank Mega Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah mendapatkan predikat “Sehat” dan terakhir BNI Syariah mendapatkan predikat “cukup sehat”.

Nilai STM ini mengalami fluktuasi dikarenakan adanya peningkatan pada aktiva jangka pendek dan peningkatan kewajiban jangka pendek Bank Umum Syariah. Dengan terjadinya kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dan terjadi penurunan di tahun 2018 maka dapat dikatakan bank hampir berhasil mempertahankan dan meningkatkan nilai rasio STM. itu berarti bahwa Bank hampir berhasil mempertahankan STM pada tahun 2013 sampai tahun 2018. semakin besar aktiva jangka pendek maka semakin kewajiban jangka pendek bank. Hal ini tercapai karena bank lebih memperhatikan aktiva jangka pendek.

Hasil kinerja Bank Umum Syariah dengan menggunakan Standar Rasio Keuangan menunjukkan bahwa kinerja Bank Syariah dilihat dari Capital (KPMM) menunjukkan predikat “SANGAT SEHAT” kemudian jika dilihat dari Asset Quality (NPF) menunjukkan predikat yang “SEHAT” lalu dilihat lagi dari Management (REO) yang menunjukkan predikat yang “SANGAT SEHAT” sedangkan jika dilihat dari Earning (ROA) menunjukkan predikat yang “CUKUP SEHAT” dan terakhir dilihat dari Liquidity (STM) yang menunjukkan predikat “SEHAT”.

b. Kinerja keuangan berdasarkan Islamicity performance index Periode 2013-2018

Berdasarkan tabel 3 pada hasil perhitungan nilai rasio Islamicity Performance Index, maka dapat disajikan hasil penilaian kinerja keuangan dengan rasio Islamicity Performance Index yang dapat dilihat bahwa dari 5 tahun terakhir yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 pada Bank Umum Syariah berada pada predikat “Cukup Baik”.

Pada periode tahun 2013 hingga tahun 2018, dari Profit Sharing Ratio menunjukkan bahwa Bank Mega Syariah yang memperoleh nilai Profit Sharing Ratio tertinggi yaitu sebesar 82%. Kemudian disusul oleh Bank Panin Syariah yang memperoleh nilai sebesar 65% lalu Bank Muamalat yang memperoleh nilai sebesar 50% kemudian di susul oleh BRI Syariah yang memperoleh nilai Profit Sharing Ratio yaitu sebesar 31% dan terakhir ada Bank Syariah Mandiri mendapat nilai Profit Sharing Ratio yaitu sebesar 25%. Sedangkan BNI Syariah merupakan Bank Syariah yang memperoleh nilai profit sharing ratio terendah yaitu sebesar 20%, Dengan demikian dapat diketahui bahwa kinerja Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Muamalat mendapatkan predikat “Sangat Baik”. Sedangkan Bank BRI Syariah mendapatkan predikat “Cukup Baik”, terakhir Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah mendapatkan predikat “kurang Baik”.

Nilai PSR ini mengalami fluktuasi dikarenakan adanya peningkatan pada pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan peningkatan total pembiayaan Bank Umum Syariah. Dengan terjadinya kenaikan dari tahun 2013 s/d tahun 2018 kecuali ditahun 2015 terjadi penurunan maka dapat dikatakan bank hampir berhasil mempertahankan dan meningkatkan nilai rasio PSR, itu berarti bahwa Bank hampir berhasil mempertahankan PSR pada tahun 2013 sampai tahun 2018. semakin besar pembiayaan bagi hasil maka semakin kecil total pembiayaan bank. Hal ini tercapai karena bank lebih memperhatikan pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).

Jika dilihat pada Zakat Performance Ratio, nilai rasio ZPR dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa Bank Mega Syariah yang memperoleh nilai Zakat Performance Index tertinggi yaitu sebesar 0,04%., kemudian di susul oleh BNI Syariah dan BRI Syariah yang memperoleh nilai sebesar 0,03% dan Bank Syariah Mandiri yang memperoleh nilai sebesar 0,02%. Sedangkan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Panin Dubai Syariah

memperoleh nilai ZPR terendah yaitu sebesar 0,01%. Walaupun Bank Mega Syariah memperoleh nilai Zakat Performance Index paling tinggi tetapi kinerja Bank Mega Syariah mendapatkan predikat “Tidak Baik”.

Tabel 3. Kinerja keuangan berdasarkan Islamicity Performance Index, 2013-2018

No	Nama	PSR	ZPR	EDR	DEWR	IIC
No	Nama	50%	0,01%	78%	3%	100%
1	Muamalat	25%	0,02%	96%	4%	100%
2	Bank Syariah Mandiri	20%	0,03%	145%	5%	100%
3	BNI Syariah	31%	0,03%	186%	4%	100%
4	BRI Syariah	82%	0,04%	153%	6%	100%
5	Bank Mega Syariah	65%	0,01%	119%	7%	100%
6	Bank Panin Syariah	46%	0,02%	130%	5%	100%
	Rata-rata	2	5	1	5	1

Sumber: Hasil olah data peneliti tahun 2019

Nilai ZPR ini mengalami fluktuasi dikarenakan adanya peningkatan pada zakat dan peningkatan aktiva bersih. Dengan terjadinya penurunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 kecuali ditahun 2015 terjadi kenaikan maka dapat dikatakan bank belum berhasil mempertahankan dan meningkatkan nilai rasio ZPR. itu berarti bahwa Bank belum berhasil mempertahankan ZPR pada tahun 2013 sampai tahun 2018. semakin besar zakat maka semakin kecil aktiva bersih bank. Hal ini belum tercapai karena bank lebih memperhatikan aktiva bersihnya dari pada zakat.

Dari Equitable Distribution Ratio, nilai rasio EDR dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa BRI Syariah yang memperoleh nilai Equitable Distribution Ratio tertinggi yaitu sebesar 186%. Kemudian di susul oleh Bank Mega Syariah yang memperoleh nilai sebesar 153% lalu disusul lagi oleh BNI Syariah yang memperoleh nilai sebesar 145% dan Bank Panin Dubai Syariah yang memperoleh nilai sebesar 119% terakhir Bank Syariah Mandiri yang memperoleh nilai sebesar 96%. Sedangkan Bank Muamalat Indonesia memperoleh nilai EDR terendah yaitu sebesar 78%. Walaupun Bank Muamalat Indonesia memperoleh nilai Equitable Distribution Ratio paling rendah tetapi kinerja Bank Muamalat mendapatkan predikat “sangat Baik”.

Nilai EDR ini mengalami fluktuasi dikarenakan adanya peningkatan pada nilai qard, beban tenaga kerja, laba bersih, deviden dan peningkatan pendapatan, zakat, pajak Bank Umum Syariah. Dengan terjadinya kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 kecuali ditahun 2014 dan tahun 2015 terjadi penurunan maka dapat dikatakan bank hampir berhasil mempertahankan dan meningkatkan nilai rasio EDR. itu berarti bahwa Bank Umum Syariah hampir berhasil mempertahankan EDR pada tahun 2013 sampai tahun 2018. semakin besar nilai qard, beban tenaga kerja, laba bersih, deviden maka semakin kecil pendapatan, zakat, pajak bank. Hal ini tercapai karena bank lebih memperhatikan nilai qard, beban tenaga kerja, laba bersih, devidennya.

Dari Director-Employee Welfare, nilai rasio DEWR dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa Bank Panin Dubai syariah yang memperoleh nilai EDR tertinggi yaitu sebesar 7%. Kemudian di susul oleh Bank Mega Syariah yang memperoleh nilai sebesar

6% lalu disusul lagi oleh BNI Syariah yang memperoleh nilai sebesar 5% terakhir Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah yang memperoleh nilai sebesar 4%. Sedangkan Bank Muamalat Indonesia memperoleh nilai DEWR terendah yaitu sebesar 5%. Walaupun Bank Panin Dubai Syariah memperoleh nilai Director-Employee Welfare Ratio paling tinggi tetapi kinerja Bank Panin Dubai Syariah mendapatkan predikat “tidak Baik”.

Nilai DEWR ini mengalami fluktuasi dikarenakan adanya peningkatan pada nilai gaji direksi dan peningkatan gaji karyawan BUS. Dengan terjadinya kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 kecuali ditahun 2015 dan tahun 2018 terjadi penurunan maka dapat dikatakan bank hampir berhasil mempertahankan dan meningkatkan nilai rasio DEWR. itu berarti bahwa Bank hampir berhasil mempertahankan DEWR pada tahun 2013 sampai tahun 2018. semakin besar gaji direksi maka semakin kecil gaji karyawan bank. Hal ini tercapai karena bank lebih memperhatikan gaji direksi.

Dari Islamic income vs non islamic income, nilai rasio IIC dari tahun 2013 s/d tahun 2018 menunjukkan bahwa keenam Bank Syariah memperoleh nilai Islamic income vs non islamic income tertinggi yaitu sebesar 100%, sehingga keenam Bank Syariah mendapatkan predikat “sangat baik”.

nilai IIC ini tidak menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan pada jumlah pendapatan halal dan peningkatan jumlah pendapatan non halal pada Bank Umum Syariah. Dengan tidak adanya peningkatan dan penurunan dari tahun 2013 s/d tahun 2018, maka dapat dikatakan bank berhasil mempertahankan nilai rasio IIC. Hal ini dapat tercapai karena bank sangat memperhatikan pendapatannya dan semoga kedepannya bank dapat terus mempertahankannya.

Hasil kinerja Bank Umum Syariah menggunakan Islamicity Performance Index menunjukkan bahwa kinerja Bank Syariah dilihat dari Profit Sharing Ratio (PSR) menunjukkan predikat “Sehat” kemudian jika dilihat dari nilai ZPRnya menunjukkan predikat yang “Tidak Baik” lalu dilihat lagi dari nilai EDRnya yang menunjukkan predikat yang “Sangat Baik” sedangkan jika dilihat dari nilai DEWR menunjukkan predikat yang “Tidak Baik” dan terakhir dilihat dari nilai IICnya menunjukkan yang “Sangat Baik”.

Conclusion

Berdasarkan penjabaran dari hasil analisis kinerja bank umum syariah dengan menggunakan pendekatan standar rasio keuangan dan pendekatan islamicity performance index pada tahun 2013-2018, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis kinerja bank umum syariah dengan pendekatan standar rasio keuangan 2013-2018 menunjukkan kinerja yang dilihat dari Capital (KPMM) menunjukkan predikat “SANGAT SEHAT” bank yang mendapatkan predikat sangat sehat ini adalah Bank Mega Syariah dan Bank Panin Syariah kemudian jika dilihat dari Asset Quality (NPF) menunjukkan predikat yang “SEHAT” bank yang mendapatkan predikat sehat ini Bank BNI Syariah lalu dilihat lagi dari Management (REO) yang menunjukkan predikat yang “SANGAT SEHAT” bank yang mendapatkan predikat sangat sehat ini adalah bahwa Bank BNI Syariah sedangkan jika dilihat dari Earning (ROA) menunjukkan predikat yang “CUKUP SEHAT” bank yang mendapatkan predikat sangat cukup sehat ini adalah Bank BNI Syariah dan terakhir dilihat dari Liquidity (STM) yang menunjukkan predikat “SEHAT” bank yang mendapatkan predikat sangat sehat adalah Bank Syariah Mandiri. Predikat tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan bank Indonesia. Hal ini dapat mengindikasikan kondisi bank umum syariah sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2. Berdasarkan analisis kinerja bank umum syariah dengan pendekatan Islamicity Performance Index tahun 2013 s/d 2018 menunjukkan Hasil kinerja Bank Umum Syariah

dengan menggunakan Islamicity Performance Index menunjukkan bahwa kinerja Bank Syariah dilihat dari Profit Sharing Ratio (PSR) menunjukkan predikat “Baik” bank yang mendapatkan predikat baik adalah Bank Mega Syariah kemudian jika dilihat dari nilai ZPRnya menunjukkan predikat yang “Tidak Baik” bank yang mendapatkan predikat tidak baik adalah Bank Mega Syariah lalu dilihat lagi dari nilai EDRnya yang menunjukkan predikat yang “Sangat Baik” bank yang mendapatkan predikat sangat baik adalah Bank BRI Syariah sedangkan jika dilihat dari nilai DEWR menunjukkan predikat yang “Tidak Baik” bank yang mendapatkan predikat tidak baik adalah bahwa Bank Panin Dubai syariah dan terakhir dilihat dari nilai IICnya menunjukkan yang “Sangat Baik”. bank yang mendapatkan predikat sangat baik keenam Bank Syariah adalah Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa kinerja Bank Umum Syariah memiliki penilaian cukup Baik. Namun terdapat dua rasio yang kurang sehat yaitu zakat performance ratio dan director-employee welfare ratio. Hal ini menunjukkan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah masih rendah dan perbedaan kesejahteraan direksi dan karyawan masih besar.

Reference

- Abbasi, Sami M. and Kenneth W. Hollman and Joe H. Murrey. (1989) “Islamic Economics: Foundations and Practices“, *International Journal of Social Economics*, Vol. 16 Iss 5 pp. 5 – 17.
- Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad. (2006), *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, translated by Asmuni Solihin Zamakhsyari, Pustaka Al-Kautsar: Jakarta.
- Muhammad. (2009), *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, translated by Aditya Wisnu Pribadi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bappenas .(2016), *Sektor Infrastruktur Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016*, <http://bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/sector-infrastruktur-prioritas-penggunaan-dana-desa-2016/>, accessible December 2016.
- BPS(Badan Pusat Statistik).(2016), Persentase Penduduk Miskin Maret 2016 Mencapai 10,86 Persen, <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229>, diunduh Januari 2017.
- Ferdinand, Augusty. 2014. Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen. Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Haniffa, Ros and Mohammad Hudaib.(2002) “Accounting Policy Choice Within The Shariah Islami’ah Framework, *Arab Saudi Journal*. Vol.02, No.04, pp.1-27.
- Hafidhuddin , Didin dan Hendri Tanjung.(2003), Manajemen Syariah, Gema Insani ,Jakarta.
- Kompasiana.(2011), *Indonesia Negara Pangan yang Masih Impor Bahan Pangan* , http://www.kompasiana.com/ferrynang/indonesia-negara-penghasil-pangan-yang-masih-impor-bahan-pangan_550a1d6e8133117f1cb1e72d, accesible December 2016.
- Muhammad. (2009), *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Perwataatmadja, Karnaen dan Hendri Tanjung. (2007), *Bank Syariah Teori, Praktik, dan Perannya*. Celestial Publishing, Jakarta.
- Republika.(2016), *Dana Desa 2017 Rp 60 Triliun untuk Program Pemberdayaan*, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/12/05/ohpdto383-dana-desa-2017-rp-60-triliun-untuk-program-pemberdayaan>, accesible Desember 2016.
- Soemitra, Andri.(2009), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta.

Sulaiman ,Maliah and Roger Willett.(2001), “Islam, Economic Rationalism and Accounting”, *The American Journal of Social Sciences Islam* ,Vol. 18,No.2, pp. 1-36.

Thoyib,Armanu.(2005),“Hubungan Kepemimpinan, Budaya, Strategi, dan Kinerja: Pendekatan Konsep”, *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 7, No. 1, pp. 60-73.

Triuwono,Iwan .(2006), *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta.

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAAN PELANGGAN PADA THE LUXTON HOTEL BANDUNG

Yunia Silvia Sesunan ^{1*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRACT

Service excellent is a key determinant factor to assess whether the services are in accordance with the customer expectation. The Luxton Hotel Bandung required to fulfill the criteria of customer's decision to become the first chosen by customer. The factors as follows ; tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy . The objectives of this study is to examine the level of customer's satisfaction towards the services by The Luxton Hotel Bandung. This research conducted by 100 respondent which stay overnight in The Luxton Hotel Bandung. Based on the result used multiple regression shows that Tangibles (X1), Reliability (X2), Responsiveness (X3), Assurance (X4) and Empathy (X5) significant simultaneously to consumer's satisfaction. The independent variables affect the customer's decision to stay at the hotel shown by the coefficient of determination $R^2 = 0,653$ or 65,30% independent variables affect to customer's decision to stay at The Luxton Hotel Bandung and the remaining 34,70% affect by other factors.

ARTICLE INFO

Article History:
Received October 14th
2020
Received in revised from
October 28th 2020
Accepted October 30th
2020

Keywords:
kepuasan; kualitas
pelayanan, keputusan
pelanggan

* Corresponding Author; E-mail address: evi_sesunan@yahoo.com

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perhotelan di Kota Bandung melaju sangat pesat sejalan dengan semakin mudahnya akses transportasi menuju Kota Bandung. Selain itu perkembangan pariwisata seperti tempat wisata, kuliner, pusat perbelanjaan yang masif dan didukung dengan perkembangan teknologi informasi di era Industri 4.0. Dampaknya industri perhotelan di Bandung bersaing dengan sangat ketat.

Kepuasan pelanggan menjadi sangat menentukan tingkat kompetisi hotel pada suatu industri perhotelan. Setiap hotel menawarkan keunggulan masing – masing seperti tempat, kenyamanan, keunikan, pelayanan *excellent* dan harga terbaik yang dapat ditawarkan untuk setiap kelompok kategori dalam rangka mendapatkan keunggulan bersaing.

Pengalaman, kenyamanan dan kesan yang tertanam di benak konsumen adalah suatu hal yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk kembali menginap di hotel tersebut.

Tujuan studi ini adalah untuk melihat apakah kualitas pelayanan memegang peranan yang penting dalam kepuasan pelanggan.

LANDASAN TEORI

Service adalah semua aktivitas dan manfaat yang ditawarkan kepada pihak lain dalam bentuk tidak berwujud dan tidak menyebabkan berpindah kepemilikan dalam bentuk apapun.

Menurut Kotler, dkk (2012:202) *service* memiliki 4 karakteristik utama yang membedakan dari suatu barang, yaitu :

- 1) *Intangibility* (tidak terwujud) Jasa adalah suatu perbuatan, kinerja (*performance*). Atau usaha yang hanya bisa di konsumsi tetapi tidak bisa di miliki. karakteristik pelayanan ini tidak terwujud, sehingga jasa dapat di raba, dirasa, dicium, atau didengar
- 2) *Inseparability* (Tidak dapat dipisahkan) Barang biasanya di produksi, kemudian di jual baru di konsumsi. Sedangkan jasa umumnya di jual terlebih dahulu, baru kemudian di produksi dan dikonsumsi secara bersamaan.
- 3) *Variability* (Keragaman) Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standarized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut di hasilkan.
- 4) *Perishability* (Tidak tahan lama) Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Hal ini tidak menjadi masalah bila permintaannya tetap karena mudah untuk menyiapkan pelayanan untuk permintaan tersebut sebelumnya.

Pemasaran Jasa

Pemasaran jasa adalah suatu tindakan yang ditawarkan pihak produsen kepada konsumen berupa jasa yang tidak dapat dilihat, dirasa, didengar atau diraba namun dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen.

Menurut Kotler (2012:184), *Marketing mix* produk jasa; *Product* (produk), *Price* (harga), *Place* (tempat) and *Promotion* (promosi), *People* (People), *Process* (Proses) and *Customer Service* .

Berdasarkan definisi dari pemasaran jasa, pemasaran jasa adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip *intangible* dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun (Lupiyoadi, 2010:5). Selain itu Daryanto (2011:236), juga menyatakan bahwa pemasaran jasa adalah mengenai janji-janji. Janji-janji yang dibuat kepada pelanggan dan harus dijaga. Kerangka kerja strategis diketahui sebagai *service triangle* yang memperkuat pentingnya orang dalam perusahaan dalam membuat janji mereka dan sukses dalam membangun *customer relationship*.

Menurut Kotler & Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran (2012:138) mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai berikut: “Kepuasan (*satisfaction*) adalah perasaan senang atau

kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas”.

Pelayanan prima adalah kepedulian terhadap pelanggan. Jadi pelayanan prima pada dasarnya adalah rasa kepedulian organisasi yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*) atau organisasi yang berorientasi sosial (*nonprofit*) terhadap pelanggan yang ditunjukkan dengan adanya sikap, perhatian, dan tindakan nyata, sehingga pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan prima yang diberikan (Pratomo & Shaff, 2000; 107).

Swastha dan Handoko (2011) yang menjelaskan bahwa sehubungan dengan keputusan untuk membeli, perilaku konsumen melalui beberapa proses yaitu : Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian.

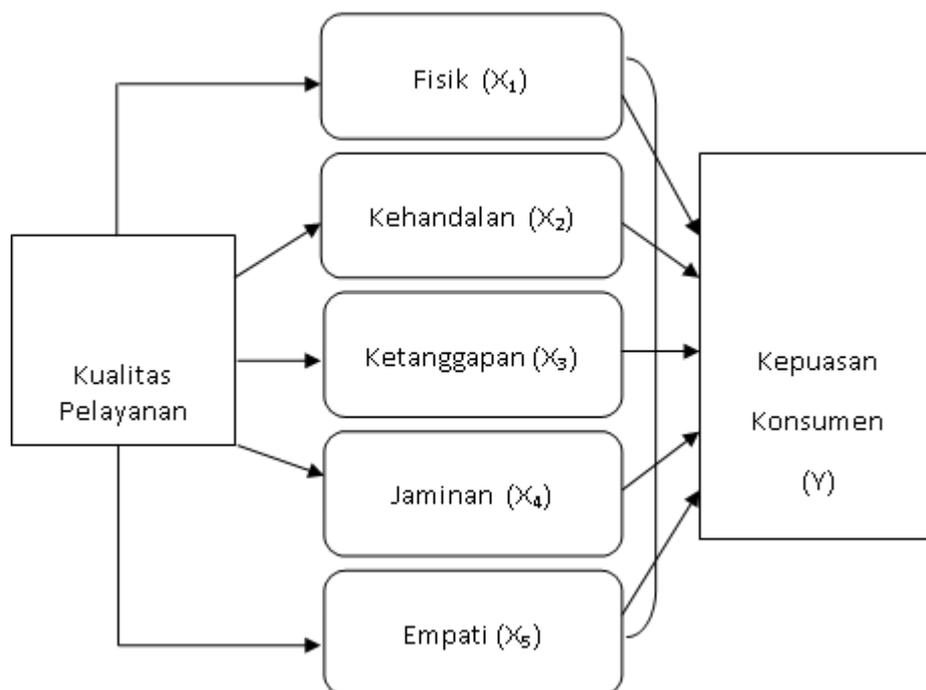
Proses tersebut merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri atas lima tahap, yaitu : (1) menganalisa kebutuhan dan keinginan, (2) pencarian informasi dan penilaian sumber-sumber, (3) penilaian dan seleksi terhadap alternatif pembelian, (4) keputusan untuk membeli, dan (5) perilaku sesudah pembelian.

Standar pelayanan prima mencakup 5 aspek (Tjiptono, 2015: 77), yaitu :

1. Bukti fisik (*Tangible*)
Untuk mengukur penampilan fisik, perlengkapan, fasilitas, karyawan, dan sarana komunikasi. Pengukurannya meliputi fasilitas fisik, kebersihan, kenyamanan, ruangan, dan kelengkapan peralatan komunikasi.
2. Keandalan (*Reliability*)
Merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan jasa yang tepat dan dapat diandalkan. Pengukurannya meliputi; kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.
3. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
Artinya mampu memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada pelanggan. Pengukurannya meliputi keinginan dari para staf dan karyawan untuk membantu pelanggan dengan memberikan pelayanan cepat tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan pelanggan.
4. Jaminan (*Assurance*)
Artinya mengukur kemampuan dan kesopanan karyawan serta sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh perusahaan. Pengukurannya meliputi: pengetahuan dan kemampuan karyawan, ramah tamah dan kesopanan, sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari keraguan, bahaya dan resiko.
5. Empati (*Empathy*)
Pengukurannya meliputi; kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan dengan cepat dengan cermat.

Kerangka Pemikiran

Gambar di bawah ini menjelaskan hubungan antara variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) dengan variabel terikat (Y) :



Gambar 1. Kerangka Teori

METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan di Hotel The Luxton Bandung. Sampel pada penelitian ini dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada 100 pelanggan The Luxton Hotel Bandung. Metode Pengambilan sampel pada studi ini adalah dengan *convenience sampling*. Dalam studi ini yang menjadi variabel terikat adalah tingkat kepuasan pelanggan The Luxton Hotel Bandung, sedangkan variabel bebas terdiri dari fisik, kehandalan, tanggapan, jaminan dan empati.

Definisi operasional dari keenam dimensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepuasan pelanggan yang diukur dari :
 - a. Penampilan karyawan hotel yang rapi dan profesional
 - b. Kecepatan karyawan dalam pelayanan
 - c. Fasilitas hotel secara keseluruhan
2. *Tangible* (bukti fisik) :
 - a. Hotel yang bersih tertata rapi dan indah
 - b. Fasilitas hotel lengkap dan nyaman
 - c. Lokasi hotel yang strategis
3. *Reliability* (kehandalan) :
 - a. Kemampuan hotel memberikan layanan sesuai dengan harga yang dibayar
 - b. Kemampuan karyawan hotel dalam memenuhi kebutuhan tamu
 - c. Karyawan dan manajemen hotel ramah terhadap tamu
4. *Responsiveness* (tanggapan) :
 - a. Karyawan hotel ramah dan komunikatif
 - b. Kecepatan dan ketepatan karyawan hotel dalam memberikan pelayanan
 - c. Kemudahan menghubungi melalui telepon.
5. *Assurances* (jaminan) :
 - a. Keamanan dan kenyamanan hotel
 - b. Performa hotel secara keseluruhan sesuai harapan
 - c. Fasilitas hotel yang lengkap dan membantu
6. *Empathy* (empati) :

- a. Sikap dan perilaku karyawan terhadap tamu
- b. Tegur sapa dan tutur kata
- c. Etika berkomunikasi melalui telepon

Metode Analisis Data

Untuk mengetahui kepuasan pelanggan dengan mempertimbangkan kualitas pelayanan sebagai salah satu aspek penting, maka tahapan-tahapan penelitian ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan uji validitas terhadap semua item-item pertanyaan dalam kuesioner. Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya adalah dengan mengukur konsistensi setiap pernyataan dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan adalah dengan analisis regresi linier berganda.

Uji Validitas

Validitas adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya masing-masing item pertanyaan dalam suatu kuesioner (Cooper dan Schindler, dalam Zulganef, 2008). Sedangkan menurut Sugiharto dan Sitinjak (2006), validitas berhubungan dengan suatu peubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Dalam pengujian validitas, suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. Sedangkan jika data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran akan memiliki nilai validitas yang rendah.

Untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi *Bivariate Pearson (Product Moment Pearson)*. Secara matematis rumus korelasi *Product Moment* adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{(n \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)) - (n \sum_{i=1}^n x_i)(n \sum_{i=1}^n y_i)}{\sqrt{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2} \sqrt{n \sum_{i=1}^n y_i^2 - (\sum_{i=1}^n y_i)^2}}$$

Dimana:

r_{xy} = koefisien korelasi *Product Moment*

x_i, y_i = skor item

n = Jumlah responden

Item pertanyaan dalam sebuah penelitian dinyatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, dimana r_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$.

Uji Reliabilitas

Menurut Walizer (1987) reliabilitas adalah keajegan pengukuran. Sugiharto dan Sitinjak (2006) juga menyatakan bahwa reliabilitas merujuk pada pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya dilapangan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel

Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai r_{xx} mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika nilai dari *Alpha Cronbach* ≥ 0.600 . Sedangkan formula untuk mengukur reliabilitas secara statistik adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2016:129):

$$r_1 = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

Dimana : r_1 = reliabilitas internal seluruh instrumen

R_b = Korelasi *product moment* belahan pertama dan kedua.

Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui adakah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukan analisis regresi linier berganda. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan yang dibagi dalam 5 indikator, sedangkan variabel terikat adalah kepuasan konsumen. Model persamaan regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = variabel kepuasan konsumen

X_1 = Variabel fisik

X_2 = variabel kehandalan

X_3 = variabel daya tanggap

X_4 = variabel jaminan

X_5 = variabel empati

β_0 = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = koefisien regresi

e = error

Dalam analisis regresi linier berganda maka tahapan-tahapan analisis yang akan dilakukan adalah uji t, dilanjutkan dengan uji F dan R².

1. Uji t

Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen (kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (kepuasan konsumen) maka dilakukan Uji t. Adapun tahapan uji t adalah sebagai berikut :

a. Menentukan Ho dan Ha

Ho: $\beta=0$, berarti tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas (wujud fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan kepercayaan, empati) terhadap kualitas pelayanan the Luxton Hotel Bandung.

Ha: $\beta \neq 0$, berarti ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas (wujud fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati) terhadap kualitas pelayanan the Luxton hotel Bandung.

b. Tingkat signifikansi (α) = 5% = 0,05 , variabel bebas (k) = 5

c. Nilai $t_{tabel} = t (\alpha/2 ; n-k-1)$

d. Nilai t hitung = $\frac{\beta_i - \beta}{S_b}$, dimana β_i = koefisien regresi, β = nilainya 0; dan

S_b = Koefisien regresi standar error

e. Keputusan

– Ho diterima apabila $-t_{tabel} \leq t_{hitung} < t_{tabel}$

Hal ini berarti tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas (wujud fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati) terhadap kualitas pelayanan the Luxton Hotel Bandung.

– Ho ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$

Hal ini berarti ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas (wujud fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati) terhadap kualitas pelayanan the Luxton Hotel Bandung.

2. Uji F (Uji Koefisien Regresi Secara Simultan)

Uji F adalah uji yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dilihat secara simultan. Adapun langkah-langkah uji F ini adalah:

- a. Menentukan Ho dan Ha
 Ho: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$, berarti tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas (wujud fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati) terhadap kualitas pelayanan the Luxton Hotel Bandung (Y).
 Ha: $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$, berarti terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas (wujud fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati) terhadap kualitas pelayanan the Luxton Hotel Bandung (Y).
- b. Nilai signifikansi (α) = 5% = 0,05, banyaknya variabel bebas (k) = 5
- c. Menentukan nilai F_{tabel} , $F_{tabel} = 0,05$; (k) (n-k-1)
- d. Menghitung nilai $F_{hitung} = \frac{SSR/k}{SSE/n-1-k}$, dimana $SSR = \text{Sum of Squares Regression}$
 $SSE = \text{Sum of Squares Residual}$
 k = banyaknya variabel bebas; n = banyaknya sampel
- e. Keputusan Ho diterima apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ berarti tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas (wujud fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati) terhadap kualitas pelayanan the Luxton Hotel Bandung (Y).
 Ho ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas (wujud fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati) terhadap kualitas pelayanan the Luxton Hotel Bandung (Y).

3. Uji R^2

$$R^2 = \frac{\sum(\hat{Y}-Y)^2}{\sum(Y_i-\bar{Y})^2}$$

Dimana : R^2 = Koefisien determinasi, \hat{Y} = Estimasi nilai Y, \bar{Y} = Nilai rata-rata Y; dan Y_i = Nilai variabel Y ke i

Uji koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya prosentasi pengaruh dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian validitas diperlukan untuk mengukur valid atau tidaknya item-item pertanyaan dalam kuesioner. Semakin tinggi nilai pearson correlation maka semakin valid dan akurat pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Uji Validitas

Variabel	Pearson Correlation	Keterangan
X1-1	0,848*	Valid
X1-2	0,842*	Valid
X1-3	0,661*	Valid
X2-1	0,786*	Valid
X2-2	0,746*	Valid
X2-3	0,735*	Valid
X3-1	0,712*	Valid
X3-2	0,783*	Valid
X3-3	0,634*	Valid
X4-1	0,772*	Valid
X4-2	0,830*	Valid
X4-3	0,615*	Valid
X5-1	0,668*	Valid

X5-2	0,785*	Valid
X5-3	0,668*	Valid
Y1-1	0,837*	Valid
Y1-2	0,758*	Valid
Y1-3	0,791*	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil yang terlihat pada tabel diatas, terlihat bahwa semua item-item pertanyaan variabel bebas (fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati) dan variabel terikat (kepuasan konsumen) menunjukkan valid dan akurat sehingga setiap item yang menjadi pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini. Hal ini ditunjukkan dengan nilai pearson yang melebihi 0,60.

Setelah melakukan uji validitas, maka dilakukan uji reliabilitas. Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach's	Kriteria	Keterangan
Fisik (Tangible)	0.714	Alpha Cronbach's > 0,60	reliabel
Kehandalan (Reliability)	0,745		reliabel
Ketanggapan (Responsible)	0,749		reliabel
Jaminan (Assurance)	0,685		reliabel
Empati (Empathy)	0,730		reliabel
Kepuasan	0,682		reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Dari hasil perhitungan SPSS yang ditampilkan pada tabel 2 diatas tampak bahwa item-item pertanyaan pada variabel independen (*tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy*) dan variabel dependen (kepuasan) mempunyai nilai *Alpha Cronbach's* > 60. Hal ini berarti bahwa, seluruh kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah handal dan terpercaya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS seperti yang terlihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	tt-test	PProb.	Keterangan
Konstanta	0.257	0.217	0.829	
Fisik (Tangible)	0.471	5.558	0.000	Signifikan
Kehandalan (Reliability)	0.158	2.273	0.025	Signifikan
Ketanggapan (Responsible)	0.189	3.703	0.000	Signifikan
Jaminan (Assurance)	0.165	2.703	0.019	Signifikan
Empati (Empathy)	0.151	2.038	0.044	Signifikan
R ²	0.653			
F-test	35.400		0.000	Signifikan

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Dari hasil di atas dapat dituliskan persamaan hasil uji regresi linier berganda dapat diperoleh sebagai berikut:

$$Y = 0,257 + 0,471 X_1 + 0,158 X_2 + 0,189 X_3 + 0,165 X_4 + 0,151 X_5 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada tabel 3 dapat dilihat bahwa semua variabel kualitas pelayanan (variabel fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan dan empati) berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Untuk menjelaskan pengaruh pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- $\beta_0 = 0,257$ berarti bahwa apabila variabel fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan dan empati, sama dengan nol, maka kepuasan konsumen The Luxton Hotel Bandung sebesar 0,257.
- $\beta_1 = 0,471$ artinya bahwa terdapat pengaruh positif variabel fisik (X_1) terhadap kepuasan konsumen pada fasilitas dan pelayanan The Luxton Hotel Bandung dengan asumsi variabel lain sama dengan nol. Variabel fisik ini mempunyai pengaruh yang signifikan yang berarti bila terjadi peningkatan dalam kualitas pelayanan dalam hal ini peningkatan kualitas pelayanan fisik maka akan terjadi peningkatan kepuasan konsumen.
- $\beta_2 = 0,158$ artinya bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel kehandalan (X_2) terhadap kepuasan konsumen pada The Luxton Hotel Bandung. Hal ini dapat dikatakan bahwa bila terjadi peningkatan pada kualitas pelayanan kehandalan maka akan terjadi juga peningkatan kepuasan konsumen.
- $\beta_3 = 0,189$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan dan positif variabel ketanggapan (X_3) terhadap kepuasan konsumen pada fasilitas dan pelayanan the Luxton Hotel Bandung. Peningkatan kualitas pelayanan pada variabel ketanggapan dengan asumsi variabel lain tetap maka kepuasan konsumen pada the Luxton Hotel Bandung akan meningkat.
- $\beta_4 = 0,165$ artinya bahwa terdapat pengaruh positif pada variabel jaminan (X_4) terhadap kepuasan konsumen pada The Luxton Hotel Bandung. Maka bila terjadi peningkatan kualitas pelayanan variabel jaminan dengan asumsi variabel lain tetap maka kepuasan konsumen pada The Luxton Hotel Bandung akan meningkat juga.
- $\beta_5 = 0,151$ artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pada variabel empati (X_5) terhadap kepuasan konsumen pada The Luxton Hotel Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan kualitas pelayanan pada variabel empati dengan asumsi variabel lain tetap maka kepuasan konsumen pada The Luxton Hotel Bandung akan meningkat.

Uji F

Berdasarkan tabel 3, nilai uji F menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan yang mencakup variabel *tangible* (wujud fisik), *reliability* (kehandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), *empathy* (empati) terhadap kepuasan konsumen The Luxton Hotel Bandung. Hal ini di tunjukkan dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau dapat dilihat pula pada nilai prob. hitung < 0.05 .

Jadi hipotesis yang menyatakan: terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara kualitas pelayanan yang mencakup variabel *tangible* (wujud fisik), *reliability* (kehandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), *empathy* (empati) terhadap kepuasan konsumen pada the Luxton Hotel Bandung, terbukti.

Untuk uji t dimana hasil regresi pada tabel 3 juga menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan pada masing-masing variabel kualitas pelayanan yang mencakup variabel *tangible* (wujud fisik), *reliability* (kehandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), *empathy* (empati) terhadap kepuasan konsumen the Luxton Hotel Bandung. Dengan demikian

hipotesis yang menyatakan diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara kualitas pelayanan yang mencakup variabel *tangible* (wujud fisik), *reliability* (kehandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), *empathy* (empati) terhadap kepuasan konsumen pada The Luxton Hotel Bandung, terbukti.

Koefisien determinasi (R^2) pada model regresi linier berganda ini menunjukkan nilai sebesar 0.653 yang berarti bahwa 65,3% variabel terikat dipengaruhi oleh seluruh variabel bebas yang diteliti pada studi ini. Sedangkan sebanyak 34,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dilakukan pada penelitian ini.

KESIMPULAN

Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh beberapa variabel dimana kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil studi ini yang mengukur kualitas pelayanan pada lima variabel (fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan dan empati) berpengaruh positif baik secara simultan ataupun secara parsial terhadap kepuasan konsumen.

Uji koefisien determinasi (R^2) juga menunjukan nilai yang cukup besar pengaruh variable bebas dalam menjelaskan variable terikat yaitu sebesar 65,3%. Dengan demikian dapat disimpulkan jika kualitas pelayanan meningkat maka akan meningkatkan kepuasan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Kotler, Philip dan Keller, K.L. 2012. Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Kotler, Philip and Gary Armstrong. 2012. Prinsip – prinsip Pemasaran. Edisi 13 Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Fandy Tjiptono, Ph.D. 2015. Strategi Pemasaran, Edisi 4, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Daryanto. 2011. Manajemen Pemasaran. PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung
- Rambat Lupiyoadi. 2010. Manajemen Pemasaran Jasa, Salemba Empat, Jakarta
- Basu Swastha, 2011. Manajemen Pemasaran-Analisis Perilaku Konsumen, Yogyakarta : BPFE
- Sitinjak, Tumpal JR dan Sugiarto, 2006, LISREL, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, Bandung: PT. Alfabet.
- Walizer, Michael H., and Paul L. Wienir, 1987, Metode dan Analisis Penelitian: Mencari Hubungan, Jilid 2, Erlangga, Jakarta.
- Zulganef, 2008, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

PENGARUH GAYA HIDUP SEHAT, GAYA KEPEMIMPINAN, DAN TIME BUDGET PRESSURE TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH

Dwi Riski Rahmadhanty¹, Wilda Farah^{2*}

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRACT

Introduction/ Purpose: This study aims to examine the influence of healthy lifestyle, leadership style, and time budget pressure on the performance of government auditors. **Research Methods:** This study uses primary data by distributing questionnaires to government auditors at 8 government institutions in Bangka Belitung Province. Sampling was done using convenience sampling method. The number of employees who became the sample in this study was 134 employees. The analytical method used to test the hypothesis is the multiple regression analysis using IBM SPSS Statistics 25. **Results:** The results showed that healthy lifestyle, leadership style, and time budget pressure has a significant effect on the performance of government auditors.

ARTICLE INFO

Article History:
Received September 8th
2020
Received in revised from
September 12th 2020
Accepted September
2020

Keywords:
Healthy Lifestyle,
Leadership Style, Time
Budget Pressure,
Government Auditor
Performance, Multiple
Regression Analysis.

* Corresponding Author; E-mail address: wilda_farah@uinjkt.ac.id

PENDAHULUAN

Kinerja merupakan tujuan yang harus dicapai dengan baik oleh setiap individu, pada setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Kinerja perlu dicapai oleh setiap level, untuk para pegawai, para atasan, pegawai swasta hingga pegawai pemerintahan. Individu dapat dikatakan berkinerja dengan baik apabila individu tersebut dapat mencapai tujuan pekerjaan atau tujuan dari organisasi tempatnya bekerja. Kondisi kinerja yang kondusif dapat mempengaruhi kinerja dan hasil kerja auditor sehingga dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada auditor sebagai pihak yang independen dalam pengauditan laporan keuangan (Fanani, 2007 dalam Merawati & Prayati, 2017).

Auditor mampu dikatakan profesional dapat dilihat dari kinerja yang dilakukannya dalam menjalankan perintah atasan yang sesuai dengan tujuan organisasi dan sesuai dengan kode etik auditor. Tuntutan masyarakat yang menginginkan transparansi keuangan pemerintah menjadi tanggung jawab auditor pemerintah, masyarakat sebagai penilai kinerja pemerintah menginginkan adanya sistem pengendalian intern dan fungsi pengawasan pemerintah yang baik agar pelaksanaan kegiatan menjadi terarah dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Widhi & Setyawati, 2015).

Pasal 1 ayat 2 Kode Etik Akuntan Indonesia menyatakan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas, objektivitas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor yang mempertahankan integritas, akan bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi. Auditor yang mempertahankan objektivitas, akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan dan permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Di samping itu dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya (Trisnaningsih, 2007).

Sedangkan kode etik Akuntan Publik menurut IAPI pada SEKSI 100.5 tentang Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan Publik menyatakan bahwa setiap Akuntan Publik atau CPA harus mematuhi prinsip dasar etika profesi sebagaimana yang tertera. Akuntan Publik harus berintegritas, yakni bersikap tegas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnis. Akuntan Publik harus memiliki objektivitas, dengan tidak membiarkan bias benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Memiliki Kompetensi Profesional atau Sikap Cermat Kehatihatian dengan bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan dan standar profesional yang berlaku. Kerahasiaan dengan auditor menjaga rahasia informasi yang diperoleh kepada pihak lain. Auditor juga harus memiliki Perilaku Profesional dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan kepada profesi

Menurut UU No 15 Tahun 2004, audit sektor pemerintah terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Auditor Pemerintah memegang peran yang sangat penting untuk kelangsungan jalannya pemerintahan di Indonesia. Kinerja Auditor Pemerintah yang baik maka akan membantu pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sebaliknya apabila kinerja Auditor Pemerintah menurun maka akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintahan.

Kinerja auditor dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam (internal) dan juga yang berasal dari luar (eksternal). Faktor internal ini berasal dari dalam diri pribadi auditor, yakni seperti gaya hidup yang dijalankan oleh auditor itu sendiri. Gaya hidup yang seharusnya di miliki oleh auditor adalah gaya hidup yang sehat, dengan pola makan yang baik, pola tidur yang teratur, dan fikiran yang tidak terlalu stress. Sedangkan faktor eksternal berasal

dari luar diri auditor atau dapat berasal dari lingkungan hidup auditor, yakni seperti gaya kepemimpinan di institusi tempat bekerja, tekanan anggaran waktu dalam bekerja dan lain sebagainya.

Sehat yang didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) adalah kondisi dinamis meliputi kesehatan jasmani, rohani, sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Sehat secara fisik dimaksudkan adalah individu tersebut tidak memiliki gangguan kesehatan apapun pada tubuhnya secara medis. Sehat secara mental/psikis adalah individu memiliki pikiran emosional dan spiritual yang sehat dan normal. Sehat ialah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Obella & Adliyani, 2015).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 arti kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehat sempurna menurut Giriwijoyo (2009) dalam (Kusmaedi, 2012) yaitu suatu keadaan tingkat sehat yang paling tinggi dan sangat sulit untuk dicapai oleh orang pada umumnya. Gaya hidup sehat adalah suatu cara atau metode bertindak atau berpenampilan yang diatur oleh standar kesehatan tertentu. Standar kesehatan ini meliputi makan dan minum, kerja (termasuk belajar) dan istirahat, olahraga atau latihan, hubungan sosial, keseimbangan emosi atau mental, spiritual, okupasional dan sesuai dengan norma-norma sosial budaya daerah atau nasional (Kusmaedi, 2012).

Dalam setiap hal di dunia, termasuk kesehatan, pasti memiliki masalah-masalah tertentu. Tidak selamanya masalah kesehatan merupakan masalah kompleks yang merupakan hasil dari berbagai masalah lingkungan yang bersifat alamiah maupun masalah buatan manusia, sosial budaya, perilaku, populasi penduduk, genetika, dan sebagainya. Derajat kesehatan masyarakat yang disebut sebagai psychosocio somatic health well being, merupakan hasil dari empat faktor yaitu environment atau lingkungan, behaviour atau perilaku, antara yang pertama dan kedua dihubungkan dengan ecological balance. Heredity atau keturunan yang dipengaruhi oleh populasi, distribusi penduduk, dan sebagainya, Health care service berupa program kesehatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Dari empat faktor tersebut di atas, lingkungan dan perilaku merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya (dominan) terhadap kesehatan (Notoatmodjo, 2003 dalam Obella & Adliyani, 2015).

Menjalankan gaya hidup sehat diharapkan dapat membuat kinerja auditor pemerintah menjadi semakin baik. Betapa pentingnya menjalankan gaya hidup sehat mengingat banyak sekali dampak buruk penyakit-penyakit yang akan timbul dari gaya atau pola hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko terkena berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit dalam hingga penyakit mental (Kusmaedi, 2012).

Faktor gaya hidup yang bisa meningkatkan risiko terkena penyakit tergolong beragam. Anda yang gemar mengonsumsi makanan tidak sehat, malas bergerak atau berolahraga, dan memiliki kebiasaan yang mengganggu kesehatan seperti merokok dan minum minuman beralkohol, lebih berisiko untuk terkena penyakit. Hal itu diungkapkan dr T Bahdar Johan Sp PD, pada even Healty Talk di rangkaian Corporate Halal Bihalal Hotel Santika Premiere Bintaro. Ia menuturkan beberapa penyakit yang sering terjadi akibat gaya hidup yang buruk antara lain adalah: diabetes, osteoporosis, kanker, jantung, gagal ginjal, stroke, hipertensi, obesitas, fatty liver, skizofrenia, dan HIVAIDS (www.suara.com).

WHO menyatakan bahwa Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyebab kematian terbesar di dunia. Pada tahun 2008, lebih dari 36 juta orang meninggal dunia akibat PTM, meliputi penyakit kardiovaskular (48%), kanker (21%), penyakit respiratori kronis (12%), dan diabetes (12%). Sembilan juta lebih kematian yang terjadi sebelum usia 60 tahun seharusnya dapat dicegah. Di negara berkembang, kematian dini PTM terjadi pada 22% laki-laki dan 35% perempuan. Di Indonesia, PTM diperkirakan berkontribusi 64% terhadap penyebab kematian

yang indentik dengan pola yang terjadi di dunia, sekitar 30% kematian disebabkan penyakit kardiovaskular, 13% karena kanker 7% penyakit respiratori dan 3% diabetes (Prabandari, 2013).

Sedangkan di Indonesia, merokok sebagai salah satu ciri pola hidup yang buruk dapat menjadi salah satu penyebab kematian. Kajian Badan Litbangkes tahun 2015 menunjukkan, Indonesia menyumbang lebih dari 230.000 kematian akibat konsumsi produk tembakau setiap tahunnya. Data Globocan 2018 menunjukkan dari total kematian akibat kanker di Indonesia, kanker paru menempati urutan pertama penyebab kematian yaitu sebesar 12,6 persen. Sementara, berdasarkan data Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan 87 persen kasus kanker paru berhubungan dengan merokok. Dalam berbagai riset, diketahui bahwa faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) utama yang bisa dicegah bersama adalah perilaku buruk merokok. Menteri Kesehatan Nita F Moloek, Rokok merupakan faktor risiko penyakit yang memberikan kontribusi paling besar dibanding faktor risiko lainnya. Seorang perokok mempunyai risiko 2 sampai 4 kali lipat untuk terserang penyakit jantung koroner dan memiliki risiko lebih tinggi untuk terserang penyakit kanker paru dan PTM lainnya (lifestyle.bisnis.com/read/20190711/106/1122977/setahun-kematian-karenakonsumsi-rokok-di-indonesia-lebih-dari-230.000).

Pada dasarnya resiko penyakit-penyakit PTM yang terjadi ini dapat dihindari dengan menjalankan gaya hidup sehat dengan contoh yang dikemukakan Dr Andika Widyatama dari tim klikdokter sebagai berikut:

1. Kurangi konsumsi nasi
2. Cukup minum air putih
3. Olahraga untuk kebugaran
4. Istirahat yang cukup dan me-time untuk mengelola stress
5. Vaksinasi sesuai anjuran
6. Mengonsumsi suplemen
7. Penggunaan losion untuk kesehatan kulit.

Auditor memiliki kecenderungan untuk mengabaikan gaya hidup sehat ini, padahal gaya hidup sehat memegang peranan yang sangat penting bagi hidup mereka. Salah satu faktor pola atau gaya hidup yang kurang baik ini adalah ketika para auditor mendapati kondisi dimana mereka harus menyelesaikan tugas yang sudah harus di kumpulkan atau menghadapi date line maka mereka cenderung akan mengabaikan pola tidur, bahkan pola makan mereka. Bahkan mungkin akan berdampak kepada stres yang akan timbul. Padahal seharusnya auditor menjalankan gaya hidup sehat untuk mendukung kinerja mereka agar menjadi lebih baik lagi. Pendapat ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jones, Norman, & Wier, 2010) yang menunjukkan hasil bahwa gaya hidup sehat (healthy lifestyle) mempengaruhi kinerja. Namun penelitian yang dihasilkan oleh (Merawati & Prayati, 2017) menunjukkan hasil yang sebaliknya, bahwa gaya hidup sehat tidak berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.

Gaya kepemimpinan juga dapat mempengaruhi kinerja. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara seorang atasan untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut bersedia melakukan kehendak atasan untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi (Luthans, 2002:575 dalam Widhi & Setyawati, 2015). Kreitner dan Kinichi (2005) dalam (Marganingsih & Martani, 2010) mengemukakan gaya kepemimpinan dalam dua dimensi yaitu gaya kepemimpinan konsiderasi dan struktur inisiatif. Seorang pemimpin yang memiliki gaya konsiderasi akan menciptakan hubungan dekat dengan bawahan, rasa saling percaya, kekeluargaan, menghargai gagasan bawahannya, dan membangun komunikasi yang baik dengan bawahannya. Sedangkan, seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan struktur inisiatif akan mengorganisasikan

hubungan dalam kelompok, cenderung membangun pola dan saluran komunikasi yang jelas, dan menjelaskan cara mengerjakan tugas yang benar. Oleh karena itu, kombinasi kedua gaya tersebut akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu agar dapat menjalankan kewajiban mereka dalam bekerja yang nantinya dapat berdampak untuk meningkatkan kinerja mereka.

Pemimpin yang baik harus peka terhadap perubahan, mampu menganalisa apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan baik internal dan eksternal organisasinya, sehingga mampu memecahkan masalah yang dihadapi, dan lebih meningkatkan kinerja karyawan dan kinerja organisasi. Penelitian akuntansi tentang gaya kepemimpinan terhadap kinerja pada perusahaan sudah sering dilakukan, tetapi masih jarang sekali dilakukan penelitian pada yang bukan perusahaan, seperti pada pemerintahan dengan responden auditor pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus-kasus pada berapa perusahaan yang ditemukan disebabkan oleh kepemimpinan para pemimpinnya. Berikut adalah beberapa kasus perusahaan yang diakibatkan oleh kepemimpinan yang kurang baik:

1. Brian Dunn, CEO Best Buy yang semasa kepemimpinannya perusahaan mengalami penurunan harga saham, kehilangan pangsa pasar akibat kalah dengan kompetitor yang lebih gesit, dan kegemarannya untuk melakukan pembelian saham kembali (buyback) yang menimbulkan biaya bagi perusahaan hingga US\$ 6,4 miliar.
2. Aubrey McClendon, CEO Chesapeake Energy (CHK) yang tampaknya memiliki kesulitan memisahkan keuangan perusahaan dengan keuangannya sendiri. Menurut Reuters, McClendon meminjam sebanyak US\$ 1,1 miliar selama tiga tahun. Pinjaman yang dirahasiakan ini dilakukan di ribuan perusahaan yang dimilikinya. Dia juga membawa lari dana hedge fund migas senilai US\$ 200 juta.
3. Andrea Jung, CEO Avon (AVP) dibawah kepemimpinan Andrea Jung sejak 2004, nilai pasar perusahaan telah jatuh dari US\$ 21 miliar menjadi US\$ 6 miliar. Dan perusahaan telah menghabiskan biaya hukum senilai US\$ 300 juta terkait tuduhan kepada Jung. Ia dinilai melakukan pelanggaran Undang-Undang Foreign Corrupt Practices, yang melarang penyuapan pejabat asing.
4. Mark Pincus, CEO Zynga (ZNGA) Saham Zynga turun 75 persen sepanjang tahun ini karena perusahaan kehilangan bakat pemimpinnya. Dia membuat beberapa kesalahan, termasuk membiarkan perusahaannya masuk ke Facebook (FB), sehingga Zynga begitu menggantungkan sebagian besar pendapatannya dari sini.
5. Rodrigo Rato, pimpinan Bankia Spanyol Ia mengundurkan diri sebagai Ketua lembaga pemberi pinjaman Spanyol, Bankia (BKIA) pada bulan Juli. Rato adalah salah satu mantan Menteri Keuangan Spanyol dan mantan Managing Director IMF. Dia sedang diselidiki untuk kasus penipuan, penetapan harga, dan penggelapan sehubungan dengan runtuhnya Bankia dan bailout oleh pemerintah Spanyol (www.liputan6.com).

Sedangkan di Indonesia kasus gaya kepemimpinan terjadi pada salah satu Maskapai Penerbangan terbesar yaitu Garuda. Direktur Utama Garuda yakni I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara diberhentikan terkait kasus dugaan penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Airbus A330-900 Neo pada 5 Desember 2019. Selain terkait kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton ini tercatat telah terjadi beberapa skandal kasus Garuda Indonesia yakni pada Agustus 2019, Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar ditahan KPK terkait dugaan pencucian uang dan suap terkait pengadaan suku cadang pesawat. April 2019, Dua komisaris PT Garuda Indonesia menolak menandatangani laporan keuangan perusahaan yang mengindikasikan perusahaan mencetak laba karena menduga ada rekayasa. Audit beberapa otoritas keuangan negara berujung sanksi dan denda bagi PT Garuda Indonesia. November 2019, Akuisisi PT Garuda Indonesia, melalui anak usaha Citilink, terhadap Sriwijaya Air pada November 2018 berujung kisruh dan menyebabkan kedua maskapai memutuskan 'berpisah'. Lalu yang terakhir

terkait penyelundupan motor Harley Davidson, Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama Garuda. Karena skandal ini negara merugi senilai Rp 1,5 miliar (www.bbc.com/indonesia/indonesia-50689915).

Cara pemimpin mengatur dan mengarahkan para karyawan atau bawahannya memegang fungsi penting untuk bisa mengukur dan menentukan apakah tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai dengan tepat dan baik. Jika pemimpin dapat mengarahkan dan mengatur para bawahannya agar menjalankan tujuan manajemen dengan baik dan teratur, maka kinerja manajemen dan para karyawan pun seharusnya meningkat. Karena dorongan dari pemimpin seharusnya memberikan angin segar kepada pegawai untuk kerja lebih semangat lagi. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Merawati & Prayati, 2017) yang menunjukkan hasil bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widhi & Setyawati, 2015) yang tidak menemukan hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor, yang dengan kata lain, gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Time budget pressure membuat auditor menyelesaikan tahapan-tahapan audit secara efektif dan efisien sesuai waktu yang sudah di anggarkan dan di tetapkan sebelumnya sehingga juga akan berdampak pada ekonomisasi biaya yang akan dikeluarkan. Dengan kata lain, semakin efektif, efisien dan ekonomis auditor dalam bekerja maka akan semakin baik kinerja auditor tersebut.

Time budget pressure tidak selalu berdampak baik bagi auditor. Sebaliknya, time budget pressure dapat menyebabkan perilaku menyimpang dari seorang auditor, karena auditor cenderung tertekan dalam melakukan tugasnya. Dampak negatif yang ditimbulkan dari time budget pressure adalah auditor sengaja untuk menghilangkan beberapa tahapan audit karena alasan keterbatasan waktu, sehingga akan menurunkan kualitas audit (Anggreni & Rasmini, 2017).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggreni & Rasmini, 2017 menunjukan bahwa variabel time budget pressure berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Keadaan ini menggambarkan bahwa semakin tinggi time budget pressure, maka kinerja auditor cenderung semakin rendah. Peneliti lain yang bernama Pamudi & Badera, 2017 yang meneliti hal yang sama pun menghasilkan hasil yang mendukung penelitian yang di lakukan oleh Wayan dan Anggraeni yaitu time budget pressure memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja auditor internal pada PT. Nindya Karya Persero Regional IV Provinsi Bali. Begitu pun dengan penelitian yang dilakukan oleh Lautania, 2011 yang menunjukkan hasil bahwa time budget pressure berpengaruh terhadap kinerja auditor. Lautania pada penelitiannya tersebut pun menyarankan untuk untuk membuat anggaran yang tepat sesuai dengan batas waktu audit yang ditentukan oleh klien agar menghindari dampak negatif time budget pressure. Meskipun beberapa peneliti menghasilkan hasil negatif, namun ada peneliti yang hasilnya sebaliknya atau positif, salah satunya adalah Marganingsih & Martani, 2010 yang memberikan bukti bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh positif pada kinerja auditor. Artinya, semakin auditor mengalami keterbatasan anggaran waktu, maka seharusnya kinerjanya menjadi semakin baik.

TELAAH LITERATUR

Teori Tindakan Beralasan (*Reasoned Action Theory*)

Teori tindakan beralasan (*Reasoned Action Theory*) dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Penyebab perilaku paling proksimal adalah niat perilaku (apa yang ingin dilakukan atau tidak dilakukan). Niat perilaku, pada gilirannya, ditentukan oleh sikap (evaluasi seseorang terhadap perilaku) dan norma subyektif (evaluasi seseorang terhadap apa yang menurut orang lain penting yang harus dilakukan), yang keduanya mungkin merupakan penentu paling penting dari perilaku tertentu (Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen, 1975 dalam Trafimow, 2015).

Biasanya, ini diungkapkan secara empiris oleh bobot beta yang diperoleh dari analisis regresi berganda, di mana niat perilaku dikembalikan ke sikap dan norma subyektif. Jika hasilnya adalah sikap yang lebih besar daripada berat badan norma beta subyektif, perilaku dianggap lebih di bawah sikap daripada kontrol normatif, tetapi jika kebalikannya benar, maka perilaku dianggap lebih di bawah normatif daripada kontrol sikap. Dalam kedua kasus, maka, diinginkan untuk mengetahui apa yang menentukan perilaku atau norma subyektif, masing-masing, jika seorang peneliti ingin mempengaruhi perilaku.

Sikap ditentukan oleh keyakinan perilaku (keyakinan tentang kemungkinan berbagai konsekuensi) dan evaluasi seberapa baik atau buruknya jika konsekuensi itu terjadi. Norma subyektif ditentukan oleh keyakinan tentang apa yang menurut orang lain penting dan harus dilakukan dan seberapa besar seseorang termotivasi untuk mematuhi orang lain yang penting itu. Baik sikap dan norma subyektif diasumsikan ditentukan oleh proses sumatif. Dengan demikian, untuk membentuk suatu sikap, orang diasumsikan menjumlahkan produk evaluasi-kepercayaan perilaku ($attitude = \sum biei$), sedangkan untuk membentuk norma subyektif, orang diasumsikan jumlah keyakinan normatif-motivasi untuk mematuhi produk ($subjective\ norm = \sum nimi$) (Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein, 1980; Fisbein & Ajzen, 1975 dalam Trafimow, 2015).

Teori Perilaku Terencana (*Planned Behavior Theory*)

Teori perilaku terencana (*Planned Behavior Theory*) oleh Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen, 1975 dibuat perlu oleh keterbatasan model asli dalam berurusan dengan perilaku di mana orang memiliki kontrol atas kehendak yang tidak lengkap. Gambar 2.1 menggambarkan teori dalam bentuk diagram struktural.

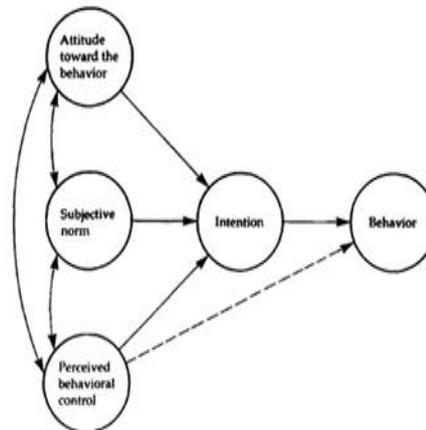


FIG. 1. Theory of planned behavior.

Untuk kemudahan presentasi, kemungkinan efek umpan balik perilaku pada variabel anteseden tidak ditampilkan. Seperti dalam teori asli tindakan beralasan, faktor sentral dalam teori perilaku terencana adalah niat individu untuk melakukan perilaku yang diberikan. Niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku; mereka adalah indikasi tentang seberapa keras orang mau mencoba, seberapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk lakukan, untuk melakukan perilaku tersebut.

Sebagai aturan umum, semakin kuat niat untuk terlibat dalam perilaku, semakin besar kinerjanya. Namun, harus jelas bahwa niat perilaku dapat mengikat ekspresi dalam perilaku hanya jika perilaku tersebut di bawah kendali kehendak, yaitu jika orang tersebut dapat memutuskan sesuka hati untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Meskipun beberapa perilaku mungkin memenuhi persyaratan ini dengan cukup baik, kinerja sebagian besar tergantung setidaknya sampai taraf tertentu pada faktor-faktor non-motivasi seperti ketersediaan peluang dan sumber daya yang diperlukan (Ajzen, 1985 dalam Azen, 1991). Secara kolektif, faktor-faktor ini mewakili kontrol aktual orang atas perilaku tersebut. Sejauh

seseorang memiliki peluang dan sumber daya yang diperlukan, dan berniat untuk melakukan perilaku tersebut, ia harus berhasil melakukannya.

Asumsi biasanya dibuat bahwa motivasi dan kemampuan berinteraksi dalam pengaruhnya terhadap pencapaian perilaku. Dengan demikian, niat akan diharapkan untuk mempengaruhi kinerja sejauh bahwa orang tersebut memiliki kontrol perilaku, dan kinerja harus meningkat dengan kontrol perilaku ke arah yang orang termotivasi untuk mencoba.

Theory of planned behavior (teori perilaku terencana) merupakan pengembangan dari teori sebelumnya yaitu theory of reasoned action (teori tindakan beralasan) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Dalam theory of reasoned action (teori tindakan beralasan), dimana teori ini merupakan teori yang digunakan untuk memperkirakan tingkah laku seseorang. Dalam theory of reasoned action (teori tindakan beralasan) memiliki dua prediksi utama dalam menilai niat seseorang untuk berperilaku, yaitu attitude toward the behavior dan subjective norm (Ajzen, 1991 dalam Wikamorys & Rochmach, 2017). Dalam Theory of planned behavior (teori perilaku terencana) menerangkan bahwa perilaku seseorang akan muncul karena adanya niat untuk berperilaku.

Theory of planned behavior dikhususkan pada perilaku spesifik seseorang dan untuk semua perilaku secara umum Niat seseorang untuk berperilaku dapat di prediksi oleh tiga hal yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior), norma subyektif (subjective norm), dan persepsi pengendalian diri (perceived behavioral control). Attitude toward the behavior merupakan keseluruhan evaluasi seseorang mengenai positif atau negatifnya untuk menampilkan suatu perilaku tertentu. Subjective norm merupakan kepercayaan seseorang mengenai tuntutan dari orang lain yang dianggap penting baginya untuk bersedia menampilkan atau tidak menampilkan suatu perilaku tertentu sesuai dengan tuntutan. Perceived behavioral control adalah persepsi seseorang tentang kemampuannya untuk menampilkan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 1991 dalam Wikamorys & Rochmach, 2017).

Dalam Theory of Planned Behaviour (TPB) menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subyektif dan persepsi pengendalian diri akan memunculkan sebuah niat untuk melakukan perilaku. Actual Behavioral Control (Kontrol perilaku nyata) akan terjadi apabila seseorang ingin melakukan niat yang dimiliki. Contohnya adalah sikap seorang terhadap intuisi, terhadap orang lain, atau terhadap suatu objek.

Auditor Pemerintah

Auditor Pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, auditor pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu: 1) Auditor Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri ayat (2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk kepada pemerintah, sehingga diharapkan dapat bersikap independen.

2) Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) atau dikenal dengan istilah lain Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota (inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id).

Terdapat perbedaan fungsi antara auditor internal pemerintah yakni BPKP dengan auditor eksternal pemerintah yakni BPK. Auditor internal yakni BPKP berfungsi sebagai „menilai kualitas“ (quality assurance) yang membantu pemerintahan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan untuk menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas serta memenuhi syarat kehematan. Sedangkan auditor eksternal yakni BPK menyanggah fungsi attestasi terhadap akuntabilitas pemerintah, artinya memberikan pendapat terhadap kelayakan suatu pertanggungjawaban pemerintah (attestation function).

Hasil laporan dari auditor internal dan eksternal ini pun diberikan kepada pengguna yang berbeda pula. BPK adalah lembaga negara di luar eksekutif (Presiden) yang kedudukannya sejajar dengan Presiden, DPR dan MA. Sedangkan BPKP adalah lembaga yang bertanggungjawab kepada Presiden. Jadi, BPKP adalah bagian dari eksekutif. Konsekuensinya, hasil laporan BPK disampaikan ke DPR, sedangkan BPKP menyampaikannya ke Presiden, karena memang membantu Presiden dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan (www.bpk.go.id).

Gaya Hidup Sehat

Sehat yang didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) adalah kondisi dinamis meliputi kesehatan jasmani, rohani, sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Sehat secara fisik dimaksudkan adalah individu tersebut tidak memiliki gangguan kesehatan apapun pada tubuhnya secara medis. Sehat secara mental/psikis adalah individu memiliki pikiran, emosional dan spiritual yang sehat dan normal.

Menurut undang-undang Republik Indonesia no 36 tahun 2009 arti kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehat sempurna menurut Giriwijoyo (2009) dalam (Kusmaedi, 2012) yaitu suatu keadaan tingkat sehat yang paling tinggi dan sangat sulit untuk dicapai oleh orang pada umumnya.

Sehat yang dimaksud dalam tulisan ini mencakup berbagai dimensi, yaitu dimensi fisikal, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. Dimensi fisikal yang terdiri atas tiga sistem kerja, yaitu pelaksana gerak, pendukung gerak, dan pemulih. Fungsi dimensi fisikal adalah untuk bergerak dan bekerja sebagai dimensi yang sangat penting untuk memfungsikan dimensi-dimensi lainnya. Dimensi intelektual memiliki enam fungsi, yaitu fungsi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi yang secara keseluruhan menggambarkan kualitas pola pikir seseorang. Dimensi sosial, diaktualisasikan dalam bentuk kemampuan melakukan kerja sama dengan orang lain, kemampuan penyesuaian diri, dengan orang lain kemampuan menjaga silaturahmi dengan sanak saudara, dan kemampuan melak sanakan tanggung jawab. Dimensi emosional, diaktualisasikan dalam bentuk kemampuan berempati, kemampuan mengungkapkan dan memahami diri, kemampuan mengendalikan amarah, kemampuan untuk mandiri, kemampuan menyesuaikan diri secara internal, kemampuan untuk disukai, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan untuk tekun, setiakawan, ramah dan kemampuan untuk bersikap hormat. Dimensi spiritual, diaktualisasikan dalam bentuk kemampuan mensyukuri, kemampuan untuk memahami nilai dan kepercayaan diri dan masyarakat, kemampuan untuk memandang hidup yang menyeluruh, wellbeing, percaya adanya Tuhan, dan kemampuan untuk berinteraksi secara spiritual (Kusmaedi, 2012).

Gaya hidup sehat adalah suatu cara atau metode bertindak atau berpenampilan yang diatur oleh standar kesehatan tertentu. Standar kesehatan ini meliputi makan dan minum, kerja (termasuk belajar) dan istirahat, olahraga atau latihan, hubungan sosial, , keseimbangan emosi atau mental, spiritual, okupasional dan sesuai dengan norma-norma sosial budaya daerah atau nasional (Kusmaedi, 2012). Gaya hidup sehat mencakup hal-hal sebagai berikut: memakan makanan dan minuman yang sehat (termasuk menghindari nikotin, minuman keras), latihan

atau olahraga yang terprogram, melakukan kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan jelek, memperbaiki lingkungan alam atau sekitar, selalu berupaya meningkatkan ilmu pengetahuan terutama tentang kesehatan (life long learning), mengelola waktu dan mengelola keuangan, beribadah kepada Allah, kewaspadaan mental, keseimbangan emosi, interaksi yang harmonis dengan sesama manusia (Kusmaedi, 2012).

Faktor gaya hidup yang bisa meningkatkan risiko terkena penyakit tergolong beragam. Anda yang gemar mengonsumsi makanan tidak sehat, malas bergerak atau berolahraga, dan memiliki kebiasaan yang mengganggu kesehatan seperti merokok dan minum minuman beralkohol, lebih berisiko untuk terkena penyakit. Hal itu diungkapkan dr T Bahdar Johan Sp PD, pada even Healty Talk di rangkaian Corporate Halal Bihalal Hotel Santika Premiere Bintaro. Ia menuturkan beberapa penyakit yang sering terjadi akibat gaya hidup yang buruk antara lain adalah: diabetes, osteoporosis, kanker, jantung, gagal ginjal, stroke, hipertensi, obesitas, fatty liver, skizofrenia, dan HIV/AIDS (www.suara.com).

Untuk menghindari kemungkinan penyakit yang sering terjadi akibat gaya hidup yang tidak sehat tim medis dari klikdokter.com memberikan beberapa tips gaya hidup sehat, yakni sebagai berikut:

1. Kurangi konsumsi nasi
2. Cukup minum air putih
3. Olahraga untuk kebugaran
4. Istirahat yang cukup dan me-time untuk mengelola stress
5. Vaksinasi sesuai anjuran
6. Mengonsumsi suplemen
7. Penggunaan losion untuk kesehatan kulit (www.klikdokter.com).

Gaya hidup sehat (healthy lifestyle) adalah cara hidup yang meminimalisasi resiko penyakit-penyakit serius atau kematian. Gaya hidup sehat (healthy lifestyle) dapat dilakukan dengan mempertahankan program pelatihan fisik rutin, diet seimbang, kebiasaan tidur yang baik, dan membatasi diri dari kelebihan konsumsi produk alkohol dan tembakau. Kesehatan yang stabil tentu akan berdampak positif pada kinerja auditor dan hasil kerja auditor dalam menjalankan tugasnya (Gratia dalam Merawati et al., 2017). Auditor yang terlalu semangat bekerja biasanya akan mengabaikan kondisi fisik mereka, seperti tidur menjadi tidak teratur, begadang, makan tidak tepat waktu bahkan hingga lupa berolah raga. Hal ini menyebabkan sebagian menjadi rentan terkena penyakit dan sakit tersebut akan berdampak buruk terhadap kinerja mereka.

Gaya Kepemimpinan

Robin (2011) dalam (Merawati & Prayati, 2017) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mencapai tujuan. Sedangkan gaya kepemimpinan adalah suatu hal yang dapat membuat perusahaan atau organisasi dapat berhasil mencapai tujuannya. Kepemimpinan menggunakan pengaruh yang dimiliki oleh pemimpin terhadap karyawannya untuk mencapai tujuan organisasi.

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seorang manajer pada saat ia mempengaruhi perilaku bawahannya. Seseorang yang menjalankan fungsi manajemen berkewajiban mempengaruhi karyawan yang dibawahinya agar mereka tetap melaksanakan tugas dengan baik, memiliki dedikasi terhadap organisasi dan tetap merasa berkewajiban untuk mencapai tujuan organisasi (Sedarmayanti 2007 dalam Candra & Badera, 2017)

Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara seorang atasan untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut bersedia melakukan kehendak atasan untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi (Luthans, 2002:575 dalam Widhi & Setyawati, 2015).

Kreitner dan Kinichi 2005 mengemukakan gaya kepemimpinan dalam dua dimensi yaitu gaya kepemimpinan konsiderasi dan struktur inisiatif. Seorang pemimpin yang memiliki gaya

konsiderasi akan menciptakan hubungan dekat dengan bawahan, rasa saling percaya, kekeluargaan, menghargai gagasan bawahannya, dan membangun komunikasi yang baik dengan bawahannya. Sedangkan, seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan struktur inisiatif akan mengorganisasikan hubungan dalam kelompok, cenderung membangun pola dan saluran komunikasi yang jelas, dan menjelaskan cara mengerjakan tugas yang benar. Oleh karena itu, kombinasi kedua gaya tersebut akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu (Marganingsih & Martani, 2010).

Gaya kepemimpinan adalah tentang bagaimana interaksi antara pemimpin dan pegawainya. Karena nantinya interaksi ini akan menentukan naik atau turunnya motivasi kerja si pegawai yang akan berdampak pula pada kinerja yang ia hasilkan. Dalam hal ini adalah pemimpin harus bisa membawa pegawainya agar bisa termotivasi guna meningkatkan kinerjanya. Apabila kinerja pemimpin baik, maka akan berdampak baik pula terhadap kinerja pegawainya.

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja pegawainya, selain gaya kepemimpinan pemberian reward and punishment juga dapat diterapkan oleh para pemimpin untuk melatih dan mendapatkan kinerja yang baik dari para pegawainya.

Demikian pula gaya kepemimpinan sangat diperlukan karena dapat memberikan nuansa pada kinerja auditor yang cenderung bisa formal maupun informal. Gaya kepemimpinan yang cenderung informal lebih menekankan pola keteladanan pimpinan, namun memberikan kebebasan yang lebih luas bagi auditor untuk mengkreasi pekerjaannya serta tanggung jawab yang lebih besar, akibat dari instrumen organisasi secara formal belum memadai (Trisnarningsih, 2007).

Pemimpin mempunyai tanggung jawab menciptakan kondisi yang mendorong anggota agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Gaya kepemimpinan mencerminkan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi individu atau kelompok. Seorang pemimpin harus mampu menjaga keselarasan antara pemenuhan kebutuhan individu dengan pengarahan individu pada tujuan organisasi.

Siagian (2002) dalam (Trisnarningsih, 2007) menyatakan bahwa terdapat tiga jenis perilaku kepemimpinan, yaitu: perilaku berorientasi pada tugas (task oriented behavior), perilaku yang berorientasi pada hubungan (relationship oriented behavior), dan kepemimpinan partisipatif.

Menurut (Hasibuan 2016 dalam Fajrin & Susilo, 2018) membagi gaya kepemimpinan menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

1. Gaya Kepemimpinan Otoriter
Kepemimpinan Otoriter adalah kekuasaan atau wewenang, sebagian besar mutlak berada pada pimpinan kalau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Gaya Kepemimpinan Partisipatif
Kepemimpinan Partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerja sama yang serasi, menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi para bawahan. Pemimpin akan mendorong kemampuan bawahan mengambil keputusan.
3. Gaya Kepemimpinan Delegatif
Pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahan dengan agak lengkap. Dengan demikian bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemimpin tidak peduli cara bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan pekerjaannya, sepenuhnya diserahkan kepada bawahan.

Time Budget Pressure

Dalam melaksanakan proses audit auditor seringkali dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan waktu audit, auditor dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan melakukan efisiensi dalam biaya dan waktu. Akibat tuntutan tersebut, menyebabkan timbulnya tekanan dalam waktu atau yang biasa disebut *time pressure*. *Time pressure* memiliki dua dimensi, yaitu *time budget pressure* (keadaan di mana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat) dan *time deadline pressure* (kondisi di mana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya (Herningsih, 2001 dalam Lautania, 2011)

Time budget pressure adalah suatu keadaan ketika auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun (Suprianto, 2009 dalam Pamudi & Badera, 2017). Tekanan anggaran waktu audit terjadi pada saat satuan kerja audit mengalokasikan sejumlah waktu audit yang sedikit yang digunakan oleh auditor untuk menyelesaikan prosedur audit tertentu (Margheim et al. 2005 dalam Marganingsih & Martani 2010).

Time budget merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan, mengingat dalam kondisi normal, estimasi penyediaan jumlah waktu yang dialokasikan untuk tugas-tugas spesifik dalam suatu audit harus tersedia karena hal tersebut dijadikan dasar untuk estimasi biaya audit, untuk alokasi pekerjaan karyawan dan untuk evaluasi kinerja auditor. Akibat waktu yang telah ditetapkan untuk penugasan tidak cukup, maka auditor akan bekerja di bawah tekanan waktu sehingga pekerjaannya akan dilakukan lebih cepat, menyebabkan kemungkinan mengabaikan beberapa proses audit dan hanya menyelesaikan yang penting- penting saja sehingga akan menghasilkan kinerja yang buruk dan mempengaruhi juga hasil kerja audit (Cook and Kelly, 1991 dalam Lautania, 2011).

Apabila waktu yang di rencanakan atau di atur untuk melakukan audit dirasa tidak cukup, maka auditor akan bekerja di bawah tekanan anggaran waktu yang lebih ketat. Yang di takutkan akan mempengaruhi kinerja auditor, seperti tidak fokus dalam bekerja, kelelahan, lalai, hingga kemungkinan terburuk yaitu tidak melakukan proses atau tahapan-tahapan penting yang seharusnya dilakukan karena sudah di tekan waktu.

Time budget pressure menyebabkan kondisi auditor tertekan sehingga auditor cenderung berperilaku dengan dua cara, yaitu fungsional yang ditunjukkan dengan menggunakan teknik audit yang efisien dan disfungsional yang ditunjukkan dengan melanggar standar dan prinsip auditor yang dapat menurunkan kualitas audit (Anggreni & Rasmini, 2017).

Kinerja Auditor

Kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok (Mangkunegara, 2005:15 dalam Trisaningsih, 2007).

Karakteristik yang menjadi pembeda antara kinerja auditor dengan kinerja manajer adalah pada output atau hasil yang dihasilkan.

Menurut (Mangkunegara 2017:9 dalam Fajrin & Susilo, 2018) menjelaskan bahwa “kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Menurut (Trinaningsih, 2007), kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut (Mulyadi,1998 dalam Trinaningsih, 2007) pengertian kinerja auditor adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan pemeriksaan (examination) secara obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah

laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.

Menurut (Hanna & Firnanti, 2013) kinerja auditor merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seorang auditor yang melakukan pekerjaannya dalam pemeriksaan laporan keuangan, dan menjadi suatu pengukuran apakah hasil kerja seorang auditor tersebut sudah baik ataupun buruk. Kinerja auditor menurut (Pamudi & Badera, 2017) merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu.

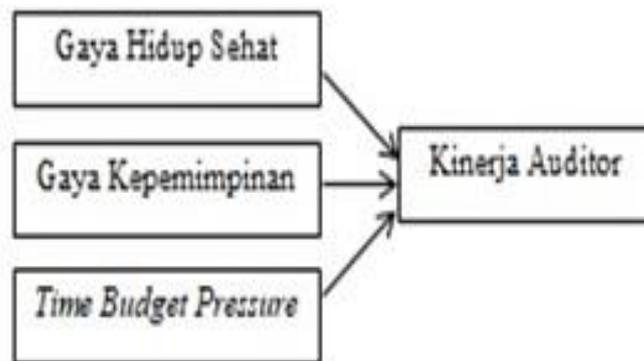
Menurut (Dharma 2004:355 dalam Fajrin & Susilo, 2018) kinerja dapat diukur melalui tiga faktor :

1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.
2. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk kelua Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.
3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

Sedangkan menurut (Robbins, 2006 dalam Setiawan, 2017) indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada lima indikator, yaitu:

1. Kualitas
Kinerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
2. Kuantitas
Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
3. Ketepatan waktu
Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
4. Efektifitas
Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
5. Kemandirian
Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

Model Penelitian



Pengaruh Gaya Hidup Sehat terhadap Kinerja Auditor

Gaya hidup sehat dapat membuat individu menjadi lebih semangat dalam bekerja. Dengan banyak cara, gaya hidup sehat dapat dijalankan untuk membuat individu menjadi lebih siap menjalani hari. Contohnya dengan tidur teratur, makan makanan dengan gizi cukup, tidak terlalu kelelahan, rutin berolah raga dan tidak terlalu stress. Yang dimana nantinya hal-hal ini dapat menunjang semangat kerja individu yang secara otomatis dapat meningkatkan kinerja atau hasil kerja individu tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh peneliti terdahulu yang mendukung apabila menjalankan gaya hidup sehat dapat berpengaruh positif terhadap kinerja (Jones et al., 2010). Meskipun ada pula penelitian lain yang menyatakan hasil bahwa gaya hidup sehat tidak berpengaruh penuh terhadap kinerja (Merawati & Prayati, 2017).

H1: Gaya Hidup Sehat berpengaruh terhadap Kinerja Auditor Pemerintah.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor

Telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang telah meneliti tentang gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Salah satu yang mendukung adalah penelitian yang menghasilkan hasil positif yakni bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor BPK (Merawati & Prayati, 2017) dan didukung pula penelitian yang selaras yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor (Kurniawan, Nadirsyah, & Abdullah, 2017). Dan penelitian yang dilakukan (Trisnarningsih, 2007) pun menghasilkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor. Namun tak terlepas pula dari pro dan kontra penelitian, ada pula peneliti yang hasil penelitiannya adalah gaya kepemimpinan tidak berpengaruh, atau pengaruhnya negatif terhadap kinerja (Widhi & Setyawati, 2015).

H2: Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Auditor Pemerintah.

Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Kinerja Auditor

Banyak penelitian time budget pressure terhadap kinerja auditor. Penelitian sebelumnya telah menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh positif pada kinerja auditor. Artinya, semakin auditor mengalami keterbatasan anggaran waktu, maka kinerjanya semakin baik (Margaringsih & Martani, 2010).

Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa variabel time budget pressure berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Kondisi ini menggambarkan bahwa semakin tinggi time budget pressure, maka kinerja seorang auditor cenderung semakin rendah (Anggreni & Rasmini, 2017). Penelitian selanjutnya mendukung hasil dari Anggraeni bahwa hasil membuktikan bahwa time budget pressure memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja auditor internal pada PT. Nindya Karya Persero Regional IV. Kinerja seorang auditor akan ikut dipengaruhi oleh tekanan anggaran waktu. Alokasi waktu yang baik akan mengarahkan pada suatu kinerja yang lebih baik dan hasil yang lebih baik pula, begitu juga sebaliknya (Pamudi & Badera, 2017).

H3: Time Budget Pressure berpengaruh terhadap kinerja Auditor Pemerintah..

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah Auditor Pemerintah. Sampel pada penelitian ini adalah Auditor Pemerintah pada Provinsi Bangka Belitung. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode convenience sampling yaitu pengambilan sample yang mudah yang merupakan pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikannya. Metode pemilihan sampel ini dipilih untuk mengantisipasi apabila tidak mendapat jawaban yang diinginkan dari responden tersebut. Dan juga agar data yang terkumpul dapat memenuhi kriteria untuk pengolahan data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan dua metode, yakni; metode penelitan pustaka dan metode penelitian lapangan.

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, koefisien determinasi (R²), uji hipotesis (uji t dan uji F) dan analisis regresi berganda. Analisis dan uji hipotesis menggunakan persamaan substruktur:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Penelitian ini dilaksanakan pada delapan insitusi yang ada di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh gaya hidup sehat, gaya kepemimpinan dan time budget pressure terhadap kinerja auditor pemerintah (studi empiris pada auditor pemerintah di Provinsi Bangka Belitung). Alasan mengapa peneliti memilih melakukan penelitian di Provinsi Bangka Belitung adalah peneliti ingin mengetahui dan menguji bagaimana kinerja Auditor Pemerintah di Provinsi Bangka Belitung.

Delapan institusi ini terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bangka Belitung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bangka Belitung, Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Inspektorat Kabupaten Bangka, Inspektorat Kabupaten Bangka Barat, Inspektorat Kabupaten Bangka Selatan, dan Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah. Dari tujuh institusi tersebut diperoleh 134 reponden yang merupakan auditor pemerintah.

PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Penelitian statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dapat dilihat dari maksimum, minimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi (Ghozali, 2018:19). Pada instrumen penelitian ini akan menggambarkan nilai dari hasil pengujian statistik deskriptif antara variabel Gaya Hidup Sehat, Gaya Kepemimpinan dan Time Budget Pressure Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat dari tabel diatas.

Descriptive Staitsitics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KA	134	27	58	44.07	6.211
GHS	134	31	60	44.68	5.734
GK	134	29	60	47.24	6.351
TPB	134	24	60	38.49	6.937
Valid N (listwise)	134				

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah responden (N) yang valid dan dapat diproses lebih lanjut sebanyak 134 responden. Nilai minimum menunjukkan hasil akumulasi paling rendah dari masing-masing jawaban responden pada tiap variabel, sedangkan nilai maksimum menunjukkan nilai akumulasi tertingginya. Mean (nilai rata-rata) menunjukkan nilai rata-rata keseluruhan jawaban pada setiap elemen variabel dan standar deviasi pada penelitian ini digunakan untuk menilai tingkat dispersi atau persebaran rata-rata atas jawaban dari seluruh responden.

Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa pada variabel kinerja auditor minimum jawaban responden sebesar 27 dan nilai maksimum sebesar 58 dengan rata-rata jawaban sebesar 44,07 dan standar deviasi sebesar 6,211. Pada variabel gaya hidup sehat menunjukkan minimum jawaban responden sebesar 31 dan nilai maksimum sebesar 60 dengan nilai rata-rata jawaban sebesar 44,68 dan standar deviasi sebesar 5,734. Pada variabel gaya kepemimpinan minimum jawaban responden sebesar 29 dan jawaban maksimum sebesar 60 dengan rata-rata jawaban sebesar 47,24 dan standar deviasi sebesar 6,351. Pada variabel time budget pressure minimum jawaban responden sebesar 24 dan jawaban maksimum sebesar 60 dengan rata-rata jawaban sebesar 38,49 dan standar deviasi jawaban sebesar 6,937.

Uji Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dalam uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal, namun jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal.

Tabel 4.11
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		134
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.640016
Most Extreme Differences	Absolute	.16
	Positive	.044
	Negative	-.032
Test Statistic		.044
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dalam uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal, namun jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal.

Tabel 4.11 menunjukkan nilai angka Asymp. Sig. sebesar 0,2 yang dimana nilai tersebut >0,05 sehingga menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini dikatakan normal dan lulus uji normalitas.

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas dapat dilihat dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen.

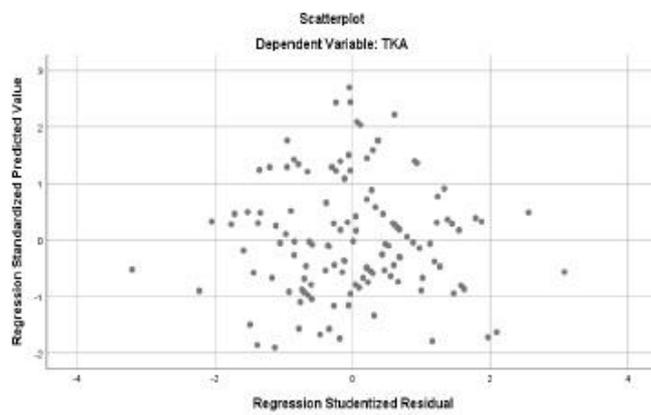
Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
GHS	.780	1.281
GK	.806	1.240
TPB	.954	1.048

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai tolerance mendekati angka 1 dan nilai variance inflation factor (VIF) disekitar angka 1. Dapat dikatakan gaya hidup sehat mempunyai nilai tolerance 0,780 dan nilai VIF 1,281, gaya kepemimpinan mempunyai nilai tolerance 0,806 dan nilai VIF 1,240, time budget pressure memiliki nilai tolerance 0,954 dan nilai VIF 1,048. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolinieritas karena nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF (variance inflation factor) di bawah 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:137). Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil Scatterplot dapat dilihat pada gambar berikut.



Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:137). Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil Scatterplot dapat dilihat pada gambar diatas.

Dalam grafik scatterplot di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Dengan demikian dapat dikatakan model regresi layak digunakan (Ghozali, 2018:139).

Uji Adjusted R Square

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Tabel 4.13 dibawah ini menyajikan hasil uji koefisiensi determinasi untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Hasil Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.665 ^a	.442	.429	4.693

a. Predictors: (Constant), TPB, GK, GHS

a. Dependent Variable: KA

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,665. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel gaya hidup sehat, gaya kepemimpinan, dan time budget pressure memiliki hubungan yang kuat. Tabel 4.13 juga menunjukkan bahwa nilai koefisien

determinasi (R Square) yakni sebesar 0,429. Nilai inmenunjukkan bahwa variabel kinerja auditor dapat dijelaskan oleh variabel gaya hidup sehat, gaya kepemimpinan dan time budget pressure sebesar 42,9%. Sedangkan sisanya sebesar 57,1% dijelaskan oleh faktor-faktor atau variabel diluar penelitian ini misalnya dapat berupa komitmen organisasi, motivasi (Marganingsih dan M, 2010).

Uji Statistik F

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan sudah signifikan. Apabila nilai signifikansi <0,05, maka dapat dinyatakan model yang digunakan signifikan. Di bawah ini merupakan hasil dari uji statistik F untuk penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 14
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2267.797	3	755.932	34.319	.000 ^b
Residual	2863.457	130	22.027		
Total	5131.254	133			

a. Dependent Variable: KA

b. Predictors: (Constant), TPB, GK, GHS

Sumber: Data Primer yang Diolah,2019

Tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan pada uji statistik F ini sebesar 0,000 dimana nilai tersebut berarti <0,05 sehingga model penelitian yang digunakan dapat dinyatakan sudah fit dan signifikan. Ini berarti variabel gaya hidup sehat, gaya kepemimpinan, time budget pressure secara simultan mempengaruhi variabel kinerja auditor.

Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial menerangkan variabel dependen yang dapat di lihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.15, jika nilai signifikan <0,05 maka Ha diterima, sedangkan jika nilai signifikan >0,05 maka Ha ditolak (Ghozali, 2018:66).

Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.651	4.001		1.162	.247
	GHS	.418	.080	.386	5.204	.000
	GK	.187	.071	.191	2.615	.010
	TPB	.310	.060	.346	5.160	.000

a. Dependent Variable: KA

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, variabel gaya hidup sehat, gaya kepemimpinan, dan time budget pressure menunjukkan nilai <0,05 yang menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja auditor. Sehingga dapat diperoleh persamaan model sebagai berikut:

$$\text{Koefisien Determinasi } Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y = Kinerja Auditor

X1 = Gaya Hidup Sehat

X2 = Gaya Kepemimpinan

X3 = Time Budget Pressure

e = Standar Error

Pengaruh Gaya Hidup Sehat terhadap Kinerja Auditor

Hasil uji hipotesis pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi pada variabel gaya hidup sehat sebesar 0,00. Hal ini berarti penelitian ini mendukung hipotesis pertama (H1), karena tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel gaya hidup sehat $<0,05$.

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regresi berganda pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh gaya hidup sehat terhadap kinerja auditor. Hasil uji statistik t dari metode tersebut menunjukkan bahwa gaya hidup sehat memiliki tingkat signifikan sebesar 0,00 atau dapat dikatakan nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) didukung. Gaya hidup sehat yang dijalankan auditor yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti, tidur tepat waktu, tidak terlalu banyak mengonsumsi makanan cepat saji, tidak mengonsumsi kopi terlalu banyak, tidak merokok, tidak minum minuman keras, juga dengan raji berolah raga. Jika auditor dapat mengatur pola dan gaya hidupnya dengan baik, nantinya akan berdampak pada kesehatan auditor itu sendiri. Auditor yang sehat juga tentunya akan memiliki keadaan tubuh yang baik dan dapat lebih semangat dalam bekerja. Auditor yang semangat akan memiliki kinerja yang baik dalam bekerja. Dapat diartikan pula dalam penelitian ini gaya hidup sehat dapat mempengaruhi kinerja seorang auditor yang menjadi responden di dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jones et al., 2010) yang menunjukkan bahwa gaya hidup sehat berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh (Rizkia, 2012 dalam Merawati & Prayati, 2017) yang hasil penelitiannya juga menyatakan bahwa gaya hidup sehat berpengaruh terhadap kinerja. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Merawati & Prayati, 2017) yang menyatakan bahwa gaya hidup sehat tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor

Hasil uji hipotesis pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi pada variabel gaya kepemimpinan sebesar 0,01. Hal ini berarti penelitian mendukung hipotesis kedua (H2), karena tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel gaya kepemimpinan $<0,05$.

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regresi berganda pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor. Hasil uji statistik t dari metode tersebut menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,01 atau dapat dikatakan nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) didukung. Seorang pemimpin yang memiliki gaya atau cara memimpin yang baik akan disenangi dan disegani oleh para bawahannya. Apabila para pemimpin disegani oleh bawahan, maka apa yang dikatakan atau di perintahkan oleh pemimpin akan dijalankan dengan baik oleh bawahannya. Perintah atau gaya memimpin yang jelas akan mudah diserap dan dijalankan dengan baik oleh para bawahannya. Pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan baik, akan mengarahkan para bawahan untuk dapat mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan baik. Pimpinan auditor yang berkinerja baik, akan mengarahkan bawahannya untuk memiliki kinerja seperti yang ia miliki agar tujuan organisasi tercapai dengan baik. Dapat diartikan pula dalam penelitian ini gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja seorang auditor yang menjadi responden di dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang menghasilkan hasil positif yakni bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor BPK (Merawati & Prayati, 2017) dan didukung pula penelitian yang selaras yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor (Kurniawan, Nadirsyah, & Abdullah, 2017). Penelitian yang dilakukan (Trisnaningsih, 2007) pun menghasilkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor.

Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Kinerja Auditor

Hasil uji hipotesis pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi pada variabel time budget pressure sebesar 0,00. Hal ini berarti penelitian mendukung hipotesis kedua (H3), karena tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel gaya kepemimpinan $<0,05$.

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regresi berganda pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh time budget pressure terhadap kinerja auditor. Hasil uji statistik t dari metode tersebut menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,00 atau dapat dikatakan nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) didukung. Tekanan anggaran waktu yang diatur dengan sedemikian rupa dengan cara dan pola yang baik akan membentuk auditor menjadi individu yang taat akan aturan dan jadwal anggaran yang telah dibuat. Auditor yang telah dapat menjalankan anggaran waktu yang telah disusun dengan baik. Auditor akan dapat mengerjakan tugasnya dengan lebih tertata dalam hal pembagian waktu. Mengerjakan tugas dengan waktu yang telah tertata dapat meningkatkan kinerja auditor agar menjadi lebih baik lagi. Dapat diartikan pula dalam penelitian ini time budget pressure dapat mempengaruhi kinerja seorang auditor yang menjadi responden di dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya telah menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh positif pada kinerja auditor. Artinya, semakin auditor mengalami keterbatasan anggaran waktu, maka kinerjanya semakin baik (Marganingsih & Martani, 2010).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Gaya hidup sehat berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jones et al (2010) dan Rizkia, 2012 dalam Merawati & Prayati (2017).
2. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Merawati & Prayati (2017), Kurniawan, Nadirsyah, & Abdullah (2017), dan Trisnaningsih (2017).
3. Time budget pressure berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marganingsih & Martani (2010).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, N. W. D., & Rasmini, N. K. . Pengaruh Pengalaman Auditor Dan Time Budget Pressure Pada Professionalisme Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Auditor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18, 145–175. 2017.
- Azen, I. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes* 50, 179–211. 1991.
- Candra, I. W., & Badera, I. D. N. Pengaruh Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan Demokratis, Etika Profesi Dan pengalaman Auditor pada Kinerja Auditor. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 212, 2302–8556. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p13>. 2017.
- Ghozali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2018.
- Hanna, E., & Firnanti, F. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Auditor. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 15(1), 13–28. 2013.
- <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/auditor-dan-fungsionalauditor-pemerintah-46> Kamis 21 November 2019 pukul 14.30.

- <https://lifestyle.bisnis.com/read/20190711/106/1122977/setahun-kematian-karena-konsumsi-rokok-di-indonesia-lebih-dari-230.000> diakses Kamis 30 Januari 2020 pukul 15.26.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50689915> diakses Kamis 30 Januari 2020 pukul 15.32.
- <http://www.bpkp.go.id/konten/1714/pertanyaan-yang-sering-diajukan> Kamis 21 November 2019 pukul 13.10.
- <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3616779/7-tips-gaya-hidup-sehatdari-para-dokter> diakses Kamis 21 November 2019 pukul 17.08.
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/472576/5-pemimpin-perusahaan-terburuk-di-2012> diakses Kamis 21 November 2019 pukul 15.56.
- Fajrin, I. Q., & Susilo, H. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Karyawan Pabrik Gula Kebon Agung Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 61(4), 117–124. 2018.
- Jones, A., Norman, C. S., & Wier, B. Healthy lifestyle as a coping mechanism for role stress in public accounting. *Behavioral Research in Accounting*, 22(1), 21–41. <https://doi.org/10.2308/bria.2010.22.1.21>. 2010.
- Kurniawan, D. S. A., Nadirsyah., & Abdullah, S., Pengaruh Independensi Auditor, Integritas Auditor, Profesional Auditor, Etika Profesi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor Di BPK Perwakilan Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 6(3), 49–57. 2017.
- Kusmaedi, N. Pembelajaran Gaya Hidup Sehat Menuju Tingkat Sehat Prima Terhadap Sepanjang Hayat. *Cakrawala Pendidikan*, (2), 323–335. <https://doi.org/10.21831/cp.v5i2.1566>. 2012.
- Lautania, M. F. Pengaruh Time Budget Pressure, Locus Of Control Dan Perilaku Disfungsional Audit Terhadap Kinerja Auditor (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Indonesia). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 4(1), 1–22. 2011.
- Marganingsih, A., & Martani, D. Antecedent Komitmen Organisasi Dan Motivasi: Konsekuensinya Terhadap Kinerja Auditor Intern Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 79–108. <https://doi.org/10.21002/jaki.2010.05>. 2010.
- Merawati, L. K., & Prayati, N. P. I. Dewi. Healthy Lifestyle , Role Stressor Dan Gaya Kepemimpinan : Studi Empiris Kinerja Auditor Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis Volume*, 2(1). 2017.
- Obella, Z., & Adliyani, N. Pengaruh Perilaku Individu terhadap Hidup Sehat The Effect of Human Behavior for Healthy Life. *Majority*, 4(7), 109–114. 2015.
- Otley, D. T., & Pierce, B. J. Auditor time budget pressure: Consequences and antecedents. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 9(1), 31–58. <https://doi.org/10.1108/09513579610109969>. 1996.
- Pamudi, U., & Badera, I. D. N. Time Budget Pressure, Locus Of Control dan Good Governance Sebagai Prediktor Kinerja Auditor Internal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21, 2367–2394. 2017.
- Prabandari, Y. S. Penggalan Riwayat dan Nasihat Tentang Gaya Hidup Sehat oleh Dokter Pelayanan Primer. *Kesmas: National Public Health Journal*, 8(5), 221. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v8i5.388>. 2013.

- Setiawan, A. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja. *Agora*, 5(3), 1–7. 2017.
- Suharsaputra, Uhar. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan”. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.
- Trafimow, D. The Theory of Reasoned Action A Case Study of Falsification in Psychology. *THEORY & PSYCHOLOGY*, 19(August 2009), 501–517. <https://doi.org/10.1177/0959354309336319>. 2015.
- Trisnaningsih, S. Independensi auditor dan komitmen organisasi sebagai mediasi pengaruh pemahaman good governance, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1–56. <https://doi.org/10.1590/S0104-14282003000200006>. 2007.
- Widhi, S. N., & Setyawati, E. Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi Dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Empiris Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 19(1), 64–79. 2015.
- Wikamorys, D. A., & Rochmach, T. N. Application Of The Theory Of Planned Behavior In Generating Patients Intention To Undergo Cataract Surgery. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 5(1), 32–40. 2017.

**PERANAN IMPLEMENTASI *EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM*
DALAM MEMODERASI PENGARUH *INTELLECTUAL CAPITAL* TERHADAP
KINERJA PERUSAHAAN**

Dita Ayuningtias¹, Yuyu Putri Senjani^{2*}

^{1,2}UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

ABSTRAK

Pendahuluan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan penerapan ESOP dalam memoderasi pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan. **Latar Belakang Masalah:** Adanya ketidaksesuaian upah yang diterima oleh para buruh di Indonesia yang ditandai dengan demo buruh setiap tahunnya. Selain itu, konflik kepentingan yang sering terjadi pada perusahaan dapat menurunkan komitmen karyawan terhadap perusahaan yang dapat berimbas pada kinerja perusahaan. **Kontribusi:** Penelitian ini menggunakan ESOP sebagai variabel pemoderasi pada pengaruh *intellectual capital* dan ketiga komponennya terhadap kinerja perusahaan. **Metode Penelitian:** Variabel independen dalam penelitian ini adalah *intellectual capital* yang terdiri dari *employed capital*, *human capital*, dan *structural capital*, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja perusahaan. Pengaruh antara variabel tersebut dimoderasi oleh ESOP. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel dengan Eviews. **Hasil:** *Intellectual capital*, *employed capital*, dan *human capital* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. *Structural capital* terbukti tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. ESOP berhasil memoderasi pengaruh *intellectual capital* dan *human capital* terhadap kinerja perusahaan namun bersifat memperlemah. Sedangkan, *employed capital* dan *structural capital* belum mampu dimoderasi oleh ESOP dalam memengaruhi kinerja perusahaan. **Kesimpulan:** ESOP belum mampu menarik minat karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya.

INFO ARTIKEL

Article History:

Received September 8th
2020

Received in revised from
September 12th 2020

Accepted September
2020

Keywords:

Intellectual capital,
employed capital, *human capital*,
structural capital, *employee stock ownership program*,
kinerja perusahaan

* Corresponding Author at Department of Sharia Accounting, Faculty of Economics and Islamic Business, UIN Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, Indonesia.
E-mail address: ayuningtias10@gmail.com (author#1), yuyu.senjani@uin-suka.ac.id (author#2)

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,88 persen hingga mencapai 5,17 persen pada tahun 2018 (BPS, 2019). Peningkatan perekonomian ini memunculkan perusahaan-perusahaan baru yang saling bersaing. Langkah yang dapat ditempuh perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha dalam menghadapi ketatnya persaingan bisnis, yaitu dengan meningkatkan kinerjanya (Hutanelontina dan Saputra, 2016). Setiap perusahaan harus dapat bertahan dalam pasar dengan mengandalkan keunggulan yang dimilikinya, salah satunya dengan mempertahankan kinerjanya secara maksimal (Dewi & Candradewi, 2018).

Kinerja perusahaan merupakan gambaran hasil kerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Menurut Laudya & Handoko (2019) Kinerja perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai pencapaian perusahaan pada suatu waktu yang juga menunjukkan kualitas perusahaan. Kinerja perusahaan menjadi perhatian bagi investor untuk menilai kondisi perusahaan di masa kini dan juga prospek perusahaan di masa depan (Dharmala dan Wirawati, 2019). Investor akan memilih perusahaan dengan kinerja yang baik dengan melihat profitabilitasnya. Munawir (2010) menyebutkan bahwa perusahaan akan mampu bertahan dan berkembang dalam menghadapi persaingan pasar jika profitnya semakin tinggi.

Perusahaan sering mengalami konflik kepentingan antara para pemegang saham dengan manajemen. Konflik tersebut disebabkan adanya asimetri informasi antara kedua belah pihak karena pihak manajemen memiliki lebih banyak informasi yang berpotensi digunakan untuk keuntungan pribadi. Dampak dari asimetri informasi yang terjadi adalah pencapaian kinerja perusahaan yang dapat terganggu. Selain itu, konflik tersebut juga dapat menurunkan kinerja perusahaan karena mengurangi rasa percaya pemegang saham terhadap pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. Pemilik perusahaan juga akan lebih mengutamakan kepentingannya dalam meningkatkan laba perusahaan dan mengabaikan keinginan manajemen sebagai pengelola (Einsenhart, 1989).

Dalam rangka menghindari konflik kepentingan yang sering terjadi di dalam perusahaan, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi yang efektif yaitu dengan memberikan *reward*. Handoko (1995) menyebutkan bahwa *reward* dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kinerja karyawan sehingga mempersingkat pekerjaan yang ditanggung oleh karyawan. *Reward* juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. *Reward* merupakan penghargaan yang ditujukan untuk memotivasi seseorang dalam mencapai prestasi kerja, baik berupa uang, barang, atau penghargaan lainnya yang diberikan atas prestasi yang dicapai. Sehingga, dapat dikatakan bahwa *Reward* dapat memotivasi karyawan untuk memacu diri agar mencapai prestasi (Manullang, 1996).

Pada umumnya, setiap pemilik perusahaan selalu menginginkan pendapatan yang kian meningkat di setiap tahunnya dengan menekan biaya semaksimal mungkin. Hal ini dapat mempengaruhi besarnya gaji karyawan. Menurut Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dilansir dalam liputan6.com, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat tidak sebanding dengan upah yang diterima karyawan. Hasil dari pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan manfaatnya oleh para pengusaha saja. Salah satu dampak yang terlihat adalah tuntutan mengenai kenaikan gaji yang selalu diajukan oleh para buruh di Indonesia dalam setiap hari buruh internasional (*May Day*).

Komitmen karyawan dalam bekerja dapat dibentuk oleh perusahaan, salah satunya dengan pemberian kompensasi atas waktu dan tenaga yang telah diberikan. Kompensasi dapat berwujud finansial seperti gaji, bonus, berbagai tunjangan, ataupun hak kepemilikan saham bagi karyawan yang berprestasi yang biasa disebut dengan *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) di Indonesia (Wiratma dan Kristanto 2010). Opsi yang mengikutsertakan pegawainya diharapkan dapat menjadi suatu stimulus positif untuk meningkatkan kinerja perusahaan dibandingkan suatu bonus kas, karena nilai sebenarnya dari suatu opsi akan

ditentukan oleh kinerja perusahaan di masa mendatang. Menurut Deegan (2014), dengan memberikan opsi saham pada karyawan dapat memberikan kinerja yang optimal bagi perusahaan. Hadiah atau kompensasi ini dapat menyelaraskan tujuan pemilik dan pengelola perusahaan.

Nilai-nilai dalam Islam menghendaki para majikan memperlakukan buruh seperti anggota keluarganya sendiri. Pernyataan ini secara tidak langsung menuntut kepada para pemilik modal/perusahaan untuk memperlakukan para karyawannya dengan rasa hormat dan kasih sayang serta menjamin kesejahteraan mereka (Chapra 2006). Perusahaan dapat memberikan upah yang ideal dan manusiawi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan pelatihan agar tercipta hubungan yang harmonis dengan karyawan.

Pemberian ESOP sebagai *reward* bagi karyawan merupakan bentuk kompensasi yang berguna untuk menyejahterakan karyawan. Zhu, *et al.*, (2013) mengemukakan bahwa pemberian ESOP mampu menjadikan karyawan sebagai bagian dari perusahaan. Kepemilikan saham oleh karyawan juga menandakan bahwa kedudukan karyawan setara dengan para pemegang saham. Menurut Bhima Yudhistira, analis ekonomi dari *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), penerapan ESOP dalam suatu perusahaan menandakan bahwa perusahaan memperlakukan karyawannya. Hal tersebut merupakan stimulus yang positif bagi karyawan untuk menumbuhkan semangat dalam bekerja sekaligus memperoleh keuntungan atas saham yang dimiliki, namun penerapan ESOP sebagai kompensasi belum banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Konsep ESOP secara hukum juga telah tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 43 ayat 3. Namun, pengaturan berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ESOP belum diatur secara lebih rinci di Indonesia. Peraturan penerapan program ESOP di Indonesia belum optimal dalam pelaksanaannya, hanya emiten perbankan saja yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan bagi perusahaan lain, penerapan program ini masih bersifat sukarela. Jumlah investor yang tercatat oleh BEI sebesar 1,7 juta melalui *single investor identification* (SID) dan program ini telah menyumbang sebesar 35.000 saham dari kemitraan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Perkembangan dunia bisnis saat ini ditandai dengan adanya perubahan model bisnis yang mulanya berbasis tenaga kerja berangsur menuju model dengan basis pengetahuan (Suwarjuwono dan Kadir, 2003). *Intellectual capital* merupakan gambaran dari kemampuan pengelolaan pengetahuan perusahaan yang diyakini dapat menarik investor atau kreditor. Eksistensi dari *Intellectual capital* dapat digunakan oleh manajemen dalam meningkatkan kualitas perusahaan sehingga memiliki keunggulan di mata konsumen (Astuti, 2004). Strategi yang dapat dilakukan berupa pengembangan sumber daya yang dimiliki perusahaan, termasuk dengan cara meningkatkan kemakmuran karyawan melalui pemberian ESOP. Dengan memberikan ESOP kepada karyawan berarti perusahaan telah memedulikan sumber daya manusianya (Dewi dan Hatane, 2015). Oleh karena itu, investasi terhadap *intellectual capital* tentunya diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Public (1998), dalam jurnal "*Measuring The Performance Of Intellectual Potential In Knowledge Economy*" menyebutkan VAIC (*Value Added Intellectual Capital*) sebagai metode untuk melakukan pengukuran terhadap modal intelektual perusahaan. Metode ini adalah rangkuman dari *Capital Employed*, *Human Capital*, dan *Structural Capital*. Komponen VAIC tersebut digunakan untuk mempermudah dalam menghitung kandungan nilai dari seluruh aset perusahaan, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujudnya. Metode ini relatif mudah karena diwujudkan dalam bentuk rumus yang sederhana dan dapat diperoleh dari akun-akun yang ada dalam laporan keuangan perusahaan (Ghozali dan Hatane, 2014).

Penelitian mengenai hubungan *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan telah diteliti oleh Bontis *et.al.*, (2016) di Serbia. Penelitian tersebut menggunakan pengukuran

VAIC, diantara berbagai komponen yang dimiliki dalam *intellectual* perusahaan, ditemukan bahwa kinerja perusahaan hanya dipengaruhi oleh *employed capital*nya. Sedangkan hasil yang sama juga dikemukakan oleh Nassar (2018) dalam penelitiannya terhadap perusahaan di Turki. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *employed capital* mempunyai pengaruh yang negatif, namun secara simultan *intellectual capital* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kinerja dalam penelitian tersebut diukur dengan kinerja pasar, kinerja produktivitas, serta kinerja keuangannya.

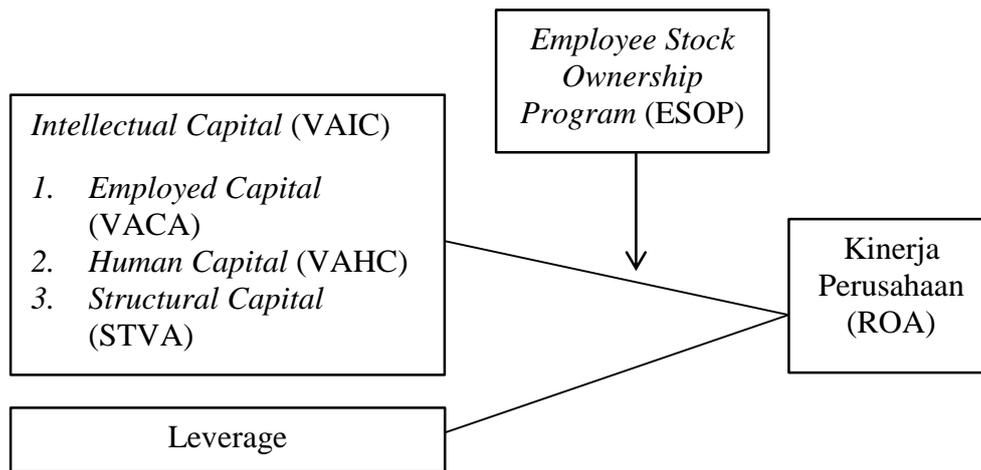
Penelitian yang berkaitan dengan *intellectual capital* juga telah dilakukan di Indonesia, yaitu penelitian Pohan, *et al.*, (2018) pada perusahaan yang terdaftar di *Indonesain Capital Market Directory* (ICDM) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan modal intelektual yang diprosikan dengan IC (*Intellectual Capital*) berpengaruh secara signifikan terhadap 4 pengukuran kinerja perusahaan, yaitu M/B, ROA, ATO dan EPS. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Margaretha dan Rakhman (2006), Ting dan Lean (2009), Herdyanto dan Nasir (2013), Sany dan Hatane (2014), Gozali dan Hatane (2014), serta Ismiyanti, *et al.*, (2017) yang menunjukkan pengaruh positif dari *intellectual capital* dan secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Andriana (2014) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu menemukan bahwa *intellectual capital* yang diuji dengan teknik analisis regresi berganda tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Daud dan Amri (2008) juga sejalan dengan hasil tersebut.

Berdasarkan ketidakkonsistenan penelitian terdahulu, penelitian ini tertarik menggunakan *intellectual capital* untuk duji kembali pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini berkontribusi dengan menambahkan ESOP sebagai variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan. Program kepemilikan saham bagi karyawan merupakan strategi yang dapat diterapkan sebagai langkah untuk mendorong kenaikan produktivitas, terutama dalam hal modal manusianya (Asyik, 2013). Penelitian ini sejalan dengan Zhu, *et al.*, 2013 yang menemukan bahwa kinerja yang lebih baik ditunjukkan oleh perusahaan yang memberikan ESOP, sedangkan perusahaan yang tidak menggunakan ESOP mempunyai kinerja yang lebih rendah.

Sebagian besar penelitian mengenai ESOP menggunakan objek perusahaan sektor keuangan dan manufaktur. Penelitian ini tertarik menggunakan perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tahun 2014-2018 sebagai objek penelitian. ISSI merupakan salah satu Indeks Syariah di Bursa Efek Indonesia yang merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. ISSI dipilih sebagai representasi atas potensi pengembangan pasar saham syariah, mengingat Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Investasi saham syariah mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pangsa pasar di industri keuangan syariah.

METODE

Untuk menganalisis peranan pengimplementasian *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) dalam memoderasi *Intellectual Capital*, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *intellectual capital*, *employed capital*, *human capital*, dan *structural capital* dengan ESOP sebagai variabel moderasi dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Sedangkan, variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan. Data penelitian diperoleh dari *annual report* perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, maka diperoleh sampel sebanyak 10 perusahaan dengan periode pengamatan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sehingga total keseluruhan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50. Berikut daftar perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini:

Tabel 1. Daftar Sampel Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 2014-2018

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
2.	APII	Arita Prima Indonesia Tbk.
3.	APLN	Agung Podomoro Land Tbk.
4.	BMTR	Global Mediacom Tbk.
5.	HRUM	Harum Energy Tbk.
6.	KPIG	MNC Land Tbk.
7.	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.
8.	SKBM	Sekar Bumi Tbk.
9.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.
10.	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk.

Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dengan teknik analisis data panel. Model regresi yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Model 1 :

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta Z + \beta X_1 Z + LEV + \varepsilon$$

Model 2 :

$$Y = \alpha + \beta X_{1a} + \beta X_{1b} + \beta X_{1c} + \beta Z + \beta X_{1a}Z + \beta X_{1b}Z + \beta X_{1c}Z + LEV + \varepsilon$$

Pembahasan

Penelitian ini membahas mengenai peranan implementasi ESOP dalam memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pembahasan dalam penelitian ini disajikan dalam dua bagian. Bagian pertama membahas pengaruh VAIC terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan bagian kedua membahas peranan ESOP dalam memoderasi pengaruh dari VAIC dan komponennya yaitu VACA, VAHC, dan STVA terhadap kinerja perusahaan.

Pengaruh VAIC terhadap ROA

Intellectual capital adalah aset milik perusahaan yang secara wujud tidak nyata dan dapat diciptakan dengan cara memanfaatkan seluruh asetnya semaksimal mungkin. *Intellectual capital* dalam penelitian ini diukur dengan *Value Added Intellectual Capital* (VAIC). Hasil pengujian menunjukkan bahwa VAIC memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 yaitu lebih kecil dari batas nilai kritis ($0.0000 < 0.05$), dengan nilai koefisien positif sebesar 1.573329. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_1 diterima dan menolak H_0 , maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *intellectual capital* maka kinerja perusahaan akan semakin meningkat.

Penilaian kinerja perusahaan saat ini hanya mengacu pada laba yang dapat dilihat dalam laporan keuangan (Hafida, 2012). Adanya pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan membuktikan bahwa aspek pembentuk kinerja tidak hanya sebatas materi saja. Hal ini sesuai dengan *shariah enterprise theory* yang bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan. Dalam bisnis Islam, perusahaan juga bertanggungjawab kepada semua pihak yang berkaitan dengan bisnis perusahaan. Oleh karena itu diharapkan perusahaan dapat mengelola sumber daya perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pengaruh Komponen VAIC terhadap ROA

1. *Employed Capital*

Employed capital merupakan salah satu komponen dari *intellectual capital* yang tercipta dari hubungan perusahaan dengan pihak diluar perusahaan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian penghargaan, hubungan serikat buruh, dan kepercayaan yang dibangun untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Pada penelitian ini, *employed capital* yang diprosikan dengan VACA (*Value Added Capital Employed*) memiliki nilai probabilitas 0.0244 yaitu lebih dari batas nilai kritis ($0.0244 < 0.05$), dengan nilai koefisien positif sebesar 13.99765, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Value Added Capital Employed* (VACA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Hasil dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa *capital employed* atau aset fisik yang ada dalam perusahaan mulai dikelola dengan baik, sehingga mampu menaikkan kualitas kinerja perusahaan. Disisi lain, perusahaan juga telah memperhatikan modal yang berasal dari hubungannya dengan para pelanggan, kreditor, masyarakat, maupun pemerintah. Purwitasari (2011) menyebutkan bahwa pengetahuan manusia yang digambarkan dalam *shariah enterprise theory* merupakan hasil dari refleksi diri dengan memahami tindakan yang dilakukan dalam berhubungan dengan alam, komunikasi dengan sesama objek, serta hubungan manusia dengan penciptanya. Dalam teori tersebut, perusahaan juga memiliki tanggung jawab atas amanah yang diberikan Sang Pencipta untuk mengelola kekayaan yang dimilikinya dengan maksimal. Apresiasi dari perusahaan atas usaha karyawan dalam menjalin hubungan dengan mitra bisnis perusahaan ini dapat mendorong efisiensi kinerja bagi perusahaan.

2. *Human Capital*

Human capital merupakan cerminan dari keahlian perusahaan dalam memecahkan masalah melalui pengetahuan dari sumber daya manusianya. *Human capital* akan meningkat jika perusahaan mampu memanfaatkan pengetahuan yang ada pada karyawannya dengan efektif. Pada penelitian ini, *Human Capital* yang diproksikan dengan VAHC (*Value Added Human Capital*) memperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0000 yaitu lebih kecil dari batas nilai kritis ($0.0000 < 0.05$), dengan nilai koefisien positif sebesar 1.215521. Maka dapat disimpulkan bahwa *Value Added Capital Employed* (VACA) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Peningkatan kualitas karyawan melalui berbagai program perusahaan, merupakan salah satu upaya perusahaan dalam menyejahterakan karyawannya. Sesuai dengan *shariah enterprise theory* bahwa perusahaan memiliki tanggungjawab kepada berbagai pihak, salah satunya tanggung jawab kepada sesama manusia yaitu dengan mengupayakan peningkatan kinerja dan kualitas spiritual karyawan (Meutia, 2009 dalam Riska, 2018). Sehingga dalam jangka panjang, karyawan yang berkompeten mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Totanan (2004) menyatakan bahwa sebuah perusahaan akan menghasilkan kinerja yang berbeda jika dikelola oleh orang yang berbeda. Jika sumber daya manusia yang berbeda mengelola aset perusahaan yang sama maka akan menghasilkan kualitas yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aset berwujud perusahaan bersifat pasif tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas yang menciptakan keunggulan perusahaan yang dapat meningkatkan profitabilitas.

3. *Structural Capital*

Structural capital merupakan kemampuan perusahaan dalam menyediakan fasilitas sebagai sarana dalam menunjang keberlangsungan karyawan untuk melaksanakan kerja sehingga dapat menciptakan modal intelektual yang optimal. Pada penelitian ini *Structural Capital* yang diproksikan dengan STVA (*Structural Capital Value Added*) memiliki nilai probabilitas 0.5031 yaitu lebih dari batas nilai kritis ($0.5031 > 0.05$), dan nilai koefisien yang diperoleh memiliki arah negatif sebesar 0.493773 yang artinya bahwa *Structural Capital Value Added* (STVA) tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Hal ini menandakan bahwa pengelolaan sistem yang ada di perusahaan belum terlaksana dengan baik sehingga dapat mengurangi tingkat produktivitas perusahaan. Selain itu, penurunan kinerja perusahaan juga dapat disebabkan kurang optimalnya penerapan suatu sistem yang ada dalam perusahaan meskipun sistem tersebut telah dirancang dengan baik. Sarana dan prasarana yang ada dalam perusahaan jika tidak dirawat dengan baik akan memunculkan biaya perbaikan yang lebih besar, sehingga profitabilitas perusahaan akan berkurang.

ESOP dalam memoderasi pengaruh VAIC, VACA, VAHC, dan STVA terhadap ROA

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa *intellectual capital* yang dimoderasi oleh ESOP memiliki nilai probabilitas 0.0006 yaitu lebih kecil dari nilai kritis ($0.0006 < 0.05$) dan memiliki nilai koefisien dengan arah negatif sebesar 1.449583. Maka dapat disimpulkan bahwa ESOP memperlemah pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan. Semakin baik tingkat *intellectual capital* perusahaan dan semakin baik pengimplementasian ESOP yang dilakukan perusahaan, maka memperlemah kinerja perusahaan.

Pengujian ESOP dalam memoderasi komponen *intellectual capital* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hanya *human capital* saja yang mempunyai pengaruh yang signifikan. Berdasarkan pengujian menggunakan model *random effect*, *human capital* yang diproksikan dengan VAHC yang dimoderasi oleh ESOP mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.0055 atau lebih kecil dari batas kritis ($0.0055 < 0.05$) dan memiliki nilai koefisien dengan arah negatif

sebesar 1.440007. Nilai tersebut membuktikan bahwa ESOP memperlemah pengaruh *human capital* terhadap kinerja perusahaan. Semakin baik tingkat *human capital* yang dimiliki perusahaan dan tingkat pengimplementasian ESOP, maka dapat menurunkan kinerja perusahaan.

Hasil pengujian kedua komponen *intellectual capital* lainnya, yaitu *employed capital* yang diproksikan dengan *Value Added Capital Employed* (VACA) memiliki nilai probabilitas 0.6926 dan *structural capital* yang diproksikan dengan STVA memiliki nilai probabilitas 0.6550. Kedua komponen tersebut mempunyai nilai probabilitas yang lebih dari batas nilai kritis 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ESOP tidak memoderasi *capital employed* dan *structural capital*.

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya bertanggungjawab kepada stakeholders. Dalam konsep enterprise theory dikatakan bahwa harta perusahaan sebenarnya tersimpan hak orang lain. Oleh karena itu, perlu diperlakukan pengakuan atas kontribusi dari setiap pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Kontribusi yang dimaksud dapat berupa modal maupun pengetahuan dalam bentuk keahlian dan kompetensi bekerja. Tujuan pengimplementasian ESOP dalam perusahaan dimaksudkan untuk menampung kemajemukan *stakeholder*. Triyuwono (2003) mengemukakan *enterprise theory* sebagai konsep yang menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak hanya berada pada satu pihak saja. Lebih lanjut, Triyuwono menjelaskan bahwa diversifikasi kekuasaan ekonomi ini direkomendasikan dalam konsep syariah, mengingat dalam ketentuan syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja.

Pengujian pada penelitian ini konsisten dengan penelitian Melinda *et.*, al (2019) yang menjelaskan bahwa pengimplementasian ESOP terbukti memperlemah performa keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio profitabilitasnya. Hal ini disebabkan karena pengimplementasian ESOP pada perusahaan dengan jumlah pemegang saham yang besar dapat menurunkan insentif karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka, karena kinerja keuangan tidak selalu selaras dengan kinerja harga sahamnya. Selain itu, karyawan yang memiliki saham perusahaan juga harus menanggung risiko atas variasi imbal hasil akibat fluktuasi harga saham. Menurut Isbanah (2015) proporsi saham yang diberikan perusahaan kepada karyawan dalam ESOP masih relatif kecil, yaitu rata-rata sebesar 5% dari saham yang ditawarkan. Sehingga kepemilikan saham oleh karyawan masih sebatas kepemilikan minoritas. Peraturan mengenai pengimplementasian ESOP juga masih bersifat *voluntary disclosure*, menyebabkan rendahnya pemahaman karyawan mengenai manfaat dari program ESOP sehingga karyawan kurang tertarik dengan program ini.

Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan dan dimoderasi oleh ESOP. Hasil penelitian ini menemukan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dilihat dari komponennya, hanya *structural capital* yang tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya yang ada dalam perusahaan, terutama yang berkaitan dengan modal manusia dan modal fisiknya dapat mendorong efisiensi kinerja.

Perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mampu menggunakan aset fisiknya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Keunggulan tersebut dapat dicapai apabila pengetahuan yang terkandung dalam setiap sumber daya manusia yang ada di perusahaan dapat dikelola dan dipelihara sehingga menjadi sumber kekuatan bagi perusahaan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas karyawan dan apresiasi bagi karyawan sangat penting dilakukan untuk menciptakan kemakmuran.

Structural capital dalam penelitian ini ditemukan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan karena fasilitas yang ada di perusahaan tidak digunakan untuk memberikan kemudahan bagi karyawannya dalam bekerja. Selain itu, perencanaan, sistem, dan pengelolaan sumber daya struktural dalam perusahaan tidak digunakan secara maksimal sehingga kenaikan kinerja yang menjadi tujuan perusahaan belum dapat dicapai.

Pengimplementasian ESOP sebagai kompensasi bagi karyawan dapat memoderasi pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan terutama komponen *human capital*nya namun bersifat memperlemah. Sedangkan, komponen lain yaitu *employed capital* dan *structural capital* tidak berhasil dimoderasi oleh ESOP. Hal ini disebabkan karena pemberian ESOP belum mampu menarik minat karyawan. Pemberian ESOP bagi karyawan tidak selalu menghasilkan keuntungan, tetapi karyawan juga ikut menanggung risiko kerugian atas penjualan saham di masa mendatang. Selain itu, karena proporsi saham yang diberikan masih bersifat minoritas, sehingga hak suara yang diperoleh karyawan dalam pembuatan keputusan belum kuat. Hal tersebut membuktikan bahwa tujuan pemilik perusahaan dan karyawan sebagai pihak manajemen perusahaan belum mampu diselaraskan.

Referensi

- Andriana, D. (2014). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 251–260.
- Bapepam. (2007). *Kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah*.
- Bontis, N. (1998). Intellectual capital : an exploratory study that develops measures and models. *Management Decision*, 36(2), 63–76.
- Bontis, N., Keow, W. C. C., & Richardson, S. (2000). Intellectual capital and business performance in Malaysian industries. *Journal of Financial Economics*, 1(1), 85–100. [https://doi.org/https://doi.org/10.1108/14691930010324188](https://doi.org/10.1108/14691930010324188)
- Dewanata, P. (2016). The Effect Of Intellectual Capital And Islamicity Performance Index To The Performance Of Islamic Bank In Indonesia 2010- 2014 Periods. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, 7(2), 259–278.
- Dewi, Y. T., & Hatane, S. E. (2004). Peranan Employee Stock Ownership Plan dalam Pengaruh Value Added Intellectual Capital terhadap Financial Performance. *Business Accounting Review*, 3(1), 478–488.
- Hamidah, Ahmad, G. N., & Aulia, R. (2015). Effect Of Intellectual Capital , Capital Structure And Managerial Ownership Toward Firm Value Of Manufacturing Sector Companies Listed In Indonesia Stock Exchange (Idx) Period. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, 6(2), 558–578.
- Herdinata, C. (2007). Analisis penerapan esop (employee stock ownership program) terhadap reaksi pasar dan hubungannya dengan kinerja perusahaan yang go public di bursa efek jakarta. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi VI*, 1–11.
- Herdinata, C. (2012). Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Employee Stock Ownership Program. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(1), 77–85. <http://jurkubank.wordpress.com>
- Hutnaleontina, P. N., & Suputra, D. (2016). Pengaruh Penerapan Employee Stock Option Plan Pada Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 5.6, 6, 1757–1784.
- Isbanah, Y. (2013). Pengaruh Esop , Leverage , And Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Bursa Efek. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 15(1), 28–41. <https://doi.org/10.17970/jrem.15.150103.ID>
- Jafar, T. F., Habbe, A. H., & Mediaty. (2016). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Produktivitas dengan Employee Stock Option Plan sebagai Variabel Moderasi. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*.

- Manurung, E. T. (2018). Meningkatkan Komitmen Karyawan Melalui Employee Stock Ownership Program Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 49–57.
- Ngambi, M. T., & Oloume, F. (2013). Employee Share Ownership And Firm Performance : Evidence From A Sample Of Cameroonian Firms *International Journal of Research In Social Sciences*, 2(3), 48–55.
- Pohan, E. S., Lestari, T., & Ramdhani, D. (2018). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Sektor Teknologi Informasi Dan Jasa). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 103–116. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i2.643>
- Pugh, W. N., Oswald, S. L., & Jahera, J. S. (2000). The Effect of ESOP Adoptions on Corporate Performance : Are there Really Performance Changes? *MANAGERIAL AND DECISION ECONOMICS*, 180, 167–180.
- Pulic, A. (2004). Intellectual capital - does it create or destroy value ? *Measuring Business Excellence*, 8(1), 62–68. <https://doi.org/10.1108/13683040410524757>
- Rachmawati, I. (2013). *Pengaruh penerapan employee stock ownership program (esop) terhadap peningkatan kinerja perusahaan ditinjau dari perspektif ekonomi islam.*
- Saifi, M., & Kurniati, R. A. (2018). Pengaruh Employee Stock Ownership Program (Esop) Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 62(2).
- Sunarsih, N. M., & Dewi, N. P. S. (2018). *Pengaruh Penerapan Employee Stock Option Plan (Esop) Pada Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan.* 13(2), 111–118.
- Ulum, I., Ghozali, I., & Chariri, A. (n.d.). *Intellectual Capital Dan Kinerja Keuangan Perusahaan ; Suatu Analisis Dengan Pendekatan Partial Least Squares.* 19(19), 1–31.
- Wayan, N., Mutiara, A., & Candradewi, M. R. (2018). Pengaruh Employee Stock Ownership Plan , Leverage , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia Pesatnya perkembangan ekonomi di Indonesia , menyebabkan banyak perusahaan ba. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(9), 4774–4802.
- Zhu, Z., Hoffmire, J., Hoffmire, J., & Wang, F. (2013). Employee Stock Ownership Plans and Their Effect on Productivity : The Case of Employee Stock Ownership Plans and Their Effect on Productivity : The Case of Huawei. *International Journal of Bisnis Dan Manajemen Invention*, 2(August), 12–22. www.ijbmi.org
- www.investasi.kontan.co.id diakses pada 30 Desember 2019
- www.libera.id diakses pada 30 Desember 2019
- www.liputan6.com diakses pada 8 Januari 2020

ANALISIS PERBANDINGAN EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN KEMAMPUAN FISKAL PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Aulia Azimi^{1*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak

ABSTRACT

The method used in this research is comparative method using quantitative. The data source used is secondary data. The results shows that the comparison between efficiency and effectivity from district / city in West Borneo Province in 2006 – 2010 has declining trend and interrelated. While local fiscal capability which is measured from government finance performance shows that its dependence is still high enough because the contribution of fund balance is still above 50%.

Base on the estimation result which is regressed by using EGLS method, it is obtained the result shows that two variables from local finance performance are not significant which are PAD effectivity ratio (REPAD) and local finance dependency ratio (RKetKD), where the estimation result also shows the existence of negative relation but significant to degree of decentralization ratio (RDD). The financial performance of local government still shows dependence on the central government, therefore it must be learn to be independent.

ARTICLE INFO

Article History:

Received September 8th 2020

Received in revised from September 12th 2020

Accepted September 2020

Keywords:
efficiency,
effectivity, fiscal
capability,
government
expenditure, and
economic growth

* Corresponding Author; E-mail address: auliaazimi.iain@gmail.com

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, memuat tentang pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan cara menggali potensi yang ada dan meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah yang berkarakteristik *good governance*.

Pelimpahan wewenang tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 memberikan gambaran adanya hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat – Daerah dan masih adanya kontrol dari Pusat dalam bentuk dana perimbangan atau dikenal istilah “*money follow function*” artinya “dengan kewenangan, uang akan dicari” bukan sebaliknya (Syaukani dkk, 2007: 203). Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (Alisman, 2014: 49). Maksud dari pernyataan tersebut adalah dengan kewenangan yang ada pemerintah daerah akan dapat menggali potensi daerahnya untuk membiayai pembangunan pemerintahan menuju pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan pembangunan akan dapat dilakukan jika Pemerintah Daerah bijaksana dalam mengelola keuangan daerahnya agar tercipta peningkatan kemampuan keuangan daerah. Maka dari itu, menurut Khusaini, 2006 dalam Ladjin (2008: 16) bahwa: otonomi daerah diharapkan bisa menjadi jembatan bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal melalui efek multiplier dari desentralisasi yang diharapkan bisa terwujud.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kab./Kota Propinsi Kalimantan

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%) (harga konstan 2000)				
	2006	2007	2008	2009	2010
Kab.Sambas	3,95	5,38	5,51	5,43	5,88
Kab.Bengkayang	6,29	6,12	5,57	4,50	4,63
Kab.Landak	4,78	5,13	4,29	4,67	5,01
Kab.Pontianak	4,31	5,15	5,90	1,32	2,10
Kab.Sanggau	8,23	5,48	3,49	4,95	4,15
Kab.Ketapang	13,82	10,33	7,14	-1,22	7,51
Kab.Sintang	5,02	5,16	4,70	5,38	5,21
Kab.Kapuas Hulu	4,07	3,42	3,55	3,70	4,44
Kab.Sekadau	6,20	7,63	5,76	5,35	5,54
Kab.Melawi	4,67	5,44	5,11	4,22	5,26
Kab. Kayong Utara	-	3,72	5,84	2,78	5,92
Kab. Kubu Raya	-	-	5,02	5,87	6,23
Kota Pontianak	4,96	5,45	5,34	5,35	5,39
Kota Singkawang	6,34	4,72	4,90	4,88	5,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan cenderung menurun menunjukkan prestasi dalam mengendalikan maupun membangun perekonomiannya masih kurang produktif, maka Pemerintah Daerah Kab/Kota di Propinsi Kalimantan Barat harus dapat mengelola keuangan daerahnya dengan menerapkan prinsip *value for money* atau 3E agar dana transfer dari pusat dapat membantu dalam membiayai kebutuhan fiskalnya dan mendongkrak pembangunan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan itu perlu suntikan dana pada APBD dari pemerintah pusat yang berupa dana desentralisasi.

Mardiasmo (2000) dalam Alisman (2014: 50) mengkaji bahwa dengan adanya dana desentralisasi akan berimplikasi pada APBD yaitu pos penerimaan dengan konsekuensi menggelembungnya jumlah penerimaan daerah, perubahan jumlah penerimaan tersebut harus diikuti dengan pengeluaran keuangan daerah yang efisien dan efektif dan disertai dengan peningkatan sumber daya manusia, persoalan otonomi daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah tetapi lebih berfokus pada pemberian wewenang pemerintah daerah untuk menentukan dan mengatur penggunaan dana-dana perimbangan tersebut.

Tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat tercermin dari tingginya kontribusi Dana Perimbangan (DP) yang lebih dari 50% jika dibandingkan dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD). Hal ini menunjukkan bahwa PAD masih belum memiliki peran yang dominan dalam membiayai pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. Kontribusi PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kab/Kota di Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 – 2010

Kabupaten/Kota	2006		2007		2008		2009		2010	
	PAD (%)	DP (%)								
Kab.Sambas	3,13	95,41	3,35	89,40	3,99	92,41	3,78	84,32	3,63	78,38
Kab.Bengkayang	0,79	96,86	3,32	87,89	4,31	85,90	3,74	89,59	3,74	89,59
Kab.Landak	3,50	93,62	3,32	89,34	1,72	91,80	2,61	84,95	2,70	78,15
Kab.Pontianak	3,68	95,03	2,96	91,38	2,90	91,91	6,10	72,76	3,18	77,87
Kab.Sanggau	3,23	95,10	3,07	91,17	4,00	90,63	4,09	89,71	3,18	86,46
Kab.Ketapang	2,60	96,09	2,76	94,28	3,00	94,53	3,81	91,38	3,78	90,35
Kab.Sintang	4,03	93,98	3,28	94,32	4,04	91,06	4,45	89,25	4,18	83,45
Kab.Kapuas Hulu	1,76	96,52	5,24	92,06	2,29	95,22	2,65	92,34	2,65	85,72
Kab.Sekadau	1,20	95,85	1,69	93,71	2,25	94,12	3,22	90,20	2,76	76,88
Kab.Melawi	1,82	97,92	1,69	95,17	3,12	85,98	2,29	86,83	3,36	86,33
Kab.Kayong Utara	-	-	-	-	0,79	84,29	1,71	87,78	1,75	81,23
Kab.Kubu Raya	-	-	-	-	1,06	0	2,18	89,36	2,26	82,82
Kota Pontianak	10,22	89,34	10,40	81,41	10,37	79,23	9,83	74,55	11,41	65,19
Kota Singkawang	5,59	93,47	5,50	90,31	5,34	87,71	5,54	82,94	3,63	78,38
Rata-rata	3,46	94,93	3,88	90,87	3,51	83,20	4,00	86,14	3,73	81,49

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Propinsi Kalimantan Barat yang diolah.

Tabel 2 menunjukkan kondisi kebijakan desentralisasi fiskal Kab/Kota di Propinsi Kalimantan Barat masih belum mampu mengoptimalkan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari PAD. Untuk itu perlunya pengukuran kinerja pemerintah daerah yang diukur dari APBD yang diperkuat oleh banyaknya defisit anggaran yang terjadi pada beberapa Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat.

Tabel 3. Surplus (Defisit) Belanja dan Pendapatan Kab/Kota di Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 – 2010

Kabupaten/Kota	Surplus/Defisit (Rp M)				
	2006	2007	2008	2009	2010
Kab.Sambas	31,50	(271,43)	(42,41)	(0,65)	(9,96)
Kab.Bengkayang	(23,87)	63,63	2,35	(51,01)	(51,01)
Kab.Landak	21,87	10,37	(19,48)	(57,86)	(30,74)
Kab.Pontianak	23,24	34,78	(51,51)	(14,61)	24,31
Kab.Sanggau	25,65	(154,94)	2,33	2,70	(3,68)
Kab.Ketapang	86,18	79,47	(63,05)	(39,10)	(4,26)
Kab.Sintang	75,22	14,12	(1,17)	5,03	18,95
Kab.Kapuas Hulu	(24,58)	53,23	(8,09)	15,41	24,23
Kab.Sekadau	32,71	18,18	(20,12)	(36,08)	(4,51)
Kab.Melawi	2,18	(5,65)	10,41	6,92	2,49
Kab.Kayong Utara	-	-	23,22	24,85	(18,49)
Kab.Kubu Raya	-	-	6,41	32,98	(3,93)
Kota Pontianak	227,57	19,25	171,83	11,32	12,83
Kota Singkawang	0,86	2,42	7,92	(41,83)	(43,41)

Sumber : Badan Pengelola Aset Kekayaan Daerah (BPKAD) Kal-Bar (data diolah)

Terjadinya defisit anggaran pada tabel 3 menunjukkan lemahnya perencanaan pengeluaran yang pada akhirnya menimbulkan *underfinancing* atau *overfinancing* yang kesemuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit kerja Pemerintah Daerah. Jika terus berada dalam kondisi tersebut, peranan Pemerintah Daerah akan menjadi lemah baik sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan *entrepreneur* dalam proses pembangunan daerah (Halim, 2007: 23).

Berdasarkan fenomena tersebut di atas Pemerintah Daerah Kab/Kota di Propinsi Kalimantan Barat perlu memonitor APBD yang merupakan implikasi nyata dari otonomi daerah yang memiliki kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dengan tetap menerapkan prinsip *value for money* atau prinsip 3E (Ekonomis, efisien, dan Efektif) sehingga diketahui perbandingan efisiensi dan efektivitas keuangan daerah tersebut, perbandingan kemampuan fiskal daerah yang diukur dari kinerja keuangan daerah, pengaruh pengeluaran pemerintah dan kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi Kab/Kota di Propinsi Kalimantan Barat di era otonomi daerah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode komparatif dengan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian studi kasus. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan jenis data yaitu data panel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* mengolah data menggunakan *Microsoft Excel* dan *E-Views*. Setelah dilakukan pengolahan data, maka dilakukan analisis data menggunakan *value for money* dan regresi untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah dan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

PEMBAHASAN*a. Analisis Perbandingan Efisiensi dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat 2006-2010**1) Tingkat Ekonomis Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat*

Tabel 4. menunjukkan bahwa tingkat ekonomis keuangan Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat sebagian besar masuk kategori ekonomis (nilai yang kurang dari 100%) artinya ada kehematan atau efisiensi belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah. Tetapi ada satu Kabupaten/Kota yang masuk kategori tidak ekonomis (nilai lebih dari 100%) yaitu Kab. Sanggau.

Tabel 4. Tingkat Ekonomis Keuangan Daerah Kab/Kota Propinsi Kalbar 2006-2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	89,60	91,82	96,89	96,05	96,67	94,22
Kab.Bengkayang	162,03	70,80	73,88	83,74	83,74	93,27
Kab.Landak	89,57	97,57	95,31	99,73	96,90	95,86
Kab.Pontianak	97,13	91,16	91,37	94,62	90,68	91,85
Kab.Sanggau	110,92	165,52	91,21	93,92	92,37	107,03
Kab.Ketapang	86,37	83,79	90,30	95,09	94,60	90,09
Kab.Sintang	85,57	91,35	91,41	91,15	90,88	90,38
Kab.Kapuas Hulu	104,94	89,76	94,59	92,71	94,45	93,33
Kab.Sekadau	88,52	86,55	92,12	93,61	91,35	90,56
Kab.Melawi	93,36	95,89	92,68	92,32	93,57	93,55
Kab.Kayong Utara	-	-	84,44	88,98	87,80	86,95
Kab.Kubu Raya	-	-	95,38	92,12	90,40	92,63
Kota Pontianak	91,77	91,32	73,88	91,34	91,01	88,21
Kota Singkawang	144,01	91,13	89,35	93,02	102,25	92,26

Sumber: Hasil olah data peneliti tahun 2010

Keekonomisan suatu daerah bisa terjadi dalam dua kondisi yaitu penghematan anggaran dalam menjalankan pemerintahannya dan penghematan belanja yang dilakukan karena belanja belum sepenuhnya selesai tetapi sudah harus melakukan tutup buku atau anggaran dikarenakan ada kegiatan yang belum selesai pada waktunya sehingga dana riil lebih kecil dibandingkan dana yang dianggarkan atau untuk melakukan penghematan anggaran, belanja yang dilakukan tidak memenuhi standar. Akibatnya terdapat proyek-proyek yang seharusnya selesai tepat waktu tetapi jauh dari harapan, seperti proyek gagal sebelum operasi.

2) Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat

Tabel 5. menunjukkan Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat sebagian besar masuk kategori efisien (nilai kurang dari 100%) artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal dengan tingkat output tertentu tetapi terdapat tiga kabupaten dan satu kota yang masuk kategori tidak efisien (nilai lebih dari 100%).

Tabel 5. Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Kab/Kota Propinsi Kalimantan Barat 2006-2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	93,08	95,86	107,34	100,10	101,38	99,55
Kab.Bengkayang	108,44	83,16	99,48	112,47	112,47	103,20
Kab.Landak	94,13	97,69	104,10	111,41	105,40	102,55
Kab.Pontianak	95,73	94,54	107,36	104,15	94,92	99,34
Kab.Sanggau	94,36	129,01	99,61	99,57	100,57	104,62
Kab.Ketapang	86,57	89,79	108,59	104,94	102,74	98,53
Kab.Sintang	86,16	97,71	100,17	99,23	97,38	96,13
Kab.Kapuas Hulu	94,06	90,99	101,22	97,75	96,88	96,18
Kab.Sekadau	87,55	93,97	105,92	110,19	101,04	99,73
Kab.Melawi	99,27	101,64	97,53	98,34	99,40	99,24
Kab.Kayong Utara	-	-	84,54	92,24	105,43	94,07
Kab.Kubu Raya	-	-	80,65	93,03	100,65	91,44
Kota Pontianak	52,60	96,54	72,22	98,31	98,32	83,60
Kota Singkawang	93,48	99,26	97,86	110,15	102,13	100,58

Sumber: Hasil olah data peneliti tahun 2010

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kabupaten/Kota yang memiliki surplus anggaran telah efisien dalam mengelola anggarannya tetapi bisa berada dalam dua kondisi yaitu kondisi yang benar-benar mampu memanfaatkan sumber daya yang ada atau berada pada kondisi yang disebutkan di atas yaitu adanya program yang belum terlaksana sepenuhnya.

3) *Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat 2006-2010*

Tabel 6. menunjukkan bahwa sebagian besar kab/kota di Propinsi Kalimantan Barat masuk kategori efektif (nilai lebih dari 100%) dan tiga kabupaten dan satu kota masuk kategori tidak efektif (nilai kurang dari 100%).

Tabel 6. Tingkat Efektivitas Keuangan Kab/Kota Propinsi Kal-Bar 2006-2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	101,48	105,79	99,47	101,75	100,54	101,81
Kab.Bengkayang	152,19	103,98	99,87	103,58	103,58	112,64
Kab.Landak	103,17	107,06	99,50	98,48	99,09	101,46
Kab.Pontianak	97,00	102,48	94,83	100,89	98,07	98,65
Kab.Sanggau	100,24	99,95	99,09	101,99	99,26	100,10
Kab.Ketapang	104,34	107,63	104,53	104,23	99,99	104,14
Kab.Sintang	102,02	105,29	102,25	103,92	105,18	103,73
Kab.Kapuas Hulu	103,93	105,44	104,77	104,22	104,43	104,56
Kab.Sekadau	103,54	103,48	100,62	99,31	95,86	100,56
Kab.Melawi	95,92	94,15	96,49	97,71	97,78	96,41
Kab.Kayong Utara	-	-	99,82	102,33	93,36	98,50
Kab.Kubu Raya	-	-	118,27	100,36	95,39	104,67
Kota Pontianak	95,01	96,40	97,01	95,57	95,53	95,90

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kota Singkawang	102,08	103,03	100,07	98,95	98,93	100,61

Sumber : BPKAD Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Diketahui bahwa efektivitas keuangan daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat tahun 2006 – 2010 berkisar dari 100,07% – 118,27%. Terdapat Kabupaten/Kota yang tidak efektif selama lima tahun dari tahun 2006 – 2010 tetapi memiliki tingkat efisiensi yang baik yaitu Kabupaten Melawi dan Kota Pontianak.

Berdasarkan fenomena di atas, tidaklah mudah memadukan antara tingkat efisiensi dengan efektivitas, sebab terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki efisiensi yang baik berbanding terbalik dengan tingkat efektivitasnya. Namun jika kita perhatikan Tabel 5 dan Tabel 6 terdapat kecenderungan menurunnya tingkat efisiensi dan efektivitas dari tahun 2006 – 2010.

Berdasarkan hasil estimasi dan pemaparan di atas dapat ditelaah bahwa jika program dilakukan dengan efisien dan efektif dapat dikatakan program tersebut masuk kategori *cost-effectivnes*. Artinya dengan dana yang ada Pemerintah Daerah mampu mengelola sumber daya atau menggali potensi daerahnya secara riil yang terlihat dari keberhasilan program yang dijalankan dalam melayani publik dengan tujuan memberikan *outcome* atau dampak yang baik bagi masyarakat sehingga dapat lebih memicu partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi ke arah peningkatan pendapatan perkapita.

b. *Analisis Perbandingan Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat*

1) *Rasio Efektivitas PAD*

Tabel 7. menunjukkan terdapat tujuh kabupaten yang masuk kategori (Sularso dan Restianto, 2011: 112) sangat efektif (nilai lebih dari 100%), dua kabupaten dan kota Singkawang masuk kategori efektif (90-100%), kota Pontianak masuk kategori cukup efektif (80-90%) dan tiga kabupaten masuk kategori kurang efektif (70-80%).

Tabel 7. Rasio Efektivitas PAD Kab/Kota Propinsi Kalimantan Barat 2006-2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	102,03	101,88	101,01	100,17	91,33	99,28
Kab.Bengkayang	106,60	147,63	176,95	145,41	123,80	140,08
Kab.Landak	488,25	282,61	129,34	106,91	125,25	226,47
Kab.Pontianak	68,26	72,99	61,45	105,59	71,80	76,02
Kab.Sanggau	98,95	85,98	98,26	101,61	79,53	92,87
Kab.Ketapang	135,75	118,55	111,52	114,88	93,55	114,85
Kab.Sintang	117,73	100,97	122,53	122,65	112,65	115,31
Kab.Kapuas Hulu	143,75	340,86	133,11	22,04	158,94	159,74
Kab.Sekadau	56,80	131,03	78,30	62,79	51,26	76,04
Kab.Melawi	115,24	45,89	85,11	53,76	86,63	77,33
Kab.Kayong Utara	-	-	134,31	174,78	68,16	125,75
Kab.Kubu Raya	-	-	177,23	88,94	75,36	113,84

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kota Pontianak	82,47	86,45	84,87	90,20	90,45	86,89
Kota Singkawang	112,33	94,23	82,91	89,69	84,15	92,66

Sumber : BPKAD Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Adanya kecenderungan efektivitas PAD yang menurun dan fluktuatif dari data rata-rata menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Pusat yang terlihat jelas dari rendahnya peran atau kontribusi PAD terhadap total penerimaan jika dibandingkan dengan kontribusi Dana Perimbangan yang melebihi 50% terhadap total penerimaan, meskipun setiap tahunnya PAD selalu mengalami peningkatan diiringi meningkatnya Dana Perimbangan. Disinilah dituntut agar Pemerintah Daerah lebih bijak dalam menggunakan transfer dari Pusat untuk menggali potensi daerahnya.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menggunakan transfer akan dapat mendukung efektivitas PAD sebab keberhasilan program atau kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi daerahnya dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Oleh sebab itu efektivitas PAD yang cenderung menurun memungkinkan berada dalam kondisi program atau kegiatan yang ada tidak memenuhi harapan publik atau dalam kondisi untuk mendapatkan subsidi dana yang lebih besar dalam bentuk transfer sehingga dana yang ada tidak dikelola dengan baik karena Pemerintah Pusat akan selalu memberikan sokongan dana dalam jumlah besar.

2) *Rasio Derajat Desentralisasi*

Tabel 8. sebagian besar kab/kota di Propinsi Kalimantan Barat memiliki kemampuan keuangan daerah atau desentralisasi fiskal dengan kategori sangat kurang (nilainya kurang dari 10%. Tangkilisan, 2005: 83) artinya Pemerintah Daerah belum mampu melaksanakan desentralisasi sepenuhnya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 8. Derajat Desentralisasi Kab/Kota Propinsi Kalimantan Barat 2006-2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	2,96	3,04	3,61	3,57	3,36	3,30
Kab.Bengkayang	0,69	2,63	3,18	2,79	4,53	2,76
Kab.Landak	3,39	3,07	1,57	2,41	2,43	2,58
Kab.Pontianak	3,51	2,76	2,60	5,50	3,02	3,48
Kab.Sanggau	3,06	2,89	3,67	3,77	2,95	3,27
Kab.Ketapang	2,60	2,41	2,38	3,32	3,46	2,83
Kab.Sintang	3,82	2,86	3,55	3,96	3,73	3,58
Kab.Kapuas Hulu	1,66	4,85	2,01	0,24	2,40	2,23
Kab.Sekadau	0,16	1,50	1,94	2,83	2,51	1,79
Kab.Melawi	1,79	1,66	3,12	2,26	3,28	2,42
Kab.Kayong Utara	-	-	0,77	1,59	1,54	1,30
Kab.Kubu Raya	-	-	1,06	2,15	2,12	1,77

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kota Pontianak	10,04	10,19	8,23	9,59	11,08	9,83
Kota Singkawang	5,45	5,08	4,93	4,94	5,07	5,10

Sumber : BPKAD Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Rendahnya derajat desentralisasi Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat selama tahun 2006 – 2010 yang berada pada kisaran di bawah 10% yang dilihat dari rata-rata, menunjukkan kontribusi PAD terhadap TPD hanya 10% sedangkan sisanya berasal dari transfer dan penerimaan pembiayaan. Dana transfer berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan dana penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan SiLPA, pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sudah selayaknya dana-dana yang ada digunakan dengan bijak untuk membiayai pembangunan daerahnya agar terhindar dari keterpurukan ekonomi.

3) *Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah*

Tabel 9. menunjukkan kab/kota di Propinsi Kalimantan Barat memiliki ketergantungan keuangan dengan pemerintah pusat atau dana transfer masuk kategori tinggi (75-100%) dan sedang (50-75%).

Tabel 9. Ketergantungan Keuangan Daerah Kab/Kota Propinsi Kalimantan Barat 2006-2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	90,04	80,99	83,59	79,59	86,71	84,18
Kab.Bengkayang	84,08	69,50	63,27	66,86	66,86	70,11
Kab.Landak	92,20	82,73	87,95	93,46	84,27	88,12
Kab.Pontianak	90,60	85,21	80,99	65,57	91,12	82,70
Kab.Sanggau	89,94	85,75	83,19	82,76	80,15	84,36
Kab.Ketapang	96,08	82,28	75,13	79,61	82,74	83,17
Kab.Sintang	90,96	82,30	79,97	82,73	85,51	84,29
Kab.Kapuas Hulu	92,03	85,24	83,67	83,07	77,63	84,33
Kab.Sekadau	96,22	83,15	81,18	79,41	69,92	81,98
Kab.Melawi	96,43	93,59	85,98	88,10	86,60	90,14
Kab.Kayong Utara	-	-	91,47	81,48	71,82	81,59
Kab.Kubu Raya	-	-	0,00	88,16	85,31	57,83
Kota Pontianak	87,74	86,52	62,90	72,73	63,31	74,64
Kota Singkawang	93,96	83,37	80,95	73,97	66,49	79,75

Sumber: BPKAD Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Pengaruh transfer terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat sangat tinggi, terlihat jelas dari hasil perhitungan pada Tabel 9. nilai tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan transfer digunakan sebagian besar untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan. Jika peningkatan pendapatan transfer dialokasikan untuk penggalan PAD dengan sikap yang tidak overaktif menitikberatkan

pada peningkatan pajak dan retribusi, tetapi lebih pada kualitas dan bukan kuantitas karena (Kuncoro, 2004: 59) transfer diharapkan menjadi pendorong agar Pemerintah Daerah secara intensif menggali sumber-sumber penerimaan sesuai kewenangannya sebab penggalan PAD yang hanya didasarkan pada faktor inkremental akan berakibat negatif pada perekonomian daerah.

Tingginya tingkat ketergantungan Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat tahun 2006 – 2010 yang dilihat dari rata-rata, menunjukkan bahwa ketergantungan suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh PAD tetapi faktor lain yaitu penerimaan pembiayaan.

4) *Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat 2006-2010*

Tabel 10. rasio kemandirian keuangan daerah Kab/Kota di Propinsi Kalimantan Barat tahun 2006 – 2010 masuk kategori rendah sekali (0-25%) dan memiliki pola hubungan *instruktif* yaitu peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dibandingkan kemandirian Pemerintah Daerah dalam membiayai kebutuhan fiskal dan hal ini menunjukkan peranan transfer dalam APBD lebih besar (Nataluddin dalam Halim, 2004 : 189)

Tabel 10 Keuangan Daerah Kab/Kota Propinsi Kalimantan Barat 2006-2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	3,28	3,75	4,32	4,31	3,76	3,88
Kab.Bengkayang	0,82	3,78	5,02	4,17	6,78	4,11
Kab.Landak	3,68	3,71	1,79	2,48	2,60	2,85
Kab.Pontianak	3,83	3,23	3,20	8,06	3,32	4,33
Kab.Sanggau	3,40	3,37	4,41	4,56	3,68	3,88
Kab.Ketapang	2,70	2,92	3,17	4,17	4,18	3,43
Kab.Sintang	4,20	3,48	4,44	4,78	4,36	4,25
Kab.Kapuas Hulu	1,79	5,69	2,41	0,29	3,09	2,65
Kab.Sekadau	0,17	1,81	2,39	3,41	3,25	2,20
Kab.Melawi	1,85	1,78	3,63	2,56	3,79	2,72
Kab.Kayong Utara	-	-	0,83	1,95	2,15	1,64
Kab.Kubu Raya	-	-	0,00	2,44	2,48	1,64
Kota Pontianak	11,39	11,77	13,09	13,18	17,50	13,38
Kota Singkawang	5,81	6,10	6,09	6,52	7,62	6,43

Sumber : BPKAD Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Tabel 11. menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah Kab/Kota di Propinsi Kalimantan Barat 2006-2010 masuk kategori rendah sekali (0-25%) dan memiliki pola hubungan *instruktif* yaitu kontribusi PAD dan bagi hasil (pajak dan bukan pajak) terhadap total penerimaan daerah belum memberikan sumbangsih yang lebih baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika Pemerintah Daerah dapat mengelola potensi daerahnya dalam hal bagi hasil tentu akan memberikan kontribusi yang positif bagi sumber penerimaan daerah (Nataluddin dalam Halim, 2004 : 189).

Tabel 11. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 – 2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	9,63	8,03	10,67	10,06	10,94	9,87
Kab.Bengkayang	3,61	7,73	9,68	9,62	11,36	8,40
Kab.Landak	11,56	11,09	9,21	12,52	4,02	9,68
Kab.Pontianak	8,60	10,21	8,76	14,53	10,29	10,48
Kab.Sanggau	9,58	12,99	11,70	12,67	12,19	11,83
Kab.Ketapang	10,92	13,85	11,72	14,28	16,91	13,54
Kab.Sintang	10,46	12,00	10,87	11,81	13,58	11,74
Kab.Kapuas Hulu	10,57	12,92	10,21	7,40	11,11	10,44
Kab.Sekadau	10,35	11,32	10,85	12,16	13,86	11,71
Kab.Melawi	11,85	10,81	11,67	11,19	14,26	11,96
Kab.Kayong Utara	-	-	17,39	9,88	9,28	12,18
Kab.Kubu Raya	-	-	25,18	9,69	9,27	14,71
Kota Pontianak	24,77	24,83	19,36	25,09	27,27	24,26
Kota Singkawang	12,42	13,04	10,69	11,87	15,18	12,64

Sumber : BPKAD Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Tabel 12 dan 13 di bawah menunjukkan tingkat kemandirian kemampuan keuangan daerah masuk kategori rendah (25-50%) dengan pola hubungan *konsultatif* artinya campur tangan pemerintah pusat semakin berkurang, daerah sedikit mampu melaksanakan otonomi dan masuk kategori rendah sekali (0-25%) dengan pola hubungan *instruktif* yaitu peranan Pemerintah Pusat dominan.

Tabel 12 Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 – 2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	23,06	6,60	7,25	7,72	17,45	12,41
Kab.Bengkayang	2,73	6,45	6,65	10,81	17,56	8,84
Kab.Landak	12,59	7,78	2,59	7,36	8,69	7,80
Kab.Pontianak	23,88	6,55	55,48	14,36	14,51	22,96
Kab.Sanggau	11,69	5,23	8,21	9,82	7,45	8,48
Kab.Ketapang	6,28	4,77	5,10	9,37	13,45	7,79
Kab.Sintang	18,61	5,19	6,49	22,19	26,19	15,74
Kab.Kapuas Hulu	5,68	14,65	4,56	0,95	9,22	7,01

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sekadau	0,62	2,75	3,17	4,52	4,45	3,10
Kab.Melawi	4,68	3,50	4,93	5,46	11,66	6,05
Kab.Kayong Utara	-	-	2,90	2,45	2,32	2,56
Kab.Kubu Raya	-	-	1,69	9,03	7,90	6,21
Kota Pontianak	22,08	20,64	22,02	19,20	44,17	25,62
Kota Singkawang	13,62	17,47	9,48	13,58	10,70	12,97

Sumber : BPKAD Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Tabel 13. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 – 2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	10,89	9,20	10,97	10,65	11,31	10,60
Kab.Bengkayang	3,61	11,63	13,09	11,36	13,42	10,62
Kab.Landak	12,57	12,24	9,62	12,18	4,09	10,14
Kab.Pontianak	8,60	11,46	9,09	15,48	11,14	11,15
Kab.Sanggau	8,66	10,68	12,72	13,73	13,07	11,77
Kab.Ketapang	12,53	17,62	13,42	15,57	17,87	15,40
Kab.Sintang	12,41	13,79	12,12	13,39	15,62	13,47
Kab.Kapuas Hulu	10,57	15,27	11,36	8,28	12,23	11,54
Kab.Sekadau	12,12	13,48	11,85	12,45	15,09	13,00
Kab.Melawi	12,09	10,81	11,95	11,49	14,64	12,19
Kab.Kayong Utara	-	-	20,71	11,35	9,95	14,00
Kab.Kubu Raya	-	-	31,22	10,56	9,80	17,19
Kota Pontianak	47,37	26,07	33,47	26,13	28,53	32,32
Kota Singkawang	12,42	14,15	15,14	11,96	15,62	13,86

Sumber : BPKAD Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dengan menggunakan empat persamaan menunjukkan kemampuan keuangan yang masih rendah dan rendah sekali meskipun PAD telah ditambahkan dengan bagi hasil tetap saja memiliki kemandirian yang rendah artinya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat dalam memenuhi kebutuhan untuk menjalankan fungsinya dalam membangun dan menggali potensi daerah masih rendah dan tergantung pada Pemerintah Pusat. Hal ini terlihat dari tingkat ketergantungan yang lebih dari 50% (Lihat Tabel 9).

c. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat*

1) Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Propinsi Kalimantan Barat

Kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat selama periode tahun 2006 – 2010 dapat diukur dengan menggunakan variabel Rasio Efektivitas PAD ($REPAD_{it}$), Rasio Derajat Desentralisasi (RDD_{it}), Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah ($RKetKD_{it}$), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang menggunakan persamaan ke tiga ($RKemKD3_{it}$), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang menggunakan persamaan ke empat ($RKemKD4_{it}$). Kelima variabel tersebut digunakan untuk mengukur kinerja keuangan kemudian kinerja keuangan dan pengeluaran pemerintah daerah (PPD_{it}) akan dilihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 14 Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.	Kesimpulan
REPAD?	0.002338	1.427725	0.1601	Tidak Signifikan
RDD?	-0.384441	-4.139242	0.0001	Signifikan
RKetKD?	0.004940	0.847595	0.4011	Tidak Signifikan
RKemKD3?	0.042916	2.120892	0.0394	Signifikan
RKemKD4?	0.021835	2.262747	0.0284	Signifikan
PPD?	0.356172	4.125937	0.0002	Signifikan

Sumber : data hasil olahan e-views 6

Keterangan : RKemKD3 dan RKemKD4 merupakan variabel kemandirian keuangan daerah yang dihitung dengan menggunakan formula yang berbeda.

Variabel Rasio Efektivitas PAD (REPAD) tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi 0,002338. Efektivitas PAD yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung tidak memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi terutama PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat karena efektivitas PAD mengalami kecenderungan yang menurun di akhir tahun 2010 (Lihat Tabel 7). Artinya program atau kegiatan yang ada, tidak memenuhi harapan publik atau jauh dari harapan misalnya pelayanan yang kurang memuaskan, kebijakan yang tidak memicu partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lambat dan menurunkan pendapatan perkapita, ditambah lagi dana transfer dari pusat tidak dikelola dengan baik karena Pemerintah Pusat akan selalu memberikan sokongan dana dalam jumlah besar untuk menyokong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Variabel Rasio Derajat Desentralisasi (RDD) memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi -0,384441. Koefisien derajat desentralisasi yang negatif menggambarkan derajat desentralisasi Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat selama periode 2006 – 2010 belum mampu memberikan implikasi yang baik bagi pertumbuhan ekonomi sebab kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan masih tergantung pada Pemerintah Pusat yang tergambar dari derajat desentralisasi yang cenderung menurun dan rendah (Lihat kembali Tabel 8).

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Tim peneliti PKP2A III LAN (2008), bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berimplikasi pada peningkatan kemampuan

keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah tergantung proporsi PAD dalam APBD. Artinya derajat desentralisasi akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi jika PAD meningkat dan mampu menciptakan kestabilan perekonomian.

Berdasarkan hasil penelitian Tim peneliti PKP2A III LAN dan hasil estimasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa variabel derajat desentralisasi yang negatif disebabkan oleh kontribusi PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan yang tidak stabil dengan kecenderungan yang menurun selama 2006 – 2010, artinya Kabupaten/Kota belum mampu menciptakan kestabilan perekonomian di daerahnya dengan berbagai program yang dilakukan Pemerintah Daerah karena peningkatan PAD yang tidak stabil meskipun dana perimbangan mengalami kecenderungan yang menurun diakhir tahun 2010.

Fenomena ini dapat terjadi jika berada pada kondisi efektivitas PAD tetap atau tidak stabil dan dana transfer dari Pusat mengalami penurunan menyebabkan daerah yang belum memiliki kemampuan membiayai sendiri pemerintahannya mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun. Jadi tidak menuntut kemungkinan derajat desentralisasi memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi apalagi Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat memiliki derajat desentralisasi yang rendah (Lihat Tabel 8).

Variabel Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKetKD) tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi 0,004940. Artinya pendapatan transfer yang diperoleh dari Pemerintah Pusat tidak digunakan untuk membiayai belanja pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menggali potensi riil daerah yang dapat memberikan implikasi pada peningkatan PAD dan pada akhirnya pencapaian pertumbuhan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas PAD yang tidak signifikan dan Rasio Derajat Desentralisasi yang signifikan tetapi memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi mendukung Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah yang tidak signifikan atau tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi karena ketergantungan tidak hanya dipengaruhi oleh PAD tetapi juga faktor lain yaitu penerimaan pembiayaan.

Variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 3 (RKemKD3) menggunakan persamaan yang dilihat dari perbandingan antara PAD dengan pengeluaran rutin. Hasil estimasi RKemKD3 diperoleh koefisien regresi 0,042916 menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa PAD cukup memberikan implikasi yang baik dalam membiayai pengeluaran rutin yang dilakukan Pemerintah Daerah karena hanya memberikan kontribusi 4% sedangkan sisanya berasal dari transfer dan penerimaan pembiayaan.

Variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 4 (RKemKD4) menggunakan persamaan yang dilihat dari perbandingan PAD ditambah bagi hasil dengan total pengeluaran. Variabel RKemKD4 berpengaruh signifikan. Artinya setelah PAD ditambah bagi hasil yang dibandingkan dengan total pengeluaran daerah juga memberikan implikasi yang baik dalam membiayai pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsinya.

Berdasarkan hasil estimasi kedua variabel kemandirian keuangan daerah tersebut, keduanya menunjukkan pengaruh yang positif dan nyata terhadap pertumbuhan

ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat selama tahun 2006 – 2010. Hal ini berarti kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri dengan menggunakan PAD dan bagi hasil yang didapat untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang didukung oleh partisipasi publik melalui pembayaran pajak dan retribusi sebagai sumber utama PAD. Jadi semakin baik partisipasi publik akan memberikan implementasi yang baik juga bagi peningkatan pendapatan perkapita yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2) *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat:*

Variabel PPD memiliki hasil estimasi yang positif dengan pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi sebesar 0,356172. Hasil estimasi variabel pengeluaran pemerintah daerah lebih tinggi dari pada hasil estimasi kelima variabel yang lain. Artinya belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah memberikan implikasi yang lebih tinggi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat selama tahun 2006 – 2010 dibandingkan variabel bebas yang lain.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Indrawati (2007) yaitu pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sodik (2007) bahwa pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pembangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sementara Lin (1994) yang dikutip dari Sodik menemukan pengeluaran tidak produktif negatif dan tidak signifikan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara industri tetapi signifikan positif berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

Hasil estimasi beberapa peneliti mengindikasikan bahwa belanja atau pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi karena pengeluaran atau belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah yang lebih pada belanja pembangunan seperti membangun infrastruktur atau sarana prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi akan mampu menarik investor untuk membuka lapangan usaha sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan serta dapat meningkatkan pendapatan perkapita yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan pembangunan. Tetapi jika memandang dari sudut lain, pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkat apabila belanja pemerintah yang dilakukan lebih mendorong publik atau masyarakat untuk menjadi konsumtif.

Variabel PPD memiliki hasil estimasi yang positif dengan pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi sebesar 0,356172. Hasil estimasi variabel pengeluaran pemerintah daerah lebih tinggi dari pada hasil estimasi kelima variabel yang lain. Artinya belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah memberikan implikasi yang lebih tinggi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat selama tahun 2006 – 2010 dibandingkan variabel bebas yang lain.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Indrawati (2007) yaitu pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sodik (2007) bahwa pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pembangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sementara Lin (1994) yang dikutip dari Sodik menemukan pengeluaran tidak produktif negatif dan tidak signifikan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara industri tetapi signifikan positif berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

Hasil estimasi beberapa peneliti mengindikasikan bahwa belanja atau pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi karena pengeluaran atau belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah yang lebih pada belanja pembangunan seperti membangun infrastruktur atau sarana prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi akan mampu menarik investor untuk membuka lapangan usaha sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan serta dapat meningkatkan pendapatan perkapita yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan pembangunan. Tetapi jika memandang dari sudut lain, pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkat apabila belanja pemerintah yang dilakukan lebih mendorong publik atau masyarakat untuk menjadi konsumtif.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran hasil analisis efisiensi, efektivitas dan kemandirian fiskal serta pengaruh kinerja keuangan daerah dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2006-2010, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbandingan efisiensi dan efektivitas Kabupaten/ Kota di Propinsi Kalimantan Barat menunjukkan tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang sebagian besar memiliki kecenderungan menurun dan saling berkaitan artinya tingkat ekonomis yang baik akan sejalan dengan tingkat efisiensi yang dilakukannya dan tingkat efektivitas dapat mempengaruhi tingkat efisiensi tetapi efisiensi belum tentu dapat mempengaruhi efektivitas dari kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
2. Kemampuan fiskal daerah yang dilihat dari kinerja keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan kinerja keuangan yang masih memiliki ketergantungan kepada Pemerintah Pusat yaitu: PAD memiliki kecenderungan yang menurun, derajat desentralisasi yang masih rendah, ketergantungan keuangan daerah yang memiliki kecenderungan menurun tetapi masih di atas 50% dan tingkat kemandirian yang cukup rendah.
3. Pengaruh pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada era Otonomi Daerah tahun 2006 – 2010 menghasilkan estimasi yang nyata atau signifikan yang memiliki pengaruh positif dan tingkat koefisien tertinggi artinya pengeluaran yang dilakukan pemerintah memberikan stimulus yang baik pada pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan hasil estimasi regresi yang menggunakan metode GLS menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh nyata atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi untuk variabel bebas RKemKD3 dan RKemKD4 sedangkan variabel REPAD dan RKetKD tidak signifikan, variabel RDD memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Muhammad. 2010. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Aceh*”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 9, No. 1, halaman 79-88.
- Alisman. 2014.”*Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat*”. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Volume 1, No. 2, November 2014, ISSN. 2442-7411.
- Bati. 2009. “*Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara)*. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Devarajan, Shantayanan. Swaroop, Vinaya. Zou, Heng-fu. 1996. “*Journal of Monetary Economics : The Composition of Public Expenditure and Economic Growth*”, volume 37, page 313 – 344.

- Dwirandra, A.A.N.B. _____. “Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002 – 2006”. Ejournal unud, halaman 1 – 21.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. Damayanti, Theresia, 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Hidayat, Paudi. Pratomo, A Wahyu. Harjito, Agus D, 2007. “Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No. 3, Desember, Hal : 213-222.
- Indrawati, Budi. 2007. “Peranan Pengeluaran Pemerintah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Era Orde Baru Dan Era Reformasi”. *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya*, Volume 8, Nomor 1.
- Juanda, Bambang. 2009. *Ekonometrika : Pemodelan dan Pendugaan*. Bogor, Penerbit IPB PRESS.
- Kawung, George M.V. 2008. “Analisis Kemampuan Keuangan dan Tingkat Ketergantungan Daerah Propinsi Sulawesi Utara pada Era Desentralisasi Fiskal”. *Jurnal Formas*, volume 1, Nomor 4, Juni.
- Kuncoro, Haryo. 2004. “Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Konejra Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 9, No. 1, Juni 2004, Hal : 47 – 63.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad, 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Edisi 3. Yogyakarta, Penerbit Erlangga.
- Kurniawati, Tri dan Suhartono, 2010. “Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah : Kasus Kabupaten Banyumas Tahun 2003 – 2008”. Pusat Penelitian Keilmuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Terbuka.
- Ladjin, Nurjanna, 2008. “Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus di Propinsi Sulawesi Tengah”. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Edisi Pertama, Yogyakarta, Penerbit BPF.
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Mulyana, Budi. Subkhan. Slamet, Kuwat, 2006. *Keuangan Daerah : Prespektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*, Jakarta. Penerbit LPKPAP.
- Mustafa, Bob dan Halim, Abdul. 2009. “Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat”. *Jurnal Aplikasi Manajemen* Volume 7, Nomor 4, Nopember.
- Nachrowi, D Nachrowi. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika : Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Pulawan, I Made. 2008. “Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Bali”. Volume 15, Nomor 3, Oktober.
- Ronald, Andreans dan Sarmitatiningsih, Dwi. 2010. “Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Volume 1, Nomor 1, Halaman 31 – 42.

- Sularso, Havid dan Restianto E, Yanuar. 2011. “*Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*”. Media Riset Akuntansi, Volume 1, Nomor 2, Halaman 109 – 124.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko, M, 2002. *Ekonomi Publik : Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Swaramarinda, Darma R.,Indriani, Susi. 2011. “*Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*”. Econosains, Volume 9, Nomor 2, Agustus.
- Syaukani, H. R, Gaffar, Afan, & Rasyid, M. Ryaas, 2007. *Otonomi Daerah : Dalam Negara Kesatuan*, Cetakan ke VII, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.
- The World Bank. 2008. “*Making Decentralization Work for Development : Methodology of the Local Government Performance Measurement (LGPM) Frame Work*”. Decentralization Support Facility.
- TIM Peneliti PKP2A III LAN. 2008. “*Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kapasitas Kinerja Otonomi Daerah di Wilayah Kalimantan*”. Jurnal Borneo Administrator Volume 4, Nomor 2.
- Undang-Undang No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. <http://www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/138.pdf>. Akses tanggal 25 Desember 2011.
- Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. <http://www.bappenas.go.id/node/123/4/uu-no25-tahun-1999-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah/>. Akses tanggal 25 Desember 2011.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf. Akses tanggal 25 Desember 2011.
- Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. <http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-22-1999.pdf>. Akses tanggal 25 Desember 2011.
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya*, Dilengkapi Aplikasi Eviews, Edisi ketiga. Yogyakarta, Penerbit Ekonesia Fakultas Ekonomi UII.